

PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA TLATAR DI KABUPATEN BOYOLALI DALAM PERSPEKTIF *GOOD TOURISM GOVERNANCE*

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

NURUL HIDAYATI

NIM. 135030500111001



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**

Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)

(QS. 55: 60)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten
Boyolali dalam Perspektif *Good Tourism Governance*

Disusun oleh : Nurul Hidayati

NIM : 135030500111001

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 9 Juli 2018

Komisi Pembimbing


Dr. Drs. Moch. Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Juli 2018

Jam : 12.00 – 13.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Nurul Hidayati

Judul : Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten
Boyolali dalam Perspektif *Good Tourism Governance*

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Drs. Moch. Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001

Penguji I

Dr. Abdullah Said, M.Si
NIP.19570911 198503 1 003

Penguji II

Ike Arni Noventi, S.AP, M.AP
NIK. 201309 861009 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 9 Juli 2018



Nama: Nurul Hidayati
NIM : 135030500111001

Lampiran 4***Curriculum Vitae******CURICULUM VITAE***

Nama : Nurul Hidayati

NIM : 135030500111001

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir: Boyolali, 29 Oktober 1995

Email : nurulhidayati036@gmail.com

Nomor HP : 085730505200

**Pendidikan Formal**

- | | |
|--|--------------|
| 1. TK Bustanul Atfal Asiyah Tejobang, Simo, Boyolali | 2000-2001 |
| 2. MI Muhamadiyah Tejobang, Simo, Boyolali | 2001-2007 |
| 3. SMPN 1 Simo, Boyolali | 2007-2010 |
| 4. SMKN 1 Banyudono, Boyolali | 2010-2013 |
| 5. Universitas Brawijaya, Malang | 2013-Selesai |

RINGKASAN

Nurul Hidayati, 2018. **Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali dalam Perspektif *Good Tourism Governance***, Moch. Rozikin.,Dr.,Drs.,M.AP, 193 halaman + xv

Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki karakteristik wisata alam, salah satunya adalah Kawasan Wisata Tlatar, dimana kawasan ini sebagai wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan, karena menjadi wisata unggulan di Kabupaten Boyolali. Namun, upaya pemerintah daerah untuk terus mengembangkan belum berjalan dengan baik. Adanya keterlibatan antara pemerintah, swasta dan masyarakat sangat diperukan. Shingga pendekatan *Good Tourism Governance* perlu mendapatkan perhatian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan Kawasan Wisata Tlatar dalam perspektif *Good Tourism Governance* beserta faktor pendukung dan penghambatnya.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Informan dari penelitian ini adalah beberapa pihak dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali beserta berbagai komponen pengelola yang terlibat dalam pengelolaan Kawasan Wisata Tlatar. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini berupa analisis data interaktif (Miles &Huberman dalam Usman, 2014).

Hasil dari penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa pengembangan Kawasan Wisata Tlatar dalam perspektif *Good Tourism Governance* adalah dengan (1) pengembangan objek dan daya tarik, (2) penigkatan aktivitas promosi, (3) pengembangan sarana dan prasarana, (4) peningkatan SDM pariwisata, (5) melibatkan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip *Good Tourism Governance* dalam penyelenggaraan pariwisata di Kawasan Wisata Tlatar. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan Kawasan Wisata Tlatar yang berupa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung berupa: adanya potensi wisata yang sudah ada, keterlibatan peran swasta dan antusiasme masyarakat yang mulai muncul. Faktor penghambat berupa: ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan dalam menyusun infrastruktur dan fasilitas destinasi belum memadai, manajemen pariwisata dan pengelolaannya belum terintegrasi, dan promosi yang belum maksimal.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan yang telah dilakukan masih kurang optimal, terlebih dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Tourism Governance*. Oleh karena itu, sebagai rekomendasi kepada *stakeholder* agar meningkatkan frekuensi pelatihan, *dialog* dan forum untuk mencapai kesepemahaman bersama kemudian dapat sesuai dengan tujuan pengembangan pariwisata khususnya di Kawasan Wisata Tlatar. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah dengan memperkaya kajian dan literasi *Good Tourism Governance* yang sudah teraplikasikan di suatu daerah.

Kata kunci: Pengembangan, Pariwisata, *Good Tourism Governance*

SUMMARY

Nurul Hidayati, 2018. **The Development of Tlatar Tourism Area in Boyolali Regency in Good Tourism Governance**, Moch. Rozikin.,Dr.,Drs.,M.AP, 193 pages + xv

Boyolali is one of the regencies in Central Java Province which has natural tourism characteristic. One of them is Tlatar Tourism Area, a currently leading potential tourism object to be developed in Boyolali Regency. However, the effort of the local government to develop has not run well. The involvement of government, private and society is needed. Therefore Good Tourism Governance approach is concerned. The aim of this study was to describe and analyze the development of Tlatar Tourism Area in the Good Tourism Governance perspective along with its supporting and inhibiting factors.

This research used descriptive research method with qualitative approach. The data source used is the primary and secondary data. The informan was some parties form Boyolali Regency's Youth, Sport and Tourism Office and some people who involved in Tlatar Tourism Area management. The data collection technique used is observation, interview and documentation. The data analysis of the research used is interactive data analysis. (Miles &Huberman in Usman, 2014)

The result of this research have concluded that the development of Tlatar Tourism Area in Good Tourism Governance perspective by: (1) the development of tourism object and its attractiveness, (2) increasing of promotional activity, (3) the development of facilities and infrastructure, (4) the improvement of tourism human resources. Any factor which is influenced in the development of Tlatar Tourism Area, it's consist of supporting and inhibiting factor. The supporting factors are: the existence of tourism potential, private involvement and the emerge of public enthusiast. The inhibiting factors conclude: the lack of human resources availability and ability in preparing the infrastructure and facilities of the destination, unintegrated tourism management and administration, and the promotion that had not been maximized.

The research showed that the development had been done is still less optimum, especially in implementing of Good Tourism Governance principles. Therefore, as researcher recommendation for stakeholder by: increasing frequency of training, dialog and forum is needed as a way to get mutual understanding in tourism development goal, especially for Tlatar Tourism Area. As a recommendation for next researcher is by increasing study and literacy of Good Tourism Governance which is exist in a city.

Key words: development, tourism, Good Tourism Governance

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali dalam Perspektif *Good Tourism Governance*”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Bapak Fadhillah Amin, Dr., M.AP.,Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik serta seluruh staf Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Moch Rozikin, M.AP selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membimbing, memberi masukan, memberi nasehat dan dorongan semangat dengan sabar dalam menyusun skripsi hingga selesai.
3. Seluruh Dosen Pengajar Jurusan Administrasi Publik yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama ini.
4. Seluruh Pimpinan, Staf, dan Karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah banyak membantu dalam berbagai aktifitas selama di kampus.
5. Kedua Orangtua, Bapak dan Mamak tercinta, Mba Ni, Mas Joko dan Mas Tri yang memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Sahabat perjuangan KAMMI FIA 2013; Hani, Widia, Aulia, Luckyta, Pinky, Husna, Ikhsan, Yogie, Daniel, Salman, Imran, Diko, dll yang telah kebersamai perjuangan selama di kampus.

7. Keluarga besar FORKIM lintas generasi dan angkatan yang selalu menjadi inspirasi untuk memperbaiki diri dan BPH FORKIM 2016; Amin, Rois, Herni, Yuli, Rizka, Umi, Endah, Hawa, Dita, Ridho, Iqbal, Baim, Aziz, Yudis, Fatih yang pernah lari bareng.
8. Ikatan Project Bundadari, Squad FH dan Geng Label Merah yang sudah menjadi supporter dan alarm untuk lulus.
9. Penghuni Kos Kertorejo 41, Kontrakan Azzahra, Asrama Al Ikhlas, Kontrakan Fatihah dan Kos Griyashanta E730 yang telah menjadi teman berproses dan hidup selama di Malang.
10. Teman-teman Administrasi Pemerintahan angkatan 2013 yang pernah belajar bareng mengarungi bangku perkuliahan.
11. Semua pihak yang berpartisipasi dalam perjalanan untuk menyelesaikan skripsi ini yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 9 Juli 2018

Nurul Hidayati

DAFTAR ISI

MOTTO.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY.....	vii
KATA PEGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan dalam Administrasi Publik.....	17
1. Administrasi Publik.....	17
2. Perkembangan Administrasi Publik.....	20
3. Administrasi Pembangunan.....	29
B. Pembangunan Daerah berbasis Potensi Lokal.....	32
1. Otonomi Daerah.....	32
2. Pembangunan Daerah.....	33
3. Potensi Lokal.....	34
4. Pembangunan Daerah berbasis Potensi Lokal.....	35
C. Pengembangan Pariwisata.....	36
1. Definisi Pengembangan Pariwisata.....	36
2. Jenis dan Macam Pariwisata.....	49
3. Dimensi Wisata.....	55
4. Tujuan Pengembangan Pariwisata.....	58
5. Konsep Kawasan Wisata.....	60
6. Pengembangan Kawasan Wisata.....	61
D. <i>Good Tourism Governance</i>	64
1. Definisi <i>Good Tourism Governance</i>	65
2. Prinsip-prinsip <i>Good Tourism Governance</i>	66

	3. Aktor/ Stakeholder dan Peranannya	70
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	72
	B. Fokus Penelitian	74
	C. Lokasi dan Situs Penelitian	75
	D. Jenis dan Sumber Data	76
	E. Teknik Pengumpulan Data	78
	F. Instrumen Penelitian	79
	G. Analisis Data	81
	H. Keabsahan Data	84
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum	86
	1. Kondisi Geografis	86
	2. Penduduk dan Ketenagakerjaan	89
	3. Visi dan Misi Kabupaten Boyolali	91
	4. Pemerintahan	92
	5. Gambaran Umum Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali	93
	a. Struktur Organisasi	93
	b. Tugas Pokok dan Fungsi	94
	6. Kekayaan Ekologis sebagai Potensi Pariwisata	95
	7. Profil Kawasan Wisata Tlatar	97
	a. Lokasi dan Kondisi	97
	b. Aksesibilitas Obyek Wisata	98
	c. Perkembangan Pasar Wisata	99
	d. Layanan Fasilitas Penunjang Wisata	100
	e. Diskripsi Kawasan Wisata Tlatar	100
	B. Penyajian Data Fokus Penelitian	106
	1. Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali	106
	a. Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata	107
	b. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata	111
	c. Pengembangan Sarana dan Prasarana	118
	d. Peningkatan Aktivitas Promosi Wisata	125
	e. Keterlibatan Masyarakat	128
	2. Penyelenggaraan Pariwisata Kawasan Wisata Tlatar berdasarkan prinsip-prinsip <i>Good Tourism Governance</i> ..	131
	3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar	141

a. Faktor Pendukung	141
b. Faktor Penghambat.....	148
C. Analisis dan Intrepertasi Data	154
1. Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali	154
a. Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata	154
b. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata.....	158
c. Pengembangan Sarana dan Prasarana	161
d. Peningkatan Aktivitas Promosi Wisata	165
e. Keterlibatan Masyarakat.....	168
2. Penyelenggaraan Pariwisata Kawasan Wisata Tlatar berdasarkan prinsip-prinsip <i>Good Tourism Governance</i> ..	170
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar	175
a. Faktor Pendukung	175
b. Faktor Penghambat.....	177
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	180
B. Saran	181
DAFTAR PUSTAKA.....	184

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.1	Persebaran Potensi Pariwisata di Kabupaten Boyolali.....	6
1.2	Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Boyolali tahun 2013-2017.....	10
2.1	Fitur perbedaan <i>Government vs Governance</i>	26
2.2	Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> (Sunaryo, 2014)	66
4.1	Jumlah Desa/ Kelurahan, RW, dan RT per Kecamatan.....	87
4.2	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2016	89
4.3	Jumlah Penduduk berumur 15 tahun yang Bekerja	91
4.4	Tingkat Pendidikan Pegawai DISPORAPAR	94
4.5	Identifikasi Jasa Makanan dan Minuman di Kab. Boyolali	123
4.6	Identifikasi Jenis Usaha Penginapan Kab. Boyolali	124

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
2.1	Model Ilustrasi <i>Good Tourism Governance</i>	70
3.1	<i>Components of Data Analysis: Interactive Model</i>	84
4.1	Peta Administrasi Kabupaten Boyolali	86
4.2	Struktur Organisasi DISPORAPAR	93
4.3	Lokasi Kawasan Wisata Tlatar	97
4.4	Grafik Jumlah Pengunjung Obyek Wisata.....	99
4.5	Area Kawasan Wisata Tlatar	100
4.6	Area Pancingan 7 Pondok Asri.....	101
4.7	Taman Air	102
4.8	Area Olahraga <i>Woodball</i>	102
4.9	Pancingan Sumber Rejeki	103
4.10	Pancingan 17 Umbul Pengilon	103
4.11	Mina Tlatar Indah	104
4.12	Pancingan 4 Tirto Wening	104
4.13	Kolam Renang Standar Nasional.....	105
4.14	<i>Outbond Karunia Center</i>	105
4.15	<i>Cultural Place Application</i>	112

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1	Pedoman Wawancara.....	187
2	Surat Rekomendasi Penelitian.....	191
3	Foto Kegiatan Penelitian.....	192
4	<i>Curriculum Vitae</i>	193



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergeseran paradigma dari *government* menuju *governance*, khususnya pada *good governance* dapat dilihat sebagai kecenderungan global. Karena *good governance* muncul dari sebuah desakkan ketika negara berkembang mengalami kekacauan manajemen pemerintahannya dan perekonomiannya. Gagasan *good governance* dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik karena ada keterlibatan antara sektor swasta, bahkan masyarakat sendiri (Bondan Gunawan dalam Tjokroamidjojo, 2001: 19). Artinya penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai suatu upaya untuk mengelola lebih mengarah kepada pemberdayaan manusia yang tidak jauh dari sinergisitas tiga sektor, baik dari sektor pemerintah (*public sector*), sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat sipil (*civil society*).

Di Indonesia, konsep dari *good governance* pertama kali diperkenalkan setelah krisis moneter pada tahun 1997. “*The crisis forced Indonesians to survive by applying good governance through innovative policies*” (Mardiasmo dalam Nurhayati *et al*, 2017). Akibat dari krisis tersebut, kemudian memaksa orang Indonesia untuk bertahan hidup dengan menerapkan tata pemerintahan yang baik melalui kebijakan yang inovatif. “*One of them was the decentralization policy which introduced*

regional autonomy in 1999” (Mardiasmo, 2008, Utomo 2011 dalam Nurhayati *et al*, 2017). Salah satunya adalah kebijakan desentralisasi yang memperkenalkan otonomi daerah di tahun 1999. Hal tersebut ditunjukkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian diperbarui lagi pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembaharuan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dimana setiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

“With the rise of the tourism industry in indonesia, attempts have been made to apply good governance in the industry. This is not surprising since tourism has become one of the fastest growing industries in Indonesia” (Nurhayati *et al*, 2017). Melalui industri pariwisata di Indonesia yang saat ini mengalami peningkatan, upaya yang dapat dilakukan adalah untuk menerapkan *good governance* dalam industri tersebut. Hal tersebut tidaklah mengherankan semenjak pariwisata telah menjadi industri dengan memiliki pertumbuhan paling cepat di Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya bahwa, pada tahun 2016, daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global kini sudah berada di ranking 50 yang semulanya berada pada posisi ke-70 (diakses melalui www.goodnewsfromindonesia.id/2017/04/23/terus-naik-daya-saing-pariwisata-indonesia-peringkat-30-dunia).

“Hal tersebut didukung dengan kunjungan wisatawan mancanegara selama Januari hingga Agustus 2017 tumbuh 25,68 % kemudian diikuti oleh kenaikan devisa Indonesia yang berpotensi turut naik dari posisi US\$13, 57 miliar pada tahun 2016 ke angka US\$17, 05 miliar sampai akhir 2017. Meski demikian, capaian devisa ini bukan berarti datang secara instan. Sebab, sejak tahun 2013, pariwisata selalu menjadi peringkat keempat penyumbang devisa negara. Hanya saja, keadaan mulai berbalik tahun lalu ketika pariwisata menjadi kontributor devisa terbesar kedua”, paparan Menteri Pariwisata Arief Yahya (*diakses melalui www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171018180443-78-249279/ke-menpar-klaim-pariwisata-jadi-kontributor-utama-devisa*)

Pencapaian-pencapaian tersebut tidak terlepas dari berbagai aktor dalam menata dan mengelola sektor pariwisata. Maka dari itu, untuk menerapkan *good governance* dalam pariwisata, melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata disebutkan bahwa penyelenggaraan pariwisata berdasarkan asas berkelanjutan (Pasal 2 huruf h). Artinya pariwisata sebagai industri memiliki makna tidak hanya memperhatikan aspek pendapatan dan wisatawan saja akan tetapi harus memperhatikan daya dukung, bagaimana kemudian keberadaan dari industri pariwisata dapat mensinergiskan berbagai aktor yang berperan. Sejalan dengan pendapat UNESCO terkait dengan definisi dari pariwisata berkelanjutan, “*tourism that respects both local people and the traveler, cultural heritage and the environment*”(The UNESCO, 2016). Maksudnya pariwisata yang memperhatikan penduduk lokal dan wisatawan, warisan budaya serta lingkungan.

Melalui undang undang tentang kepariwisataan tersebut, pemerintah daerah dapat menginternalisasi *good governance* dalam industri pariwisata di daerah. Secara sederhana, industri pariwisata

merupakan salah satu potensi yang dimiliki daerah, daerah memiliki hak untuk mengelola apa yang menjadi potensi daerahnya untuk dikembangkan dalam rangka membangun daerah. Penerapan *good governance* dalam mengelola industri pariwisata daerah sebagai tata kelola pariwisata yang baik dapat diwujudkan dengan memperhatikan kolaborasi dari aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sunaryo (2013: 77) bahwa,

“ prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik ini pada intinya adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta/industri pariwisata, dan masyarakat setempat yang terkait.”

masih dalam buku yang sama, tata kelola kepariwisataan yang baik dikenalkan oleh Sunaryo sebagai *good tourism governance* (GTG). Penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik memperhatikan beberapa prinsip berupa:

(1) Partisipasi Masyarakat Terkait; (2) Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan; (3) Kemitraan Kepemilikan Lokal; (4) Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut; (5) Mengakomodasikan Aspirasi Masyarakat; (6) Daya Dukung Lingkungan; (7) Monitor dan Evaluasi Program; (8) Akuntabilitas Lingkungan; (9) Pelatihan Pada Masyarakat Terkait; (10) Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Lokal.

Salah satu perubahan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan GTG adalah perubahan baik berupa cara berfikir ataupun bertindak, terutama dalam meninggalkan paradigma lama yang berupa *government bureaucracy*. Maksudnya adalah bagaimana paradigma lama berupa pemerintahan yang sentralistik menuju pada paradigma baru berupa

penyelenggaraan yang desentralistik dan berlokos jamak. Lebih mengacu pada pemahaman bahwa tidak hanya yang dilakukan pemerintah saja yang baik akan tetapi segenap pemangku kepentingan yang terkait mempunyai kapasitas yang memadai.

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dikenal sebagai Kota Susu dan slogan Boyolali Tersenyum (Tertib, Elok, Rapi, Sehat, Nyaman untuk Masyarakat) merupakan salah satu daerah yang menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang terletak di lereng Gunung Merapi dan Merbabu, keberadaan tersebut menjadikan Boyolali memiliki pemandangan yang eksotis. Pengembangan potensi investasi berdasarkan regionalisasi Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali memiliki peluang investasi pada industri kreatif dan pariwisata. Keberadaan Kabupaten Boyolali menjadi jalur transportasi nasional sekaligus *regional* yang menghubungkan Kota Surakarta – Semarang dan Surakarta – Yogyakarta (www.boyolali-kab.go.id). Terlebih dengan keberadaan Jalur Solo-Selo-Borobudur (SSB) tersebut yang melintasi kedua gunung dipromosikan menjadi jalur wisata menarik yang menjadi pilihan bagi wisatawan baik domestik maupun asing dari kota budaya Surakarta menuju Candi Borobudur untuk melintasi Kabupaten Boyolali. Sementara itu, Kabupaten Boyolali belum masuk dalam wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) ataupun Destinasi Pengembangan Nasional (DPN) dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS). Akan tetapi,

keberadaan dari Kabupaten Boyolali yang terletak di antara dua KSPN, yaitu KSPN Jawa Tengah dan KSPN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki kecenderungan bahwa Kabupaten Boyolali seringnya dilewati atau dijadikan sebagai jalur transportasi perantara dua KSPN tersebut. (*Lampiran III Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025*). Berada pada daerah yang strategis, Kabupaten Boyolali memiliki potensi pariwisata yang dapat ditemukan menjadi beberapa bagian. Berikut ini Tabel 1.1 Persebaran Potensi Pariwisata Kabupaten Boyolali

Tabel 1.1 Persebaran Potensi Pariwisata di Kabupaten Boyolali

Jenis Wisata	Nama Wisata dan Lokasi
Wisata Alami	<ul style="list-style-type: none"> a. Wisata Pengging di Desa Bendan Kecamatan Banyudono b. Umbul Sungsang di Dk Ngalian, Desa Bendan Kec. Banyudono c. Umbul Kendat di Kecamatan Banyudono d. Umbul Dudo di Kec. Banyudono e. Umbul Temanten di Kec. Banyudono f. Umbul Ngabean di Kec. Banyudono g. Umbul Sewu (<i>Waterboom</i>) di Kec. Banyudono h. Umbul Langse di Desa Nepen, Kec. Sawit i. Umbul Tlatar di Kecamatan Banyudono j. Umbul Tirtomulyo di Kecamatan Sawit k. New Selo, Arga Merapi-Merbabu di Desa Lencoh , Samiran, dan Selo, Kec. Selo l. Umbul Ngleses di Kec. Sawit m. Umbul Ngeblak di Kec. Sawit n. Umbul Sipendok, Hutan Lindung Ampel, Boyolali. Air terjun jalin Gunung Merbabu-Sipendok) o. Air Terjun Semuncar di Desa Candisari dan Desa Ngagrang, Kec. Ampel p. Air Terjun Pantaran Curug Tempuran, Desa Candisari Kec. Ampel q. Air Terjun Kedung Kayang, Desa Klakah, Kec. Selo

Lanjutan Tabel 1.1

Jenis Wisata	Nama Wisata dan Lokasi
Wisata Alam	<ul style="list-style-type: none"> r. Wisata air Waduk Cenglek di Kecamatan Ngemplak s. Wisata air Waduk Bade di Kecamatan Klego t. Wisata air Bendungan Sidorejo, Desa Ngleses, Kec. Juwangi u. Wisata air Waduk Kedungombo, Desa Wonoharjo, Kec. Kemusu v. Jembatan Penghubung Dukuh Salaran Jrahah Kec. Selo Bukit Samiran di Kec. Selo
Wisata Buatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Wisata Padi Organic Desa Catur, Kec. Sambu dan Desa Dlingo, Kec. Mojosongo b. Wisata Sapi Perah di Kec. Cepogo, Kec. Selo, Kec. Musuk, dan Kec. Boyolali c. Wisata Sayur Desa Senden, Kec. Selo d. Wisata Jamu Tilung Desa Sapiyan, Desa Methuk, Kec. Mojosongo e. Wisata Kampung Lele Desa Tegalrejo, Kec. Sawit f. Wisata Buah Papaya (Papaya Kalina) Kec. Mojosongo g. Biogas di Desa Sruni, Kec. Musuk h. Industri Abon dan Dendeng di Kec. Ampel i. Kerajinan Tembaga Kampong Tumang, Kec. Cepogo j. Kerajinan Sangkar Burung di Desa Urut Sewu, Kec. Ampel dan di Kec. Andong k. Kerajinan Kayu di Kec. Banyudono dan Kec. Mojosongo l. Kerajinan Ijuk di Kec. Mojosongo m. Kerajinan Alumunium Desa Kembang Kuning, Kec. Cepogo n. Alun-alun Kidul Desa Kemiri Kec. Mojosongo o. Patung Arjuna Wijaya di Kecamatan Boyolali p. Patung Sapi “Gedung Lembu Sora” di Lokasi alun-alun kidul
Wisata Seni Budaya dan Religi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pesanggrahan Pracimoharjo Desa Paras, Kec. Cepogo b. Ki Ageng Pantaran, Dk Pantaran Desa Candisari, Kec. Ampel c. Makam Syeh Maulana Malik Ibrahim Maghribi di Dk Pantaran Desa Candisari, Kec. Ampel

Lanjutan Tabel 1.1

Jenis Wisata	Nama Wisata dan Lokasi
	d. Makam Ki Ageng Singoprono Gunung Tugel di Desa Nglembo, Kec. Sambu e. Makam R. Ng. Yosodipuro di Desa Bendan, Kec. Banyudono f. Tapak Noto di Desa Wonodoyo, Kec. Mojosongo g. Makam Sekar Kedaton/ Retno Pambayung di Keraton Pengging diantara makam Bodean dan Umbul Kendat h. Makam Indrokilo di Kec. Banyudono i. Petilasan Kebokanigoro di Desa Samiran Kec. Selo j. Candi Sari di Desa Gedangan Kec. Cepogo k. Masjid Cipto Mulyo di Kec. Banyudono l. Candi Lawang di Desa Gedangan, Kec. Cepogo

Sumber: Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kab. Boyolali Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut, Boyolali memiliki beragam daya tarik wisata. Potensi wisata Kabupaten Boyolali merupakan potensi yang memanfaatkan sumber daya alam dan ekosistemnya, serta atraksi wisata buatan manusia, seperti adanya atraksi budaya, tradisi dan peristiwa. Salah satu permasalahan di Kabupaten Boyolali adalah dengan banyaknya potensi wisata daerah tapi tidak teroptimalkan dengan baik. Sehingga wisata di Kabupaten Boyolali tersebut belum bisa menjadi *icon* daerah. (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Boyolali 2017)

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan pariwisata di Boyolali dibutuhkan perencanaan yang matang. Upaya yang terlihat melalui sasaran strategis pada bidang pariwisata dan industri sebagai dimensi pembangunan sektor unggulan sebagaimana yang terdapat di RPJMD (Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah) 2016-2021. Sasaran

strategis bidang pariwisata di Boyolali diturunkan menjadi program kerja pada instansi yang terkait yakni Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali. Adapun program kerja dari dinas untuk berfokus meningkatkan popularitas daya tarik wisata dan potensi daerah. Hal tersebut dirumuskan dengan “*green, water, smart city*” dimana *tagline* tersebut menggambarkan dari ciri daerah kota hijau, kota air, dan kota pintar. Rumusan tersebut biasa kita kenal dengan *City branding*, dimana hal tersebut dapat dikatakan sebagai strategi dari suatu negara atau daerah untuk *positioning* yang kuat di dalam benak target pasar mereka, seperti layaknya *positioning* sebuah produk atau jasa, sehingga negara dan daerah tersebut dapat dikenal secara luas di seluruh dunia (Harahap dalam Gustiawan: 2011). Artinya *tagline* tersebut tidak hanya sekedar slogan atau kampanye promosi akan tetapi menjadi suatu gambaran dari pikiran, perasaan, asosiasi dan ekspektasi yang datang dari benak seseorang ketika orang tersebut melihat atau mendengar sebuah nama, logo, produk layanan ataupun simbol yang lainnya. Sebagaimana *tagline green, water, smart city* mencerminkan potensi dan harapan pembangunan suatu daerah, termasuk didalamnya potensi pariwisata. *Water* atau air merupakan salah satu potensi dan identitas yang dimiliki Kabupaten Boyolali. Sekaligus pariwisata berada pada prioritas pembangunan Boyolali sebagai salah satu pengembangan daya saing daerah yang berwawasan *green city*, dan *smart city*. Sehingga untuk mewujudkan Pembangunan pariwisata agar sesuai dengan prioritas pembangunan adalah dengan mendorong masyarakat

berkolaborasi dengan pemerintah memasarkan citra pariwisata dan budaya Boyolali. (RIPPDA Boyolali, 2017)

Peningkatan popularitas produk wisata yang ada di Boyolali dapat dilihat melalui seberapa banyak jumlah wisatawan yang mengunjungi. Adapun jumlah pengunjung obyek wisata di Kabupaten Boyolali dalam tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Boyolali tahun 2013-2017

Obyek Wisata	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Umbul Pengging	49.279	79.195	79.195	81.382	79.363
Makam Yosodipuro	14.866	16.390	16.390	31.517	27.810
Umbul Sewu	4.300	4.250	37.675	43.730	32.258
Tlatar	228.673	235.603	235.603	227.638	239.506
Wana Wisata Telawa	15.561	14.339	14.339	19.272	51.906
Waduk Cengklik	11.610	10.386	10.386	6.596	4.814
Waduk Bade	12.836	13.879	13.879	13.869	18.585
Kawasan Arga Merapi Merbabu	566	18.612	18.612	131.286	70.622
Makam Pantaran	1.472	2.427	2.427	1.757	2.027
Gunung Tugel	2.157	2.254	2.254	2.262	1.784
Jumlah	341.320	397.335	430.760	559.309	528.675

Sumber: DISPORAPAR Kabupaten Boyolali 2018

Berdasarkan tabel tersebut jika dilihat dari jumlah pengunjung maka Kawasan Tlatar merupakan destinasi yang paling favorit dengan jumlah pengunjung terbanyak, kemudian selanjutnya Arga Merapi dan Merbabu. Secara realita daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Boyolali adalah Kawasan Wisata Tlatar karena paling banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik. Akan tetapi Arga Merapi-Merbabu meskipun

wisatawannya tidak sebanyak Umbul Tlatar tapi lebih dikenal lokal, nasional ataupun internasional, disamping memang Arga Merapi-Merbabu termasuk dalam pengelolaan taman nasional.

Pada penelitian ini, peneliti ingin memperdalam terkait dengan pengembangan wisata Kawasan Tlatar, karena Kawasan Wisata Tlatar merupakan salah satu pariwisata lokal atau domestik di Kabupaten Boyolali yang memiliki pengunjung terbanyak dibandingkan dengan tempat wisata yang lain. Jika obyek wisata tersebut dioptimalkan maka akan dapat memberikan dampak atau *multiplier effect* ke beberapa pihak. Menurut pengamatan peneliti secara sekilas, peneliti menemukan bahwa pengelolaan pada Wisata Tlatar yang berjalan selama ini masih banyak ditemukan permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Terutama pada masalah daya tarik parawisata, sarana dan prasarana, kesiapan masyarakat di area wisata, lemahnya jaringan promosi baik dari dalam daerah atau antar daerah, dan kompetensi tenaga kerja. Sehingga diperlukan pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Mengingat bahwa Wisata Tlatar adalah salah satu wisata tirta potensial yang dapat menjadi salah satu *icon* dari *tagline* Kabupaten Boyolali sebagai kota air. Maka dibutuhkan penanganan yang tepat dalam mengembangkan potensi wisata tersebut. Dengan melihat pemanfaatan Wisata Tlatar yang sangat besar, maka diperlukan arahan pengembangan

yang memperhatikan komponen alam dan masyarakat sekitar guna menjadi referensi oleh pemerintah daerah bersama *stakeholder* untuk mengambil kebijakan dalam pengembangan Wisata Tlatar sebagaimana pemanfaatannya yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Boyolali 2016-2021 sebagai prioritas unggulan pembangunan daerah. Disamping itu, di tengah upaya pemerintah daerah Kabupaten Boyolali menerapkan *good governance*, peneliti ingin mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada sektor pariwisata yang ada dan sedang berkembang. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti akan melakukan riset tentang pengembangan kawasan wisata dengan judul “**Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali dalam Perspektif *Good Tourism Governance*”**”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali dalam Prinsip-prinsip *Good Tourism Governance*?
3. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali
2. Untuk mengidentifikasi Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali dalam prinsip-prinsip *Good Tourism Governance*
3. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali

D. Manfaat Penelitian

Perumusan Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali dalam Perspektif *Good Tourism Governance* memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis
 - a. Perspektif Keilmuan Administrasi Publik, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengayaan studi Administrasi Publik, agar mampu menerapkan teori yang didapat selama perkuliahan dan meningkatkan kajian ilmiah terkait dengan Administrasi Pembangunan melalui pengembangan kawasan wisata dalam perspektif *Good Tourism Governance*

- b. Sebagai Riset Awal, penelitian ini merupakan penelitian awal yang dapat dijadikan sebagai pustaka untuk melakukan penelitian lanjutan serta dapat dikembangkan lagi untuk penelitian serupa di kemudian hari.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan bahan kajian terhadap peran pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam menghidupkan kembali potensi lokal khususnya untuk suksesi pembangunan kepariwisataan daerah. Adapun manfaat untuk Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam menata dan mengelola pelayanan publik khususnya untuk memperhatikan tata kelola kepariwisataan;
- b. Masyarakat, sebagai informasi untuk mengetahui seberapa besar tingkat kinerja pemerintah dalam mengelola kepariwisataan sehingga masyarakat dapat mengambil peran untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
- c. Swasta, untuk mengetahui manajemen pengelolaan kepariwisataan, dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus membaca peluang untuk berinvestasi di sektor pariwisata.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai rangkain dari satu bab ke bab yang lainnya. Pada penelitian dengan judul “Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali dalam Perspektif *Good Tourism Governance*” memiliki urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah dengan permasalahan yang diangkat, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, kontribusi penelitian baik kontribusi akademis maupun praktis, kemudian menjelaskan secara ringkas terkait rangkaian penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan dan diuraikan landasan teori yang disesuaikan dengan teori landasan berpikir dari permasalahan yang diangkat. Sehingga dapat mempermudah untuk menganalisa permasalahan. Secara garis besar kemudian dikelompokkan sesuai dengan hasil studi kepustakaan dari berbagai literatur.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian apa yang digunakan. Mencakup jenis penelitian, fokus penelitian,

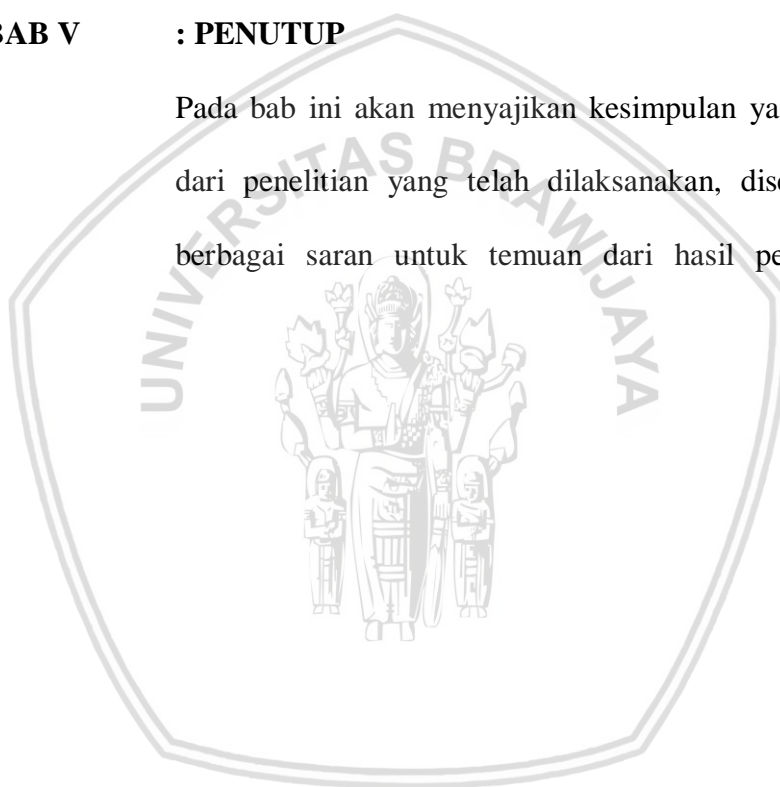
jenis dan sumber data, pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum situs penelitian, data fokus penelitian, data analisis dari data fokus penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan, disertai dengan berbagai saran untuk temuan dari hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan dalam Administrasi Publik

1. Administrasi Publik

Secara *etimologis*, administrasi berasal dari bahasa Latin *ad* dan *ministrae*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administratio* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”. Di Italia disebut *amministrazione*, sedangkan di Perancis, Inggris dan Amerika Serikat disebut *Administration*. Di Indonesia kita mengenal dan memahami “Administrasi” yang memiliki dua arti, dalam arti sempit administrasi diartikan sebagai tata usaha sedangkan dalam arti luas administrasi berarti proses rangkaian kegiatan usaha kerjasama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien (Syafri, 2012: 3-4). Sedangkan secara *terminologis* apa yang disebut “Administrasi” adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan *pe* dan akhiran *an* pada setiap arti maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adalah terciptanya keteraturan dalam susunan dan pengaturan dinamikanya (Ali, 2015: 19). Sejalan dengan pendapat tersebut, A Dunsire (dalam Keban, 2014:2) mengatakan bahwa Administrasi dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan,

implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Sejalan dengan beberapa pendapat terkait dengan administrasi, maka administrasi dapat disimpulkan memiliki arti yang sempit dan arti yang luas. Arti yang sempit administrasi memiliki makna sebagai tata usaha. Sedangkan administrasi dalam arti luas memiliki arti sebagai proses rangkaian kegiatan usaha kerjasama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien kegiatan tersebut berupa implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik.

Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014: 3) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. “Publik” dapat diartikan sebagai masyarakat luas sebagai lawan dari individu tetapi “publik” juga menunjuk pada mereka yang bekerja untuk kepentingan masyarakat luas atau dikenal dengan “lembaga pemerintah”

(4). Sedangkan menurut Pfiffner & Presthus (dalam Syafri, 2012:20)

menyatakan bahwa:

“Public administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy”. Administrasi publik dapat didefinisikan sebagai suatu upaya koordniasi dari individu atau kelompok untuk menjalankan kebijakan publik.

Public administration is the practical or business end of government because its objective is to get the public business done as efficiently and as much in accord with the people's tastes and desired as possible. It is through administration that government responds to those needs of society that private iniatiative can not or will not supply. Administrasi Publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat/swasta (Woodrow Wilson dalam Syafri, 2012: 21).

Sedangkan menurut Fesler dalam Keban (2014: 5) mengemukakan bahwa administrasi pubik adalah *the administration of government affairs*. Administrasi Publik diartikan sebagai penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar dan untuk kepentingan publik. Maka, dapat disimpulkan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan dari individu atau kelompok untuk menjalankan kebijakan publik melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin dalam skala besar sesuai dengan selera dan keinginan rakyat.

2. Perkembangan Administrasi Publik

Ilmu Administrasi Publik merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial(humaniora) yang tidak terlepas dari perkembangan sosial budaya, politik dan peradaban manusia. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, administrasi publik memainkan peranan penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Perjalanan penyelenggaraan administrasi publik mengalami berbagai pergeseran paradigma, dimulai dari model klasik yang berkembang dalam kurun waktu 1855/1887 hingga akhir 1980an, *New Public Management* (NPM) yang berkembang dalam kurun waktu 1980an hingga pertengahan 1990an sampai kepada *Good Governance* yang berkembang sejak pertengahan 1990an hingga sekarang ini. Sebagaimana Kurniawan(2007) berkesimpulan bahwa pergeseran paradigma tersebut telah berpengaruh pada penyelenggaraan administrasi publik yang berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan strategi, pengelolaan organisasi secara internal serta interaksi dengan berbagai aktor lainnya. Pada akhirnya administrasi publik akan menentukan corak dan ragam penyelenggaraan dari suatu negara, dalam hal ini Indonesia. Adapun paradigma administrasi publik dari masa ke masa sebagaimana berikut:

a. Administrasi Publik Model Klasik

Economic and Sosial Council UN (2004) dalam Kurniawan (2007) mengungkapkan bahwa administrasi publik seringkali

dilihat sebagai seperangkat institusi negara, proses, prosedur, sistem dan struktur organisasi, serta praktek dan perilaku untuk mengelola urusan-urusan publik dalam rangka melayani kepentingan publik. Sebagai organisasi birokrasi, administrasi publik bekerja melalui seperangkat aturan dengan legitimasi, delegasi, kewenangan rasional-legal, keahlian, tidak berat sebelah, terus menerus, cepat dan akurat, dapat diprediksi, memiliki standar, integritas dan profesionalisme dalam rangka memusakan kepentingan masyarakat umum. Dengan demikian, administrasi publik sebagai sebuah instrument negara diharapkan untuk menyediakan basis fundamental bagi perkembangan manusia dan rasa aman, termasuk di dalamnya kebebasan individu, perlindungan akan kehidupan dan kepemilikan, keadilan, perlindungan terhadap hak asasi, stabilitas, dan resolusi konflik secara damai baik dalam mengalokasikan atau mendistribusikan sumberdaya maupun dalam hal lainnya. Dengan kata lain, administrasi negara yang efektif harus ada untuk menjamin keberlanjutan aturan hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa administrasi publik model klasik ini cenderung menggunakan pendekatan yang legalistik.

Seiring dengan adanya kritikan yang diungkapkan oleh Stoker (2004) dalam Kurniawan (2007) membuat paradigma administrasi publik model klasik mulai melemah pada akhir tahun

1970an dan memberikan jalan terhadap konsep manajemen publik. Kritik tersebut ditujukan kepada administrasi publik yang dianggap *inter alia*, *red tape*, lamban, tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, penggunaan sumber daya publik yang sia-sia akibat hanya berfokus pada proses dan prosedur dibandingkan kepada hasil, sehingga pada akhirnya menyebabkan munculnya pandangan negatif dari masyarakat yang menganggap administrasi publik sebagai beban besar para pembayar pajak.

b. *New Public Management* (NPM)

Paradigma NPM ini muncul disebabkan oleh berbagai kekuatan baik di negara maju maupun di negara berkembang pada tahun 1963. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa selama sekitar 30 tahun belakangan atau satu generasi, tingkat kepercayaan dan apresiasi rakyat amerika serikat menurun drastis. Sebagaimana digambarkan oleh Larbi (1999) dalam Kurniawan (2007). Di negara maju, perkembangan yang terjadi di bidang ekonomi, sosial, politik dan lingkungan administratif secara bersama-sama mendorong terjadinya perubahan radikal dalam sistem manajemen dan administrasi publik. Sasaran yang diinginkan adalah dengan meningkatkan cara pengelolaan pemerintah dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat dengan penekanan efisiensi, ekonomi dan efektivitas.

NPM menyediakan banyak pilihan untuk mencoba mencapai biaya yang efektif dalam penyampaian barang publik seperti adanya organisasi yang terpisah untuk kebijakan dan implelementasi, kontrak kinerja, pasar internal, sub kontrak dan metode lainnya. NPM memiliki fokus yang kuat terhadap organisasi internalnya(Oluwu dalam Kurniawan, 2007). Pada intinya NPM berusaha untuk memperbaiki kinerja organisasi sektor publik dengan menggunakan metode yang biasa digunakan oleh sektor privat.

Pola hubungan yang baru antara warga dengan birokrasi menurut Haque (dalam Kurniawan, 2007) membawa implikasi terhadap (5) lima hal yakni (1) redefinisi kewargaan/masyarakat dalam pelayanan publik; (2) transformasi etika admnistrasi yang mempengaruhi masyarakat; serta (5) restrukturisasi hak masyarakat terhadap pelayanan publik. Redefinisi kewargaan/ masyarakat dalam pelayanan publik harus dilakukan mengingat sebelumnya pelayanan publik dituntut untuk dapat melayani semua kelas dan kelompok masyarakat tanpa terkecuali khususnya kelas yang terpinggirkan yang biasanya ditinggalkan oleh sektor privat dalam mekanisme pasar. Namun demikian, dengan diadopsinya pendekatan berorientasi pasar menyebabkan masyarakat diredefiniskan sebagai konsumen atau klien dan karenanya memiliki implikasi pola hubungan antara pemerintah dan

masyarakat. Pola hubungan yang baru tersebut melibatkan adanya transaksi keuangan antara masyarakat dengan pemerintah dalam proses penyediaan pelayanan publik. Sebagaimana menurut Haque dalam Kurniawan (2007) kondisi tersebut khususnya di negara berkembang dapat merugikan bagi kelompok masyarakat miskin yang tidak memiliki kapasitas keuangan sebagai konsumen atau pengguna pelayanan. Sehingga dampak dari perubahan-perubahan tersebut adalah terjadinya krisis identitas pada sektor publik, yakni berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah sehingga menyebabkan kurangnya legitimasi publik, serta restrukturisasi hubungan masyarakat dengan pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik.

c. *Good Governance*

Pada tahun 1990-an, dampak negatif dari penekanan yang tidak pada tempatnya terhadap efisiensi dan ekonomi dalam pengelolaan masalah-masalah publik menyebabkan menurunnya penyampaian pelayanan publik kepada masyarakat khususnya menyangkut barang-barang yang bersifat publik. Pada akhirnya barang-barang publik tersebut tidak dapat disediakan secara memadai melalui penerapan yang ketat dari kekuatan pasar. (Economic dan Social Council UN, dalam Kurniawan 2007). Melalui penerapan yang berlebihan terhadap perilaku manajemen sektor privat telah menyebabkan sektor publik kehilangan

orientasinya terhadap tanggungjawab yang diembannya untuk kepentingan umum publik. Maka dari itu, dalam konteks inilah konsep *governance* yang memiliki focus perhatian terhadap partisipasi, kepentingan masyarakat, kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan masalah-masalah publik mulai mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Melalui penerapan konsep *governance* diharapkan dapat mengembalikan perhatian dari administrasi publik terhadap kepentingan umum publik, khususnya dengan melibatkan partisipasi dari publik dalam proses pemenuhan kepentingan publik.

Konsep *governance* menurut Stoker (1998) dalam Kurniawan (2007) merujuk pada pengembangan dari gaya memerintah dimana batas-batas antara dan diantara sektor publik dan sektor privat menjadi kabur. Pengaburan batas-batas ini sejalan dengan kebutuhan negara modern untuk lebih melibatkan mekanisme politik dan untuk terlibat sehingga memberikan kesempatan bagi adanya mobilisasi baik secara sosial maupun politik. Hal tersebut kemudian membuat partisipasi melalui pembangunan jejaring antara pemerintah dan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting bagi keberlanjutan sebuah legitimasi kebijakan.

Konsep *governance* kemudian berkembang menjadi *good governance* seperti yang dikenal sekarang dalam rangka

membedakan implementasinya antara yang “baik” (*good*) dengan yang “buruk” (*bad*). *Good governance* menurut Plumptre and Graham dalam Kurniawan (2007), merupakan model dari *governance* yang mengarahkan kepada hasil ekonomi dan sosial sebagaimana dicari oleh masyarakat.

Adapaun 5 (lima) fitur dimensi berdasarkan pengamatan Schwab dan Kubler (2001) dalam Kurniawa (2007) terhadap interaksi pada sebuah kontinum pengaturan kebijakan antara *governance* dan *government* berupa dimensi aktor, dimensi fungsi, dimensi struktur, dimensi konvensi dari interaksi dan dimensi distribusi dari kekuasaan.

Tabel 2.1 Fitur yang membedakan *governance* dari *government*

<i>Government</i>	Dimensi	<i>Governance</i>
Peserta sangat terbatas jumlahnya, umumnya adalah lembaga-lembaga pemerintah	Aktor	Jumlah peserta yang besar, Terdiri atas aktor publik dan privat
Sedikit/ jarang konsultasi, tidak ada kerjasama dalam pembuatan/pelaksanaan kebijakan isu kebijakan menjadi luas	Fungsi	Lebih banyak konsultasi, Adanya kemungkinan kerjasama dalam pembuatan/pelaksanaan kebijakan Isu kebijakan menjadi sempit
Batas-batas yang tertutup, batas berdasarkan kewilayahan (teritori), keanggotaan yang tidak sukarela	Struktur	Batas-batas yang sangat terbuka, Batas berdasarkan fungsi, Keanggotaan secara sukarela

<i>Government</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Governance</i>
Kewenangan yang hierarkis, kepemimpinan yang terkunci, interaksi yang saling berlawanan/ hubungan yang cenderung konflik, kontak-kontak informal, kerahasiaan	Konvensi dari interaksi	Konsultasi horisontal, intermobilitas Konsensus atas nilai-nilai teknokratik/ hubungan kerjasama Kontak-kontak yang sangat informal Keterbukaan
Otonomi yang besar dari negara terhadap masyarakat/ dominasi negara Tidak ada akomodasi terhadap kepentingan masyarakat oleh negara, Tidak adanya keseimbangan/simbiosis antar aktor	Distribusi dari kekuasaan	Otonomi yang rendah dari negara terhadap masyarakat/ dominasi negara yang tersebar Kepentingan masyarakat diakomodir oleh negara Adanya keseimbangan atau simbiosis antar aktor

Sumber: Schwab and Kubler (2001) dalam Kurniawan (2007)

Dilihat dari aktornya, *governance* banyaknya jumlah peserta, baik yang berasal dari sektor publik maupun privat yang terlibat dalam pengaturan sebuah kebijakan. Sedangkan, *government* dicirikan dengan sangat sedikit dan terbatasnya jumlah peserta dalam proses pengaturan kebijakan tersebut, aktor yang terlibat pun biasanya merupakan badan-badan (lembaga) pemerintahan.

Dari dimensi fungsi, *governance* dicirikan melalui banyaknya konsultasi yang dilakukan dalam pengaturan kebijakan. Hal tersebut memungkinkan bagi adanya kerjasama dalam pembuatan kebijakan antara aktor-aktor yang terlibat sehingga isu-isu kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih sempit. Hal ini

berbeda dengan *government* yang dicirikan dengan sedikitnya konsultasi, tidak adanya kerjasama antar aktor dalam pembuatan kebijakan yang menyebabkan luasnya isu kebijakan yang dihasilkan.

Dari dimensi struktur, *governance* dicirikan dengan adanya batas-batas yang didefinisikan secara fungsional dan sangat terbuka selain keanggotaan dari struktur yang bersifat sukarela. Batas-batas yang didefinisikan secara fungsional disini berarti pertimbangan pengaturan kebijakan didasarkan atas kebutuhan fungsional. Hal ini tidak seperti *government* yang mendefinisikan batas-batas berdasarkan kewilayahan dan bersifat tertutup selain tentu saja keanggotaannya yang tidak sukarela, artinya untuk dapat masuk sebagai struktur harus merupakan anggota dari organisasi sektor publik.

Dari dimensi konvensi interaksi, *governance* dicirikan dengan konsultasi yang sifatnya horizontal dengan pola hubungan yang bersifat kooperatif sehingga lebih banyak keterbukaan. Sementara *government* dicirikan dengan adanya hierarki kewenangan sehingga pola hubungan yang terjadi lebih banyak bersifat konflik dan dipenuhi dengan banyak kerahasiaan.

Dari dimensi distribusi kekuasaan, *governance* dicirikan dengan rendahnya dominasi negara, dipertimbangkannya kepentingan masyarakat dalam pengaturan kebijakan serta adanya

keseimbangan atau simbiosis antar aktor. Sementara *government* dicirikan dengan adanya dominasi negara yang dalam banyak hal tidak terlalu memperhatikan kepentingan masyarakat serta tidak adanya keseimbangan antar aktor yang terlibat.

3. Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan terdiri dari Administrasi dan Pembangunan. Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Dunser dalam Hakim, 2016:37). Administrasi Pembangunan tidak lain adalah bagian dari administrasi publik yang ditujukan untuk mendukung proses pembangunan. Maka dari itu, kaidah kaidah administrasi publik berlaku pada administrasi pembangunan. Selanjutnya, administrasi pembangunan memberikan perhatian yang lebih luas daripada hanya membahas penyelenggaraan administrasi pemerintahan berupa memelihara keamanan, hukum dan ketertiban, mengumpulkan pajak atau memberikan pelayanan publik dan menyelenggarakan hubungan dengan negara lain.

Sifat dari Administrasi Pembangunan lebih dinamis dan inovatif karena menyangkut upaya mengandalkan perubahan-perubahan sosial, dalam upaya tersebut administrasi pembangunan sangat berkepentingan dan terlibat dalam pengerahan sumber daya dan pengalokasiannya untuk kegiatan pembangunan (Katz dalam Hakim, 2016: 63)

Administrasi Pembangunan dapat didefinisikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara (pemerintah) untuk

meralisir pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di berbagai aspek kehidupan bangsa (Tjokroamidjojo dalam Listyaningsih, 2014: 18). Siagian kemudian menyimpulkan bahwa terdapat tujuh ide pokok administrasi pembangunan, antara lain:

- a. Pembangunan merupakan suatu proses, berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu fihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*)
- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, sedang maupun jangka pendek
- d. Rencana Pembangunan mengandung makna, pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan itu dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk berkembang dan tidak sekedar mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan eksistensinya
- e. Pembangunan mengarah kepada modernitas, diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih daripada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan system budaya yang kuat tapi fleksibel
- f. Modernitas yang ingin dicapai dalam melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multidimensional, artinya modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat mengejewantah dalam bidang politik, ekonomi, social budaya, serta pertahanan keamanan.
- g. Melalui ke enam ide pokok di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya dii tengah-tengah negara lain (Siagian dalam Listyaningsih, 2014: 19)

Melalui 7 (tujuh) ide pokok tersebut, setidaknya ada kata kunci yang bisa ditemukan yakni proses, sadar, terencana, pertumbuhan dan perubahan, modernitas, multidimensional, menuju kukuh dan mantap keberadaan suatu negara. Dari berbagai pendapat di atas, Administrasi

Pembangunan dapat disimpulkan sebagai proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada sebuah negara secara sadar dan terencana untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Administrasi pembangunan memiliki dua fungsi, sebagai penyempurnaan administrasi publik dan penyempurnaan bagi penyelenggaraan proses pembangunan.

- a. *The Development of Administration* yaitu penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi negara yang meliputi:
 - 1) Penyempurnaan dan pendayagunaan organisasi bagi pembangunan (organisasi-organisasi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan)
 - 2) Pendayagunaan kepegawaian (pengadaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan)
 - 3) Pendayagunaan ketatalaksanaan (masalah organisasi dan tata laksana termasuk prosedur dan tata kerja)
- b. *The Administration of Development* yaitu perumusan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan serta pelaksanaannya secara efektif, meliputi:
 - 1) Administrasi Perencanaan dan pemograman pembangunan (misalnya kemampuan dan mekanisme analisa dan pembentukan kebijakan pembangunan, sistem perencanaan dan penganggaran)
 - 2) Administrasi Pembiayaan pembangunan (penyaluran biaya untuk berbagai macam kegiatan pembangunan yang berbeda-beda sifatnya)
 - 3) Administrasi program dan proyek pembangunan termasuk berbagai cara koordinasinya
 - 4) Sistem pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan (Tjokroamidjojo, 1985: 14-15)

Melalui dari kedua fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *The Development of Administration* membahas bagaimana mempersiapkan perangkat pembangunannya yang dimulai dari pendayagunaan organisasi, aparatur dan tata laksananya. Sedangkan *The Administration of*

Development membahas bagaimana pembangunan itu dilaksanakan meliputi perumusan kebijakan dan program-program pembangunan.

B. Pembangunan Daerah berbasis Potensi Lokal

1. Otonomi Daerah

Pengertian "otonom" secara bahasa adalah "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri" sedangkan "daerah" adalah suatu "wilayah" atau "lingkungan pemerintah", dengan demikian pengertian secara istilah otonomi daerah adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Hakekat otonomi daerah adalah wewenang, hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi daerah menurut Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 6 berbunyi, "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." Menurut Nugroho dan Suhadak (2007) dalam Rosyidah (2017: 16) ciri utama suatu daerah dikatakan mampu melaksanakan otonomi daerah didasarkan pada dua ciri utama. Ciri pertama ialah kemampuan daerah dalam menggali sumber, mengelola dan menggunakan keuangan dalam rangka menjalankan pemerintahan daerah. Ciri yang kedua ialah minimnya angka

ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat, konsekuensinya pendapatan asli daerah harus bisa menjadi sumber keuangan terbesar dan didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Apabila daerah telah berhasil memiliki kedua cirri tersebut maka dapat dikatakan pelaksanaan otonomi di daerahnya telah berhasil.

2. Pembangunan Daerah

Pengembangan Daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

- a. Segi pembangunan sektoral, yakni pencapaian sasaran pembangunan dilakukan melalui berbagai pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah sesuai dengan sektoral yang dimiliki oleh masing masing daerah.
- b. Segi pembangunann wilayah, yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah.
- c. Segi pemerintahnya, agar tujuan pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik maka pembangunan daerah perlu difungsikan dengan baik, karena pembangunan merupakan usaha-usaha untuk mengembangkan dan mempererat pemerintah daerah dalam rangka memantapkan otonomi.

Melalui pembangunan daerah tidak lain adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan kemampuan daerah dalam merencanakan dan mengelola daerah, meningkatkan koordinasi pembangunan antar sektor dan antar pembangunan daerah. Selain itu, pembangunan daerah diarahkan untuk mendorong perekonomian daerah. Tujuan dari pembangunan daerah adalah:

- a. Memanfaatkan potensi yang ada di daerah untuk pengembangan daerah yang bersangkutan
- b. Mengusahakan daerah-daerah yang relatif terbelakang dapat berkembang dengan laju yang lebih cepat dari daerah –daerah lainnya sehingga dapat mengurangi terjadinya kesenjangan yang mencolok dalam tingkat kemajuan antar daerah dan pemerataan pendapatan antar golongan masyarakat pada masing-masing daerah
- c. Mengusahakan agar peranan daerah-daerah yang relative terbelakang makin besar dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan nasional (Sipahutar dalam Kristiantina, 2013: 29)

3. Potensi Lokal

Potensi lokal dimaksudkan sebagai suatu kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Sumber daya meliputi sumber daya yang nyata seperti tanah, bangunan, tenaga kerja dan sumber daya yang tidak nyata seperti kemampuan, ketrampilan, keahlian dan moral (Sumihardjo, 2008: 12). Potensi lokal dapat diartikan sebagai ketersediaan sumber daya di daerah yang telah dan yang akan dikelola yang memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Undang undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 24 ayat 3). Dapat disimpulkan bahwa Potensi lokal merupakan sumber-sumber alam, sumber daya buatan dan pembangunan serta sumber daya manusia yang disebut kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi lokal umumnya meliputi:

- a. Potensi bidang pertanian, terdiri dari pertanian pangan, hortikultura, perhutanan, perikanan dan peternakan
- b. Kelautan, sumber hayati dan non hayati, seperti terumbu karang, ikan hias, pantai pasir putih, wisata kedalaman lautan (*diving*)

- c. Potensi bidang perindustrian dan perdagangan, terdiri dari perindustrian dan perdagangan usaha kecil dan menengah sub bidang jasa, konstruksi, transportasi dan pariwisata
- d. Potensi energy dan sumber daya mineral, seperti pembangkit listrik tenaga air
- e. Potensi transmigrasi, lebih kepada potensi kerjasama antar daerah dengan keahlian tertentu untuk kemajuan dua belah pihak.

4. Pembangunan Daerah berbasis Potensi Lokal

Melalui Undang undang No 23 Tahun 2014, Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangga daerah sendiri, termasuk dalam agenda pembangunan daerah. Pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pada dasarnya Pembangunan di daerah dapat dilakukan dengan menitikberatkan terhadap pembangunan pada sektor-sektor atau bidang-bidang tertentu. Perencanaan dapat diarahkan pada pemecahan masalah-masalah yang terjadi pada sektor-sektor yang menjadi *bottleneck* dalam pembangunan, ataupun untuk mengembangkan sektor-sektor yang merupakan *leader* dalam perekonomian daerah (Daryanto dan Hafizrianda dalam Kristiantina, 2013: 27). Sektor-sektor tersebut berkaitan erat dengan potensi lokal yang dimiliki setiap daerah. Bagaimana pada akhirnya pembangunan daerah adalah dengan menggabungkan semua kepentingan atas, bawah, sektoral ataupun bidang yang diakomodir dan diselaraskan dalam sebuah perencanaan yang sistematis dan dinamis yang bersifat simulasi dengan kendala tujuan target makro tetapi pelaksanaannya sesuai dengan tingkat bawah. Hasilnya menjadi perencanaan yang optimal antar

pusat, daerah dan sektor yang dianggap sebagai isu utama nasional atau daerah.

Pembangunan daerah melalui potensi lokal meliputi sektor pertanian, kelautan baik hayati dan non hayati, industri dan perdagangan (mencakup jasa, konstruksi, transportasi dan pariwisata, dan sebagainya), energi dan sumber daya mineral serta transmigrasi. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor-sektor dasar yang dimiliki di suatu daerah. Potensi tersebut dapat dilihat dari perolehan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada setiap daerah karena PDRB menggambarkan kondisi dan pendapatan yang diperoleh dari setiap potensi yang ada. Dari berbagai sektor tersebut, beberapa telah menjadi sektor unggulan yang dapat dikembangkan lagi sebagaimana linear dengan isu utama nasional dan memang sesuai dengan daerah. Contohnya di pariwisata. Pariwisata sekarang sudah menjadi industri yang dapat dikembangkan secara luas. Disamping itu potensi dari pariwisata merupakan sektor yang berperan sebagai *Multiplayer Effect*, sektor tersebut dapat menghidupkan sektor sektor yang lain.

C. Pengembangan Pariwisata

1. Definisi Pengembangan Pariwisata

Menurut Pendit (2006: 3), istilah pariwisata terlahir dari bahasa sansekerta yang komponen- komponennya terdiri dari pari, wis(man) dan ata. Pari berarti penuh, lengkap, berkeliling. Wis(man) memiliki arti

rumah, properti, kampung, komunitas. Ata berarti pergi terus menerus, mengembara (*roaming about*). Ketiga kata tersebut apabila dirangkai menjadi satu kata melahirkan istilah pariwisata, berarti: pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus menerus. Menurut Suwanto (2004: 3) Pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Seseorang yang melakukan suatu perjalanan wisata disebut dengan wisatawan (*tourist*). Pariwisata adalah istilah yang diberikan pada aktivitas yang terjadi bila seorang wisatawan melakukan perjalanan. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari perencanaan perjalanan itu sendiri, perjalanan ke tempat tertentu, tinggal di tempat itu, kembali, dan kenangan yang didapat sesudahnya (Mill, 2000: 25). Sedangkan menurut Undang – undang No 10 Tahun 2009, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pengembangan memiliki arti proses, cara, perbuatan mengembangkan: pembangunan secara bertahap dan teratur menuju ke sasaran yang dikehendaki, proses kegiatan bersama yang dilakukan oleh penghuni suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya (kbbi.web.id). Pengembangan pariwisata merupakan segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana prasarana, barang dan jasa, fasilitas yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan (Munasef dalam Hadiwijoyo, 2012: 57-58). Menurut

Made Sukarsa dalam Hadiwijoyo (2012: 47) Pengembangan kegiatan pariwisata di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) tipe pengembangan (berdasarkan pola, proses serta pengelolaannya) yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pariwisata tipe tertutup (*enclave*)

Tipe ini mempunyai karakteristik lokasinya terpisah dari masyarakat setempat dan tidak melibatkan masyarakat sekitarnya. Sehingga kontribusi untuk masyarakat setempat kurang.

b. Pariwisata tipe terbuka (*spontaneous*)

Tipe ini mempunyai spontan pada umumnya ditandai dengan adanya hubungan intensif antara wisatawan dengan masyarakat sekitarnya. Sehingga distribusi pendapatan yang diperoleh dari wisatawan dapat secara langsung dinikmati oleh penduduk local. hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat local terhadap pengembangan fasilitas obyek wisata setempat. dampak negative yang dimiliki akan cepat menjalar kedalam penduduk local sehingga sulit untuk diantisipasi.

Pengembangan pariwisata merupakan semua kegiatan dan terkoordinasi untuk menarik wisatawan termasuk dalam pengembangan sarana prasarana, fasilitas, aksesabilitas yang bertujuan untuk memberikan pelayanan wisata kepada wisatawan. Dalam pengembangan pariwisata melibatkan berbagai segi pengembangan, baik untuk masyarakat, pengunjung atau pengelola. Pada intinya pengembangan ditujukan untuk

meningkatkan dan memperbaiki yang sudah ada serta menambahkan yang belum ada pada suatu obyek sesuai guna mencapai nilai. Paling tidak kerangka pengembangan destinasi pariwisata paling tidak mencakup komponen-komponen utama sebagai berikut:

- a. Objek dan Daya Tarik (*Attractions*) yang mencakup: daya tarik yang berbasis utama pada kekayaan alam, budaya, maupun buatan/artificial, seperti event atau yang sering disebut sebagai minat khusus (*Special interest*)
- b. Aksesibilitas (*Accessibility*), yang mencakup dukungan sistem transportasi yang meliputi: rute atau jalur transportasi, fasilitas, terminal, bandara, pelabuhan dan moda transportasi yang lain.
- c. Amenitas (*Amenities*), yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata yang meliputi: akomodasi, rumah makan (*food and beverage*), retail, toko cinderamata, fasilitas penukaran uang, biro perjalanan, pusat informasi wisata, dan fasilitas kenyamanan yang lainnya.
- d. Fasilitas Pendukung (*Ancillary Service*) yaitu ketersediaan fasilitas pendukung yang digunakan oleh wisatawan, seperti bank, telekomunikasi, pos, rumah sakit dan sebagainya.
- e. Kelembagaan (*Institutions*), yaitu terkait dengan keberadaan dan peran masing-masing unsur dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata termasuk masyarakat setempat sebagai tuan rumah (*host*). (Sunaryo, 2013: 159-160)

Menurut Carter dan Febricius (UNWTO, 2007) dalam Sunaryo (2013: 172-175), berbagai elemen dasar yang harus diperhatikan dalam perencanaan pengembangan sebuah destinasi pariwisata, paling tidak akan mencakup beberapa aspek-aspek berikut:

- a. Pengembangan atraksi dan daya tarik wisata, Atraksi merupakan daya tarik yang akan melahirkan motivasi dan keinginan bagi wisatawan untuk mengunjungi destinasi tadi.
- b. Pengembangan amenities dan akomodasi wisata, pada hakekatnya amenities adalah merupakan fasilitas dasar seperti: utilitas, transportasi, akomodasi, pusat informasi pariwisata dan pusat perbelanjaan yang kesemuanya perlu disediakan untuk membuat wisatawan yang berkunjung ke destinasi merasa nyaman dan senang.

- c. Pengembangan aksesibilitas, yang dimaksud dengan aksesibilitas wisata dalam hal ini adalah segenap sarana yang memberikan kemudahan pada wisatawan untuk mencapai suatu destinasi maupun tujuan wisata terkait. Tidak hanya sekedar menyangkut kemudahan transportasi bagi wisatawan, akan tetapi juga waktu yang dibutuhkan, tanda penunjuk arah menuju lokasi dan perangkat lainnya.
- d. Pengembangan *Image* (Citra Wisata)
Pencitraan (*image building*) sebuah destinasi merupakan bagian dari *positioning*, yaitu kegiatan untuk membangun citra atau image dibenak pasar (wisatawan) melalui desain terpadu antara aspek: kualitas produk, komunikasi pemasaran, kebijakan harga, dan saluran pemasaran yang tepat dan konsisten dengan citra atau *image* yang ingin dibangun serta ekspresi yang tampak dari sebuah produk. Tujuannya *positioning* adalah untuk membantu wisatawan dalam rangka mengetahui perbedaan yang sebenarnya antara satu destinasi dengan pesaingnya.

Selain itu, menurut Prasiasa (2011: 101-103), pengembangan pariwisata dapat dilakukan meliputi:

- a. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

- 1) Pengembangan Organisasi Pariwisata

Keberadaan organisasi yang bergerak di bidang kepariwisataan pada kenyataannya dapat berada di tingkat masyarakat, swasta/industri atau bisnis, maupun di tingkat pemerintah dalam rangka untuk mempermudah pengelolaan dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan itu sendiri. Sedangkan kelembagaan mengacu pada keseluruhan regulasi yang mengatur tata kelola kepariwisataan, yang dapat terdiri dari peraturan (konstitusi, undang-undang, dan regulasi) dan pelaksanaannya (North dalam Sunaryo, 2013: 198). Berdasarkan

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 ruang lingkup organisasi kepariwisataan meliputi:

- a) Organisasi Pemerintah, unsur pelaksana Pemerintah, dipimpin oleh menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
- b) Organisasi Pemerintah Daerah, unsure pelaksana pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi.
- c) Organisasi Swasta/ Industri, merupakan orang atau sekelompok orang (pengusaha) yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- d) Organisasi Masyarakat, merupakan masyarakat yang mengorganisir dan bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut.

2) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Pada setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakkannya. Berkaitan dengan sumber daya manusia dalam pariwisata, McIntosh, et al., (1995) dalam Pitana (2009: 72),

memberikan gambaran atas berbagai peluang karir dalam industri pariwisata yang memanfaatkan dan digerakkan oleh sumber daya manusia, seperti di bidang transportasi, akomodasi pelayanan makanan dan minuman, shopping, travel dan sebagainya. Pengembangan SDM Pariwisata dalam hal ini adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk social yang *adaptif* dan *transformative* yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan di bidang kepariwisataan (Sunaryo, 2013: 200). Berdasarkan pada Undang undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, SDM Pariwisata pada intinya dapat digolongkan berdasarkan institusinya, sebagai berikut

- a) Institusi Pemerintah
 - b) Institusi Swasta/Industri
 - c) Masyarakat
- 3) Pengembangan melalui Investasi dan Permodalan

Investasi pada sektor pariwisata merupakan investasi yang dilakukan dibidang pariwisata untuk mendukung pengembangan pariwisata terutama dalam memfasilitasi sarana prasaran pariwisata dan juga destinasi wisata (Nurhayati, 2014: 12). Sumber daya modal memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Investasi yang meningkat baik di sektor produksi bahan mentah maupun proses nilai tambah akan mendorong produksi nasional (GDP), selain itu akan mendorong kesempatan kerja yang lebih luas yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akumulasi modal juga akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah.

4) Pengembangan sarana dan prasarana

Prasarana (*infrastructure*) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya (Yoeti, 1996: 186). Dalam buku *International Tourism*, Lothar A. Kreck membagi prasarana menjadi dua bagian penting. Kedua prasarana yang dimaksud adalah:

1) Prasarana Perekonomian

Prasarana perekonomian dibagi atas:

a) Pengangkutan (*Transportation*)

Maksudnya adalah pengangkutan yang dapat membawa para wisatawan dari tempat biasanya ia tinggal, ke tempat yang merupakan daerah tujuan wisata. Prasarana Pengangkutan merupakan prasarana yang sangat penting

karena sebagai akses utama bagi orang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain.

b) Prasarana Komunikasi (*Communication Infrastructure*)

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah telepon, telegraf, radio dan tv, surat kabar, dan pelayanan kantor pos. Melalui ketersediaan prasarana komunikasi akan dapat mendorong wisatawan melakukan perjalanan jarak jauh. Sehingga wisatawan tidak akan ragu-ragu meninggalkan rumah dan anak-anaknya, karena ketersediaan prasarana komunikasi di tempat yang dikunjungi. Wisatawan memperhatikan komunikasi karena ada dua hal, yakni untuk memberitahu sanak keluarga apabila tiba-tiba sakit atau mendapat kecelakaan dalam perjalanan dan selanjutnya untuk menunjukkan kepuasan pribadi dengan mengabarkan kepada saudara atau teman untuk memberitahukan dimana ia berada sekarang.

c) Kelompok yang termasuk "*utilities*"

Maksudnya adalah segala kebutuhan yang berkaitan dengan penerangan, persediaan air minum, irigasi dan system energy. Dimana dalam pengembangan industry pariwisata, faktor *utilities* sangat menentukan. Tidak hanya dalam pembangunan perhotelan tetapi berbagai tempat rekreasi membutuhkannya.

d) Sistem Perbankan

Melalui adanya pelayanan bank bagi wisatawan berarti bahwa wisatawan mendapat jaminan untuk dengan mudah menerima atau mengirim uangnya.

2) Prasarana Sosial

Prasarana Sosial adalah semua factor yang menunjang kemajuan atau menjamin kelangsungan prasarana perekonomian yang ada. yang termasuk dalam kelompok ini adalah:

a) Sistem Pendidikan (*School System*)

Adanya lembaga-lembaga pendidikan yang mengkususkan diri dalam pendidikan kepariwisataan sebagai usaha untuk meningkatkan pelayanan kepariwisataan. Memlihara dan mengawasi suatu badan usaha yang bergerak di bidang kepariwisataan.

b) Pelayanan Kesehatan (*Health Service Facilities*)

Tidak ada seorang wisatawan yang mau ketika berwisata kemudian jatuh sakit, akan tetapi sakit atau tidak merupakan sesuatu yang tidak dapat ditentukan manusia. Maka dari itu, harus ada jaminan bahwa di daerah tujuan wisata tersedia pelayanan bagi suatu penyakit yang akan mungkin diderita dalam perjalanan.

c) Faktor Keamanan(*Safety*)

Perasaan tidak aman (*feeling unsafe*) dapat terjadi di suatu tempat yang baru saja dikunjungi. Misal, sering terjadinya aksi pencopetan, penjambretan dan bahkan penodongan dengan tujuan merampok baik dalam perjalanan atau di tempat yang sedang dikunjungi. Sehingga petugas keamanan dapat bersiap siaga agar kejadian seperti itu tidak perlu terjadi sehingga menimbulkan kesan atau *image* yang buruk pada destinasi wisata tersebut.

d) Petugas yang langsung melayani wisatawan (*government apparatus*) merupakan petugas-petugas yang berkaitan langsung dengan pelayanan para wisatawan.

Sarana Kepariwisata adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak tergantung kedatangan wisatawan (Yoeti, 1996: 197). Sarana Kepariwisata dapat dibagi menjadi tiga bagian yang penting:

1) Sarana Pokok Kepariwisata

Merupakan perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata. Misalnya seperti:

- a) *Travel Agent* dan *Tour Operator*
- b) Perusahaan angkutan Wisata
- c) Hotel dan jenis akomodasi lainnya

- d) Bar dan Restoran
- e) Obyek Wisata dan Atraksi Wisata

2) Sarana Pelengkap Kepariwisataaan

Merupakan perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana kepariwisataan, tetapi yang terpenting adalah membuat para wisatawan untuk lebih lama tinggal di tempat tujuan wisata. Misalnya sarana olahraga dan sarana ketangkasan.

3) Sarana Penunjang Kepariwisataaan

Merupakan perusahaan yang bertujuan untuk mem buat wisatawan lebih banyak mengeluarkan atau membelenjakan uangnya di tempat yang dikunjunginya. Misalnya *Night Clubs, Steambaths, Casinos*

5) Meningkatkan Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Promosi merupakan bagian dari proses pemasaran yang termasuk salah satu aspek dalam bauran pemasaran (*marketing mix*). Bauran pemasaran pada dasarnya merupakan koordinasi interaksi dari empat komponen, yang sering disebut dengan 4P, yaitu produk (*product*), harga (*price*), lokasi distribusi (*place*), dan promosi (*promotion*). Aktivitas Promosi kepariwisataan sebagai kegiatan komunikasi, yang dilakukan oleh organisasi penyelenggara pariwisata (destinasi) yang berusaha mempengaruhi khalayak pasar atau wisatawan yang merupakan tumpuan atau sasaran dari penjualan produk wisatanya.

6) Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat dapat terlibat pada penyelenggaraan pariwisata terutama pada pengembangan pariwisata dilihat dari beberapa tahap. Tahap pertama dan selanjutnya memiliki keterkaitan. Beberapa tahapan meliputi:

1) Tahap Persiapan

Partisipasi masyarakat pada tahap ini adalah dengan mengikuti sosialisasi yang diadakan untuk menyongsong kehadiran pengembangan destinasi tujuan wisata terkait.

2) Tahap Perencanaan

Pada tahap ini terdiri atas identifikasi kebutuhan dan analisis kemampuan. Partisipasi masyarakat bersifat fungsional, artinya masyarakat setempat berpartisipasi terhadap apa yang sudah ditetapkan tenaga ahli yang telah diberikan kepercayaan terhadap pengembangan destinasi wisata

3) Tahap Operasional

Partisipasi berbentuk fisik dan nonfisik. partisipasi fisik dapat diwujudkan dengan kesadaran masyarakat setempat untuk membangun fasilitas fisik guna menunjang pengembangan pariwisata di sekitar tempat tinggalnya dan menyediakan sumber-sumber seperti bangunan tradisional dan lain lain. kemudian partisipasi nonfisik diwujudkan oleh masyarakat melalui dengan penuh kesadaran mereka mempelajari bahasa asing tertentu dan melakukan partisipasi interaktif dengan

mengirimkan orang-orang pemuda setempat untuk mempelajari perhotelan dan pariwisata pada pendidikan lembaga formal

4) Tahap Pengembangan

Partisipasi masyarakat bersifat spontan pada tahap ini, masyarakat dapat mendirikan dan mengelola usaha-usaha yang terkait dengan kepariwisataan, seperti pengelolaan usaha penginapan, usaha cuci pakaian, usaha kerajinan, usaha warung makan dan minum, serta usaha yang menjual kebutuhan sehari-hari.

5) Tahap Pengawasan

Partisipasi masyarakat lebih kepada pengawasan yang bersifat praktis dan preventif untuk mencegah agar tempat destinasi wisata sebagai daya tarik wisata tidak tercemar oleh tindakan-tindakan negatif. Secara umum partisipasi masyarakat pada tahap ini bersifat manipulatif. Karena partisipasi masyarakat merupakan akibat dari program-program yang dibuat untuk mendukung pengembangan wisata.

2. Jenis dan Macam Pariwisata

Melalui potensi yang dimiliki atau warisan yang ditinggalkan nenek moyang pada suatu negara maka akan menimbulkan berbagai jenis dan macam pariwisata yang dapat dikembangkan sebagai kegiatan dan kelama-lamaan akan memiliki ciri tersendiri (Yoeti, 1996: 119). Hingga sekarang jenis dan macam pariwisata yang kita kenal menurut Yoeti, (1996: 120-124) diantaranya ialah:

a. Menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata berkembang:

1) Pariwisata Lokal (*Local Tourism*)

Maksudnya adalah pariwisata setempat yang mempunyai ruang lingkup relative sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya kepariwisataan Kota Bandung, Kota kepariwisataan Jogja

2) Pariwisata Regional (*Regional Tourism*)

Kepariwisataan yang berkembang di suatu tempat atau daerah yang ruang lingkupnya lebih luas bila dibandingkan dengan local tourism, tetapi lebih sempit jika dibandingkan dengan kepariwisataan nasional. Misalnya Kepariwisataan Sumatera Utara, Bali dan lain-lain

3) Kepariwisataan Nasional (*National Tourism*)

a) Kepariwisataan dalam arti sempit

Kegiatan yang berkembang dalam wilayah suatu negara. Sama halnya dengan pariwisata domestik. Titik beratnya adalah orang yang melakukan pariwisata adalah warga negara sendiri

b) Kepariwisataan dalam arti luas

Yakni kepariwisataan yang berkembang dalam suatu wilayah dalam suatu negara, selain menerapkan kegiatan pariwisata *domestic* juga dikembangkan *foreign tourism* dimana di dalamnya termasuk “*in bound tourism*” dan “*out going tourism*”. Maksudnya adalah selain ada lalu lintas dari

pengunjung dalam negeri tetapi juga ada pengunjung luar negeri, maupun dalam negeri ke luar negeri.

4) *Regional-International Tourism*

Kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. Misalnya kepariwisataan ASEAN, Timur Tengah, Asia Selatan dll

5) *International Tourism*

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di seluruh negara di dunia termasuk di dalamnya, selain “*Regional-International Tourism*” juga kegiatan “*national tourism*”

b. Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran

1) Pariwisata aktif

Kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu. Disebut sebagai pariwisata aktif karena dengan masuknya wisatawan asing tersebut berarti dapat memasukkan devisa bagi negara yang dikunjungi yang dengan sendirinya akan memperkuat posisi neraca pembayaran yang dikunjungi wisatawan tersebut. Bila ditinjau dari segi pemasukan devisa maka jenis pariwisata ini harus mendapatkan perhatian pertama untuk dikembangkan karena sifatnya yang *quick yielding*

2) Pariwisata pasif

Kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri yang berpergian ke luar negeri sebagai wisatawan. Disebut dengan pariwisata pasif karena ditinjau dari segi pemasukan devisa negara, kegiatan ini merugikan negara asal wisatawan, karena uang yang seharusnya dibelanjakan dalam negeri dibawa ke luar negeri dan tidak ada arti ekonominya bagi negara sendiri.

c. Menurut alasan/ tujuan perjalanan

1) *Business Tourism*

Jenis pariwisata dimana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang atau yang berhubungan dengan pekerjaannya, kongres, seminar, *convention*, *symposium*, musyawarah kerja. Pada umumnya orang yang melakukan wisata tidak jauh dari pekerjaan kesehariannya dengan menyelipkan beberapa agenda wisata tapi masih dalam lingkup pekerjaan.

2) *Vocational Tourism*

Jenis pariwisata dimana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata memiliki tujuan berupa sedang berlibur, cuti atau pakansi dalam jangka waktu tertentu yang waktunya disengaja.

3) *Educational Tourism*

Jenis pariwisata dimana pengunjung atau orang-orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan studi atau mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan, termasuk kedalamnya dharmawisata.

d. Menurut saat atau waktu berkunjung

1) *Seasonal Tourism*

Jenis Pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim musim tertentu. Termasuk dalam kelompok ini adalah *Summer Tourism* atau *Winter Tourism*, yang biasanya ditandai dengan kegiatan olahraga

2) *Occasional Tourism*

Jenis pariwisata dimana perjalanan wisatanya dihubungkan dengan kejadian maupun suatu *event* seperti misalnya Galungan di Bali, Sekaten di Jogja dll

e. Pembagian menurut Obyeknya

1) *Cultural Tourism*

Jenis pariwisata, dimana motivasi orang-rang yang melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik seni budaya suatu tempat atau daerah. Jadi obyek kunjungannya adalah warisan nenek moyang benda-benda kuno. Sering perjalanan pariwisata seperti ini dengan kesempatan untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan kebudayaan itu sendiri di tempat yang dikunjungi.

2) *Recuperational Tourism*

Biasanya disebut dengan pariwisata kesehatan. Tujuan daripada orang-orang untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan suatu penyakit, misalnya seperti mandi di sumber air panas

3) *Commercial Tourism*

Disebut sebagai pariwisata perdagangan karena perjalanan wisata ini dikaitkan dengan perdagangan nasional atau internasional dimana sering diadakan expo

4) *Sport Tourism*

Biasanya dikenal dengan Pariwisata Olahraga, yang dimaksud dengan jenis pariwisata ini adalah perjalanan orang-orang yang bertujuan untuk melihat atau menyaksikan pesta olahraga di suatu tempat atau negara tertentu, misalnya olimpiade, sepak bola dll

5) *Political Tourism*

Suatu perjalanan yang tujuannya melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara seperti pada peringatan hari tertentu

6) *Social Tourism*

Jenis pariwisata ini hanya dilihat dari segi penyelenggaraannya saja yang tidak menekankan untuk mencari keuntungan, seperti misalnya Study tour, Picnic dan semacamnya

7) Religion Tourism

Jenis pariwisata dimana tujuan perjalanan yang dilakukan adalah untuk melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan seperti kunjungan ke Lourdes bagi orang yang beragama Katolik dan sebagainya (Yoeti, 1996: 120-124)

3. Dimensi Wisata

Selama wisatawan mengunjungi destinasi wisata, mereka memerlukan pelayanan akomodasi dan transportasi untuk menjeleajahi tempat wisata tersebut, makanan souvenir, dan sesuatu yang akan dilakukan dan yang akan dilihatnya. Menurut UN-WTO dalam Pitana (2009: 128), produk (pariwisata) didefinisikan sebagai “....any good or service purchased by, or consumed by, a person defined as a visitor”.... baik barang atau jasa yang dibeli oleh, atau dikonsumsi oleh, seseorang yang didefinisikan sebagai pengunjung. Sedangkan pelayanan atau service didefinisikan sebagai:

“....any activity or benefit one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product”. Ada aktivitas atau keuntungan yang bisa ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang intangible dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Produksinya mungkin atau mungkin tidak terkait dengan produk fisik. (Ricardson dan Fluker dalam Pitana, 2009: 128).

Dengan demikian, pelayanan bersifat tidak terlihat (*intangible*) dan didapat bukan berdasarkan kepemilikan atas sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin berhubungan dengan suatu produk tertentu. Ada empat dimensi pariwisata menurut Mill (2000: 26-33) yakni:

a. Atraksi

Atraksi menarik orang untuk datang ke sebuah kawasan tujuan wisata. Sebagai agen penyebab pertumbuhan, bisa jadi atraksi adalah apa yang pertama menarik pengunjung ke sebuah kawasan atau, dalam artian pembangunan, cenderung dikembangkan lebih dahulu. Atraksi bisa jadi sebuah tempat tujuan primer ataupun sekunder. Primer berarti tempat ini cukup atraktif untuk menjadi motivasi primer bagi sebuah kunjungan. Sekunder berarti sebuah tempat yang menarik atau perlu dikunjungi. Atraksi bisa berdasarkan sumber-sumber alam, budaya, etnitas atau hiburan.

- 1) *Sumber-sumber Alam*, Setiap kawasan yang memiliki derajat tertentu sumber-sumber alam, yang berbentuk cirri fisik alam, iklim dan keindahan alam kawasan itu sendiri.
- 2) *Budaya*, Budaya sebuah kawasan adalah cara hidup masyarakatnya. Hal tersebut ditunjukkan seperti tempat bersejarah, agama, cara orang hidup, cara mereka diperintah, dan tradisi-tradisi mereka baik di masa lampau ataupun masa sekarang.
- 3) *Etnitas*. Tujuan melakukan wisata adalah untuk mengunjungi teman-teman atau kerabat mereka selain itu untuk memperbarui ikatan kekeluargaan mereka.
- 4) *Hiburan*. Wisatawan tertarik pada sebuah tempat karena hiburan yang disediakan tempat itu. Hiburan bisa menjadi ciri permanen

tempat tujuan wisata tersebut seperti taman hiburan atau kebun binatang.

b. Fasilitas-fasilitas

Jika atraksi membuat orang-orang mendatangi tempat tujuan wisata; fasilitas yang tersedia melayani mereka selama berada di sana. Karena mereka jauh dari rumah, para pengunjung membutuhkan barang-barang tertentu, tempat tinggal, sesuatu untuk dimakan dan diminum. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan pada fasilitas pariwisata yakni, tempat menginap, makanan dan minuman, layanan pendukung, dan infrastruktur.

c. Transportasi

Basis dari Pariwisata adalah ingin melakukan perjalanan ke tempat yang berbeda dari tempat yang biasa ditempatinya, budaya yang berbeda, iklim yang berbeda, pemandangan yang berbeda. Tempat-tempat yang berbeda secara fisik saling menggerakkan antara satu sama lain. Sehingga memerlukan perjalanan untuk menuju kesana. dan juga karena itu, perlu dan penting adanya transportasi untuk sampai kesana.

Ada hubungan yang penting antara pariwisata dan transportasi. Peningkatan fasilitas pariwisata merangsang perkembangan pariwisata itu sendiri, sementara itu ekspansi pariwisata meningkatkan kebutuhan akan transportasi yang lebih baik. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam transportasi adalah Kondisi Perjalanan dan Menghemat Waktu.

d. Keramahtamahan

Keramahtamahan sebuah kawasan adalah perasaan disambut baik yang diterima oleh wisatawan pada waktu mengunjungi sebuah kawasan. Orang tidak ingin pergi ke suatu tempat yang tidak menyambut mereka dengan baik. Apa yang dipikirkan oleh orang-orang setelah melakukan perjalanan adalah bukan cuaca atau pemandangan alamnya. Sangat sering yang mereka pikirkan adalah orang-orang – interaksi positif atau negatif dengan wisatawan yang lain, dengan penduduk setempat di tempat tujuan wisata, atau dengan karyawan restoran, hotel atau toko-toko. Tempat tujuan dapat mendorong munculnya perasaan tentang keramahtamahan ini dengan banyak cara. Pertama, dengan menginformasikan kepada masyarakat sekitar apa yang dapat dilakukan dengan pariwisata dan apa yang sedang dilakukan oleh pariwisata pada kawasan itu.

4. Tujuan Pengembangan Pariwisata

Apabila pariwisata dikembangkan secara tepat maka akan dapat memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Menurut Hadiwijoyo (2012: 49-51) Pembangunan pariwisata pada dasarnya ditujukan untuk:

a. Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pariwisata mampu memberikan perasaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh negeri. dengan banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan timbul rasa persaudaraan dan pengertian terhadap system dan filosofi

kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

b. Penghapusan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*)

Pembangun pariwisata seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil yang besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

c. Pembangunan Berkesinambungan (*Sustainable Development*)

Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah tamahan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Bahkan berdasarkan berbagai contoh pengelolaan kepariwisataan yang baik, kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi wisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan kepariwisataan di daerahnya.

d. Pelestarian Budaya (*Culture Preservation*)

Pembangunan kepariwisataan seharusnya mampu kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan di berbagai daerah.

e. Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Asasi Manusia

Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak asasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema *paid holidays*.

f. Peningkatan Ekonomi dan Industri

Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan pada industry local untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari

hal tersebut di atas adalah kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dunia dengan menggunakan bahan dan produk local yang berkualitas.

g. Pengembangan Teknologi

Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan pada suatu destinasi wisata, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi wisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya. dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pendapat tersebut sejalan dengan undang-undang Nomor 10 tahun

2009 Pasal 4 tentang Kepariwisataan, tujuan dari kepariwisataan adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan bangsa

5. Konsep Kawasan Wisata

Untuk menjadikan suatu kawasan wisata menjadi obyek yang berhasil haruslah memperhatikan factor sebagai berikut:

- a. Faktor kelangkaan, yakni sifat objek/atraksi wisata yang tidak dapat dijumpai di tempat lain
- b. Faktor kealamiahan, yakni sifat dari objek/atraksi wisata yang belum tersentuh oleh perubahan akibat perilaku manusia

- c. Faktor keunikan, yakni sifat obyek/atraksi wisata yang memiliki keunggulan komparatif dibandingkan obyek lain
- d. Faktor pemberdayaan masyarakat, factor ini menghimbau agar masyarakat local benar-benar dilibatkan dan diberdayakan dalam perneccanaan dan pengembangan obyek wisata yang ada di daerahnya.
- e. Faktor Optimalisasi lahan, maksudnya adalah lahan yang dipakai sebagai kawasan wisata dipergunakan berdasarkan pertimbangan optimalisasi sesuai dengan mekanisme pasar
- f. Faktor Pemerataan, harus diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung khususnya bagi masyarakat disekitar kawasan wisata serta memberikan kesempatan yang sama kepada individu sehingga tercipta hubungan yang harmoni dan sinergis antara masyarakat setempat dengan pengelola kawasan wisata (Hadiwijoyo, 2012: 62)

6. Pengembangan Kawasan Wisata

Perencanaan pengembangan suatu kawasan wisata memerlukan beberapa tahapan, adapun beberapa tahapan yang dapat dilalui menurut Syamsu dkk (2001) meliputi:

1) Marketing Research

Pengembangan suatu kawasan wisata pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat profit atau mencari keuntungan. Hal ini berarti pengembangan pariwisata tidak dapat lepas dari aspek ekonomi atau dengan kata lain tidak dapat lepas dari aspek ekonomi atau dengan kata

lain tidak dapat lepas dari aspek peningkatan pendapatan, baik pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat setempat sebagai dampak dari adanya lokasi wisata di daerah atau wilayah tersebut. Sehingga, dengan demikian maka dalam perencanaan suatu kawasan wisata diperlukan *marketing research* untuk mengetahui bentuk wisata apa yang sebenarnya menjadi keinginan konsumen atau keinginan pasar.

2) *Situational Analysis*

Pada perencanaan pariwisata, harus didasarkan pada penelitian atau kajian/analisis atas factor geografinya, tidak hanya pada administrasinya saja. selain itu dapat pula diperhatikan dari factor lingkungan social, ekonomi serta factor ekologi. sehingga perencanaan pariwisata dapat bersifat integrative karena mempertimbangkan hasil analisis situasi dari berbagai aspek.

3) *Marketing Target*

Pemasaran merupakan salah satu proses manajemen yang digunakan oleh organisasi pariwisata untuk mengidentifikasi target wisatawan atau wisatawan yang mereka pilih, baik yang actual atau potensial dan menjalin komunikasi dengan mereka untuk menentukan dan mempengaruhi kebutuhan, motivasi, kesenangan pada tingkat local, regional, nasional untuk merumuskan serta mengalokasikan produk pariwisata yang sesuai dengan situasi dengan

maksud dapat mencapai kepuasan wisatawan dan mencapai sasaran yang diinginkan.

4) *Tourism Promotion*

Pemasaran seringkali menggunakan promosi dan publikasi dengan tujuan agar keberadaan suatu obyek wisata dapat diketahui oleh wisatawan atau calon wisatawan. Promosi adalah penyesuaian antara produk pariwisata dengan permintaan wisata. Sedangkan publikasi adalah usaha menciptakan permintaan dengan cara permintaan atau mempengaruhi permintaan dengan menonjolkan kesesuaian produk wisata dengan permintaan.

5) *Pemberdayaan Masyarakat Setempat*

Pembangunan kawasan wisata pada hakekatnya tidak dapat melepaskan diri atau meninggalkan keberadaan warga setempat. Karena keberadaan obyek wisata sebenarnya tidak semata-mata hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah, namun juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan atau meningkatkan kehidupan social ekonomi warga sekitar. Selain itu, pembangunan pariwisata seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk berusaha dan bekerja. Dimana pada tujuan wisatawan datang ke destinasi wisata adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kesejahteraan masyarakat sekitar.

Selain itu pokok yang terpenting dalam pemberdayaan masyarakat setempat karena pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat utama

dalam mengimplementasikan desentralisasi dan otonomi daerah dimana pembangunan mulai tahap perencanaan hingga pengawasan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat mendorong proses demokratisasi berjalan dengan lancar dengan prinsip dasar partisipasi, kontrol, transparansi dan akuntabilitas.

D. *Good Tourism Governance*

Antusiasme dari berbagai pihak untuk mempraktekan demokrasi melakukan reformasi ke berbagai bidang, telah mempengaruhi dinamika yang menjadi pemicu perubahan. Inti dari reformasi adalah bagaimana mengelola suatu proses perubahan. Tidak terlepas pada sektor Pariwisata. Sektor merupakan potensi daerah yang dapat menjadi sebuah industri. Ketika industri dimaknai sebagai sebuah rangkaian proses aktivitas atau kegiatan produksi yang menghasilkan nilai tambah (*value added*), dan produknya bisa bersifat tidak konkrit atau kasat mata (*intangible*), jelas jawabnya: Kepariwisata adalah sebuah industri. Sejarah pembangunan di berbagai negara, sektor kepariwisataan telah terbukti berperan penting dalam menyumbang perekonomian. Sehingga dalam penyelenggaraan kepariwisataan mengalami pergeseran paradigma.

Dalam penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik, yang paling dibutuhkan dari sektor publik adalah perubahan baik dalam cara berfikir dan bertindak, terutama dalam meninggalkan paradigma lama yang berupa suatu bangunan penyelenggaraan pemerintahan yang

sentralistik dan berwawasan lokus tunggal yang berupa birokrasi pemerintahan (*government bureaucracy*) untuk menuju paradigma baru yang berupa model penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik dan berlokus jamak. Hingga muncullah dimensi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tata kelola yang baik (*good governance*) dimana, dimaksudkan untuk mengacu pada pemahaman: bukan hanya yang dilakukan pemerintah harus baik, akan tetapi keseluruhan stakeholders atau para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan urusan yang terkait dengan masalah dan kepentingan publik harus juga memiliki kapasitas yang baik atau memadai. Hal tersebut pun sampai pada penyelenggaraan kepariwisataan. Bagaimana menginternalisasi prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan kepariwisataan. *Good tourism governance* merupakan salah satu fenomena sektor, yakni sektor pariwisata yang mengadopsi *good governance*. Komponen yang membedakan berupa prinsip-prinsip, aktor/ *stakeholder*, peran aktor/*stakeholder*.

1. Definisi *good tourism governance*

Good tourism governance sebagai perpaduan antara *good governance* dan industri pariwisata. Menurut Sunaryo (2013: 77) prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik ini pada intinya adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak Pemerintah,

swasta/ industry pariwisata, dan masyarakat setempat yang terkait. *Good governance* merupakan arah baru administrasi publik yang dalam dekade sekarang cenderung mengedepankan konsep tersebut dalam mengelola berbagai kepentingan dan urusan publik melalui berbagai keputusan publik dengan melibatkan lebih banyak petaruh diluar aktor pemerintah. Sebagaimana diungkapkan oleh Utoyo S (2017) bahwa Transformasi yang cukup signifikan dalam perkembangan administrasi publik adalah adanya kebutuhan untuk melakukan redefinisi pola hubungan antara pemerintah; masyarakat; dan sektor swasta. Sehingga melalui penyelenggaraan *good governance* dapat dilihat tidak ada yang dominan untuk menentukan arah gerak aktor lain.

2. Prinsip-prinsip pada *good tourism governance*

Adapun beberapa prinsip yang mudah dikenali dalam penyelenggaraan yang berbasis *good tourism governance* menurut Sunaryo (2013) prinsip-prinsip tersebut berupa:

Tabel 2.1 Prinsip-prinsip *good tourism governance* (Sunaryo, 2013: 78-81)

Prinsip-prinsip	Deskripsi
Partisipasi masyarakat terkait	Masyarakat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan kemudian masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikan program-program yang sudah disusun sebelumnya.
Keterlibatan segenap pemangku terkait	Para pelaku dan pemangku kepentingan yang harus terlibat secara aktif dan produktif dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Lanjutan Tabel 2.1

Prinsip-prinsip	Deskripsi
Kemitraan kepemilikan lokal	Pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan kesempatan lapangan usaha yang luas untuk masyarakat setempat.
Pemanfaatan sumber daya secara berlanjut	Pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan penggunaan sumber daya yang ada.
Mengakomodasikan aspirasi masyarakat	Aspirasi dan tujuan masyarakat harus diperhatikan guna mewujudkan hubungan yang harmonis antara pengunjung/ wisatawan dengan masyarakat sekitar.
Daya dukung lingkungan	Daya dukung lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang harus dipertimbangkan dan dijadikan pertimbangan utama dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan meliputi daya dukung fisik, biotic, social-ekonomi dan budaya.
Monitor dan evaluasi program	Kegiatan monitor dan evaluasi dalam program pembangunan kepariwisataan yang berlanjut mencakup mulai dari kegiatan penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasanya untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan.
Akuntabilitas lingkungan	Perencanaan pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan komponen-komponen lingkungan yang saling berkaitan.
Pelatihan pada masyarakat terkait	Pelatihan pada masyarakat diperlukan guna mengimplementasikan program-program yang sudah dibuat.
Promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan	Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut juga membutuhkan program-program promosi dan advokasi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap dan identitas budaya masyarakat setempat secara baik.

Selebihnya, ditujukan pada konsepsi dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dimana para pemangku kepentingan juga harus memiliki sembilan butir sifat atau wawasan (visi) menurut Sunaryo (2013) sebagai berikut:

1. Partisipatif; dalam arti semua anggota/ warga masyarakat mampu memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan, baik langsung

ataupun melalui lembaga perantara yang diakui mewakili kepentingannya. Partisipasi yang luas dibangun atas kebebasan berorganisasi dan penyampaian pendapat secara konstruktif

2. Penegakan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan; dalam arti hukum harus ditegakkan atas dasar keadilan tanpa memandang golongan dan perbedaan apapun
3. Transparansi; dalam arti adanya aliran informasi yang bebas, serta adanya kelembagaan dan informasi yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Disamping itu, informasi harus cukup tersedia untuk dimengerti dan dipantau oleh semua pihak yang berkepentingan
4. Daya tanggap (*responsiveness*), dalam arti adanya kemampuan kelembagaan dari pemerintah untuk memproses dan melayani keluhan dan pendapat semua anggota masyarakat.
5. Orientasi pada consensus; di sini pemerintahan yang baik dituntut harus dapat menjembatani perbedaan kepentingan antarwarga masyarakat untuk mencapai consensus yang luas dan mampu mengakomodasi kepentingan kelompok serta mencari kemungkinan dalam penentuan kebijakan dan prosedur yang dapat diterima.
6. Bersikap adil; dalam arti harus diupayakan bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan memelihara kesejahteraannya.

7. Efektivitas dan Efisiensi; di sini berarti setiap kinerja kelembagaan yang ada dan prosesnya harus mampu membuahkan hasil yang dapat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana (*best use*)
8. Akuntabilitas dan pertanggungjawaban; harus selalu diupayakan bahwa pengambilan keputusan pada institusi pemerintah, sektor swasta, dan organisasi kemasyarakatan bisa dipertanggungjawabkan kepada public dan segenap stakeholders. Kadar dan takaran akuntabilitas ini memang berbeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain serta tergantung juga pada apakah kebijakan itu diambil untuk kebijakan internal atau eksternal.
9. Visi Strategik; disini berarti bahwa pemimpin dan public harus sama sama memiliki perspektif yang luas dan jangkauan jauh ke depan tentang pemerintahan yang baik, pengembangan manusia dan kebersamaan serta mempunyai kepekaan atas apa yang diperlukan untuk pembangunan dan perkembangan bersama.

Visi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan diimbangi kolaborasi sinergis antar para *stakeholders* dalam penyelenggaraan pengembangan kepariwisataan dalam suatu kawasan wisata dapat digambarkan dalam model bagan alir (*flow chart*) berikut;

Gambar 2.1 Model Ilustrasi *Good Tourism Governance*



Sumber: Sunaryo (2013: 84)

3. Aktor/ stakeholder dan peranannya

Seperti yang pernah dikemukakan oleh Mahathir dan Ishihara (1995) dalam Sunaryo (2013: 82), pengalaman telah menunjukkan bahwa dalam rangka mewujudkan *good governance* dalam pariwisata, ternyata sangat memerlukan terciptanya kondisi ideal dari ketiga pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai berikut:

- Pihak Pemerintah harus mempunyai kemampuan untuk memwadhahi proses politik atau pengambilan keputusan mengenai norma dan kebijakan yang selanjutnya bisa diimplementasikan dalam bentuk regulasi dalam proses birokrasi pemerintahan.
- Pihak Industri atau usaha swasta harus mempunyai kemampuan untuk selalu meningkatkan persediaan modal, membuka kegiatan

baru, dan menawarkan kesempatan berusaha baru untuk masyarakat luas.

- c) Sedangkan fihak masyarakat madani (*civil society*) harus mempunyai kemampuan mandiri untuk membangun norma positif, merumuskan permasalahan, mengartikulasikan permasalahan dan kepentingan masyarakat luas, dan mampu melakukan pengawasan terhadap kedua mitranya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Kegiatan penelitian dilakukan dengan ciri keilmuan yakni rasional, empiris dan sistematis. Kemudian hasil penelitian tersebut dapat dipakai untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan pondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek pembangunan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, *factual* dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 2014: 43).

Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah. Metode penelitian kualitatif dilandasi oleh filsafat postpositivisme yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Penelitian ini menekankan

pada makna, makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2004: 6). Sehingga, dengan demikian melalui pendekatan kualitatif ini peneliti akan lebih dekat dengan objek penelitian.

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bodgan dalam Moleong, 2004: 3). Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengobservasi dan kemudian menginterpretasikan hasil dari membaca dan observasi tersebut dalam rangkaian kata-kata ke dalam bentuk tulisan yang sistematis. Peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara faktual dan akurat mengenai fenomena dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali dalam Perspektif *Good Tourism Governance*.

B. Fokus Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk memecahkan suatu masalah. Untuk merumuskan masalah penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah melalui fokus penelitian. Fokus penelitian ditujukan untuk peneliti agar dapat membatasi studi kemudian penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau criteria masuk-keluar suatu informasi yang diperoleh dari lapangan (Moleong, 2004: 94). Sehingga, peneliti dapat mengetahui persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana saja yang menarik akan tetapi tidak relevan, maka tidak perlu dimasukkan ke dalam jumlah data yang dikumpulkan. Luasnya masalah dalam penelitian kualitatif maka perlu adanya fokus penelitian yang berisikan pokok masalah yang bersifat umum dengan menimbang tingkat kepentingan, urgensi dan fleksibilitas masalah yang akan dipecahkan, selain faktor keterbatasan tenaga, dana dan waktu (Sugiyono, 2008: 207). Adapun fokus penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali, meliputi:
 - a. Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Kawasan Wisata Tlatar
 - b. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata
 - c. Pengembangan Sarana dan Prasarana
 - d. Peningkatan aktivitas Promosi Pariwisata
 - e. Keterlibatan Masyarakat
2. Penyelenggaraan Pariwisata Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali berdasarkan prinsip-prinsip *Good Tourism Governance*

3. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali melalui fenomena dan kondisi yang ada di lapangan.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana peneliti dapat menggambarkan kondisi dari objek yang diteliti. Sedangkan Situs penelitian merupakan letak yang sesungguhnya peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai pertimbangan daerah ini merupakan daerah yang memiliki banyak objek wisata namun belum dapat terkelola dengan baik dan dapat dikatakan keberadaan objek-objek wisata tersebut belum bisa menjadi *icon* daerah. Sementara itu, Kabupaten Boyolali belum masuk dalam wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) ataupun Destinasi Pengembangan Nasional (DPN) dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS). Akan tetapi, keberadaan dari Kabupaten Boyolali terletak di antara dua KSPN, yaitu KSPN Jawa Tengah dan KSPN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). (*Lampiran III Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025*). Sehingga kecenderungannya Kabupaten Boyolali seringkali dilewati atau dijadikan sebagai jalur transportasi antar dua KSPN tersebut. Pada jalur Solo-Selo-

Borobudur, Kabupaten Boyolali merupakan satu-satunya jalur yang dilewati dengan memiliki kondisi pariwisata yang demikian. Kemudian salah satu alasan mengapa di Wisata Tlatar adalah karena destinasi wisata ini merupakan destinasi favorit jika dilihat dari jumlah pengunjung.

Adapun situs penelitian adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dan Kawasan Wisata Tlatar, Kecamatan Boyolali. Dinas yang berwenang dalam menerbitkan peraturan, instruksi dan bantuan teknik ataupun fasilitator dalam pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Boyolali. Sedangkan di Kawasan Wisata Tlatar terdapat beberapa *stakeholder* yang memiliki keterkaitan atas pengembangan wisata.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan subyek dari mana saja data dapat diperoleh (Arikunto, 2002: 107). Sebagai suatu alat yang menjadi sumber informasi adalah benda atau seseorang yang dapat dijadikan narasumber data karena dianggap menguasai bidang permasalahan yang erat hubungannya dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Ada dua jenis sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer, merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti dari sumbernya. sumber tersebut dapat diperoleh dari benda-benda, situs atau manusia. Peneliti dapat memperoleh data ini langsung melalui alat instrument. Misalnya peneliti dapat melakukan observasi atau wawancara

secara mendalam (*in depth interview*) terhadap subjek atau *social setting* yang diteliti. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan Wisata Tlatar, meliputi:

a. Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Kabupaten Boyolali meliputi:

- 1) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
- 2) Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata

b. Pelaku Usaha, meliputi:

- 1) Pedagang asongan
- 2) *Owner* Karunia Outbond

c. Wisatawan Kawasan Wisata Tlatar

d. Masyarakat Sekitar Kawasan Wisata Tlatar, meliputi:

- 1) Anggota POKDARWIS
- 2) Petugas parkir
- 3) Anggota karang taruna

2. Data Sekunder, merupakan data yang telah terlebih dahulu ditelusuri dan dilaporkan oleh orang lain di luar penelitian atau data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder meliputi: dokumen-dokumen, karya tulis orang lain, arsip-arsip, catatan, laporan resmi, surat kabar cetak maupun elektronik, majalah, jurnal ilmiah dan sebagainya. Data sekunder pada penelitian ini didapatkan melalui:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021

- b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Boyolali 2017
- c. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Boyolali 2017
- d. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pariwisata
- e. Data Sekretariat Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali
- f. Sumber lain lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan dasar yang paling utama, karena hal ini berkaitan dengan bagaimana cara untuk mendapatkan data. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian (Nazar, 2014: 153). Maka dari itu diperlukan bagaimana cara untuk mendapatkan data yang baik guna mendapatkan data yang dibutuhkan dan sesuai dengan standar data yang ditetapkan, teknik penelitian yang digunakan dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah melalui pengamatan terhadap pengembangan Kawasan Wisata Tlatar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui instansi terkait Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dan menggabungkannya dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (Nazar, 2014: 170). Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan data secara maksimal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan dan mempelajari data-data sekunder yang meliputi dokumen atau arsip-arsip yang relevan dengan penelitian. Dari beberapa dokumen tersebut kemudian dipelajari untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dimaksudkan sebagai alat pengumpul data (Moleong, 2004: 168). Pengertian instrumen atau alat penelitian di sini tepat karena ia menjadi segalanya dari proses penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi instrumen pokok dari penelitian adalah peneliti sendiri. Karena kedudukan peneliti pada penelitian tersebut cukup rumit, peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan

pada akhirnya ia menjadi pelapor atas hasil penelitiannya. Ciri –ciri umum manusia sebagai instrumen mencakup beberapa hal, yakni:

1. Responsif, manusia sebagai instrumen yang responsif terhadap lingkungan dan terhadap pribadi-pribadi lingkungan
2. Dapat menyesuaikan diri, manusia sebagai instrumen hampir tidak terbatas dapat menyesuaikan diri pada keadaan dan situasi pengumpulan data
3. Menekankan keutuhan, manusia sebagai instrumen memanfaatkan imajinasi dan kreativitasnya dan memandang dunia ini sebagai suatu keutuhan. Sehingga pandangan yang menekankan keutuhan ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memandang konteksnya di mana ada dunia nyata bagi subjek dan responden dan juga memberikan suasana, keadaan, dan perasaan tertentu.
4. Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, sewaktu bekerja di lapangan penelitian, dasar-dasar pengetahuannya, secara disadari ataupun tidak, membimbingnya melakukan kegiatan tersebut.
5. Memproses data secepatnya, kemampuan manusia sebagai instrumen penelitian adalah memproses data secepatnya setelah diperolehnya, menyusunnya kembali, mengubah arah inkuiri atas dasar penemuannya, merumuskan hipotesis kerja sewaktu berada di lapangan, dan mengetes hipotesis kerja itu pada respondennya.
6. Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan mengikhtisarkan, manusia sebagai instrumen memiliki kemampuan untuk menjelaskan sesuatu yang kurang dipahami oleh subjek atau responden.

7. Memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim dan idiosinkratik, manusia sebagai instrumen memiliki pula kemampuan untuk menggali informasi yang lain dari yang lain, yang tidak direncanakan semula, yang tidak diduga lebih dahulu, atau yang tidak lazim terjadi (Moleong, 2004: 169-172).

Sedangkan yang menjadi instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah;

1. Pedoman wawancara (*interview guide*), merupakan suatu daftar pertanyaan yang akan diajukan untuk memperoleh data guna kelengkapan penelitian.
2. Catatan lapangan (*field note*), merupakan catatan yang dipergunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan.
3. Buku catatan dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat data-data dokumen, laporan-laporan dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

G. Analisis Data

Setelah pengumpulan data, tindakan selanjutnya adalah mengolah data atau menganalisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2004: 280). Maksudnya, yang pertama dilakukan adalah mengorganisasi data yang diperoleh dari catatan lapangan

dan tanggapan peneliti, berupa gambar, dokumen atau data data lain yang relevan. Tujuan dari pengorganisasian data adalah untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori *substantive*. Sehingga, data hasil penelitian dapat diterjemahkan untuk dapat dipahami pembaca secara umum.

Analisis data penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendetail dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian akan ditarik kesimpulan dan pada akhirnya dapat menjawab masalah yang diangkat dalam perumusan masalah. Pada penelitian ini menggunakan analisis data Interaktif oleh Miles & Huberman. Analisis data model tersebut untuk penelitian kualitatif, peneliti dapat menggambarkan makna yang valid dan dapat dipercaya dari fenomena yang dijelaskan. Melalui penelitian kualitatif maka dapat dicari sumber data yang jelas, kemudian dapat dikembangkan dengan alur kronologis dan kemudian mencari hubungan sebab-akibat, sehingga dapat ditarik sebuah penjelasan, analisis kualitatif didasarkan pada observasi, wawancara dan dokumen.

Untuk memperkuat analisis data kualitatif Miles & Huberman (dalam Usman dan Purnomo, 2014: 85-88) merumuskan tiga komponen kegiatan untuk memperoleh hasil penelitian. Tiga komponen tersebut diantaranya:

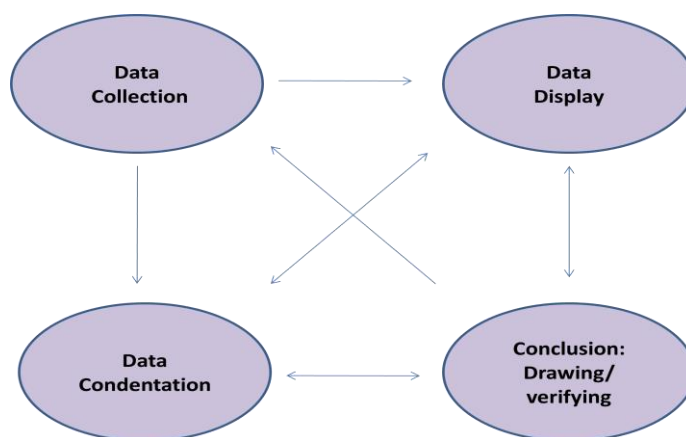
1. *Data Condensation*, mengacu pada pemilihan focus, menyederhanakan, mengabstraksi, transformasi data yang didapatkan dari catatan lapang dan mengumpulkan catatan tertulis tentang fakta di lapangan, wawancara,

dokumen dan bahan-bahan empiris lainnya. Data yang diperoleh peneliti akan menseleksi data yang akan dipilih, dan kemudian menulis ringkasan, menandai, membangun tema, mengelompokkan berdasarkan kategori dan menulis analisis. Jadi data *condensation*, merupakan bentuk analisis yang mempertajam fokus, membuang data yang tidak sesuai, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga akhir kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

Data Condensation merupakan bagian dari analisis.

2. *Data Display*, kegiatan selanjutnya adalah menyajikan data, data yang ditampilkan harus terorganisir, sehingga dengan melihat tampilan akan dapat membantu memahami apa yang terjadi. Penyajian data dapat ditampilkan dengan narasi atau dapat digambarkan dengan bentuk grafik, tabel, *pie chart* dan sebagainya. Akan tetapi, Miles & Huberman menyarankan untuk menyajikan data secara sistematis, jelas, sesuai dan yang penting mengetahui apa yang disajikan.
3. *Conclusion drawing/ verification*, aliran ketiga yang dilakukan adalah menarik dan memastikan kesimpulan. Kesimpulan dijadikan sebagai analisis hasil. Verifikasi telah melewati tahap pemikiran dan analisis sehingga dapat menjadi kesimpulan yang tidak rumit atau panjang. Kesimpulan diinterpretasikan sesuai dengan data dan kajian yang diperoleh selama penelitian.

Tahap dari analisis data dapat digambarkan pada gambar berikut ini:



Sumber: Miles & Huberman, A.M (1994). *Qualitative Data analysis: an expanded sourcebook* (Usman & Purnomo, 2014)

Gambar 3.1 *Components of Data Analysis: Interactive Model*

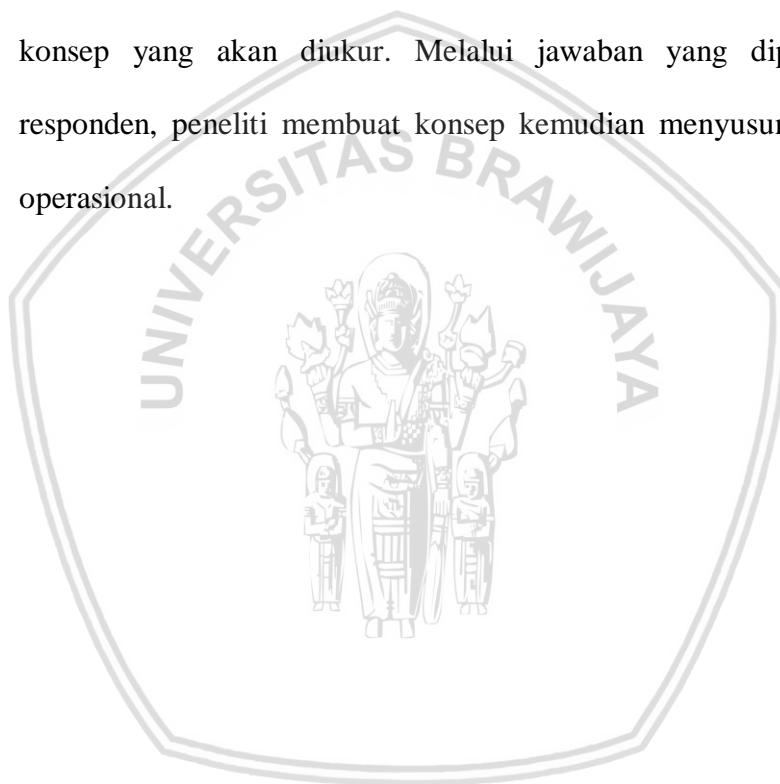
H. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif memerlukan pengujian keabsahan dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliable dan obyektif (Sugiyono, 2012: 117). Penelitian kualitatif banyak diragukan kebenarannya karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor peneliti yang dinilai bersikap subyektif, kelemahannya pada wawancara dan observasi. Maka dari itu penelitian kualitatif memerlukan keabsahan data. Pasolong (2012: 178) mengemukakan beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menguji suatu validitas adalah sebagai berikut:

- a. Mendefinisikan secara operasional konsep yang akan diukur
- b. Mencari definisi dan rumusan tentang konsep yang akan diukur yang telah dikemukakan oleh para ahli dalam literatur. Oleh karena rumusan

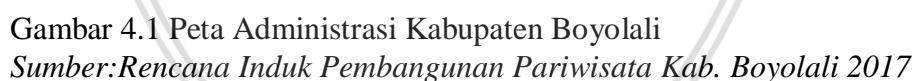
yang sudah operasional dapat digunakan secara langsung dipakai. Tetapi bilamana rumusan yang belum operasional, maka tugas seorang peneliti untuk merumuskannya secara operasional

- c. Bilamana di dalam literature tidak dapat diperoleh definisi atau rumusan konsep, maka tugas seorang peneliti adalah membuat definisi dan rumusan konsep tersebut.
- d. Menanyakan secara langsung kepada responden mengenai aspek-aspek konsep yang akan diukur. Melalui jawaban yang diperoleh dari responden, peneliti membuat konsep kemudian menyusun pertanyaan operasional.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Geografis Kabupaten Boyolali



86

Tabel 4.1 Jumlah Desa/ Kelurahan, RW, dan RT Menurut Kecamatan di Kabupaten Boyolali

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	RW	RT
1	Selo	10	-	53	213
2	Ampel	20	-	154	547
3	Cepogo	15	-	92	406
4	Musuk	20	-	92	513
5	Boyolali	6	3	118	495
6	Mojosongo	11	2	93	424
7	Teras	13	-	47	313
8	Sawit	12	-	43	180
9	Banyudono	15	-	59	264
10	Sambi	13	-	59	338
11	Ngemplak	12	-	108	431
12	Nogosari	13	-	65	410
13	Simo	13	-	76	300
14	Karanggede	16	-	65	276
15	Klego	13	-	67	294
16	Andong	16	-	79	349
17	Kemusu	13	-	62	284
18	Wonosegoro	18	-	92	364
19	Juwangi	9	1	45	224
Jumlah		261	6	1.674	6.625

Sumber: Kabupaten Boyolali dalam Angka 2017

Kabupaten Boyolali merupakan sebuah kabupaten yang berada di Jawa Tengah dengan pusat administrasi berada di Kecamatan Boyolali, yang terletak sekitar 27 km sebelah barat Kota Surakarta 110°22"-110°50" BT, dan 7°36"-7°71" LS. Kabupaten Boyolali termasuk dalam kawasan Solo Raya (Karesidenan Surakarta) yang berbatasan dengan beberapa kabupaten, batas wilayah Kabupaten Boyolali diantaranya:

Utara : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan

Timur : Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten

Sukoharjo dan Kota Surakarta (Solo)

Selatan: Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Barat : Kabupaten Magelang.

Bagian timur laut sekitar wilayah Kecamatan Karanggede dan Simo pada umumnya tanah lempung. Bagian tenggara sekitar wilayah Kecamatan Banyudono dan Sawit pada umumnya tanah geluh. Bagian Barat Laut sekitar Wilayah Kecamatan Musuk dan Cepogo pada umumnya tanah berpasir. Bagian utara sepanjang perbatasan dengan wilayah kabupaten Grobogan pada umumnya tanah berkapur. Secara topografi wilayah mulai dari ketinggian 75 m diatas permukaan laut di wilayah bagian timur hingga 1.500 m diatas permukaan laut di wilayah bagian barat.

Di wilayah Kabupaten Boyolali terdapat 2 gunung yang menjadi *icon* Kabupaten Boyolali,yaitu Gunung Merapi dan Merbabu. Keduanya ada di wilayah Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk dan Ampel yang merupakan wilayah bagian barat-selatan. Adanya kedua gunung tersebut menyebabkan perbedaan kondisi fisik lahan, hasil tanaman, dan kondisi social ekonomi masyarakat.

Kondisi fisik wilayah selatan pegunungan di bagian barat dan ke arah timur melandai melewati kota Boyolali hingga bagian timur berupa tanah yang relatif datar berupa sawah. Jenis tanah berpasir mempunyai porositas tinggi sehingga tanah lebih banyak mengandung air tanah yang lebih banyak. Di wilayah selatan-timur terdapat banyak mata air dan sungai yang selalu mengalir airnya. Hasil bumi yang banyak di wilayah ini adalah tanaman sayuran dan tembakau di wilayah selatan-barat (pegunungan) dan padi di wilayah selatan timur. Di wilayah ini juga

terdapat banyak tempat usaha/ industry menengah dan besar. Kemudahan akses jalan dan prasarana, ketersediaan air dan kestabilan lahan merupakan penyebab tumbuhnya tempat usaha/industry di wilayah selatan. Sedangkan wilayah utara sebagian besar mempunyai jenis tanah kapur atau lempung, sebagian besar tanah berupa lahan kering. Hasil utama wilayah tersebut adalah hasil hutan (terutama kayu) dan tanaman palawija.

2. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Pada tahun 2016 jumlah penduduk menjadi 963.690 jiwa dengan komposisi laki-laki 474.524 jiwa dan perempuan sebanyak 489.166 jiwa, serta kepadatan penduduk sebesar 945 jiwa/km². Pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun 0.60%. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut berdasarkan per kecamatan

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Boyolali pada tahun 2016

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2015-2016 (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	Selo	14.756	14.652	29.408	0,60
2	Ampel	38.487	39.792	78.279	0,58
3	Cepogo	27.962	28.288	56.250	0,61
4	Musuk	27.794	28.911	56.705	0,57
5	Boyolali	33.466	34.907	68.373	0,65
6	Mojosongo	25.618	26.811	52.429	0,61
7	Teras	21.845	22.786	44.631	0,64
8	Sawit	15.088	15.665	30.753	0,58
9	Banyudono	24.199	25.156	49.355	0,63
10	Sambi	20.775	21.913	42.688	0,55

Lanjutan Tabel 4.2

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2015-2016 (%)
		Laki-laki	Perempuan		
11	Ngemplak	41.989	42.728	84.717	0,75
12	Nogosari	32.708	32.872	65.580	0,61
13	Simo	22.636	23.013	45.649	0,61
14	Karanggede	19.376	19.587	38.963	0,55
15	Klego	19.866	20.722	40.588	0,55
16	Andong	26.914	28.423	55.337	0,55
17	Kemus	19.919	20.685	40.604	0,55
18	Wonosegoro	24.938	25.782	50.720	0,56
19	Juwangi	16.188	16.473	32.661	0,55
Kab. Boyolali		474.524	489.166	963.690	0,60

Sumber: Kabupaten Boyolali dalam Angka 2017

Menurut data di atas, jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kecamatan Ngemplak menempati urutan pertama dalam jumlah penduduk terbanyak dan laju pertumbuhan yang paling cepat mencapai 0,75 % dalam kurun waktu 2015-2016. Selain itu, pengelompokan penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dalam penataan jumlah angkatan kerja penduduk yang umurnya adalah usia di atas 15 tahun sampai dengan dibawah 64 tahun atau yang dikenal dengan usia produktif. Pada gilirannya usia produktif tersebut akan berkurang perkembangannya tiap tahun karena sejumlah penduduk melanjutkan sekolah dan sejumlah penduduk terserap pada lapangan kerja, selisihnya dikenal dengan angka pengangguran. Adapun jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang

bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Boyolali tahun 2016.

Tabel 4.3 Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Boyolali tahun 2016

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	96.469	86.110	182.579
2. Industri Pengolahan	51.872	57.634	109.506
3. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel	51.851	55.552	107.403
4. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	28.824	24.880	53.704
5. Lainnya	74.049	9.938	83.987

Sumber: Kabupaten Boyolali dalam Angka 2017

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa lapangan pekerjaan utama yang menjadi pekerjaan penduduk Kabupaten Boyolali di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini karena Kabupaten Boyolali berada di kaki Gunung Merapi dan Merbabu sehingga memiliki kondisi fisik lahan dan hasil tanam yang berbeda yang cocok pada bidang-bidang tersebut.

3. Visi dan Misi Kabupaten Boyolali

Proses pembangunan daerah disusun berdasarkan pada arahan visi dan misi pembangunan daerah. Adapun visi pembangunan 2016-2021 adalah **“Pro Investasi Mewujudkan Boyolali yang Maju dan Lebih Sejahtera”**. Hal tersebut dijalankan dengan beberapa misi yaitu:

- 1) Boyolali, melanjutkan Pro Investasi
- 2) Boyolali membangun untuk perubahan
- 3) Boyolali, bersih, berintegritas dan sejahtera
- 4) Boyolali, sehat, produktif dan berdaya saing
- 5) Boyolali, lumbung padi dan pangan nasional
- 6) Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan
- 7) Boyolali, lebih maju dan berteknologi

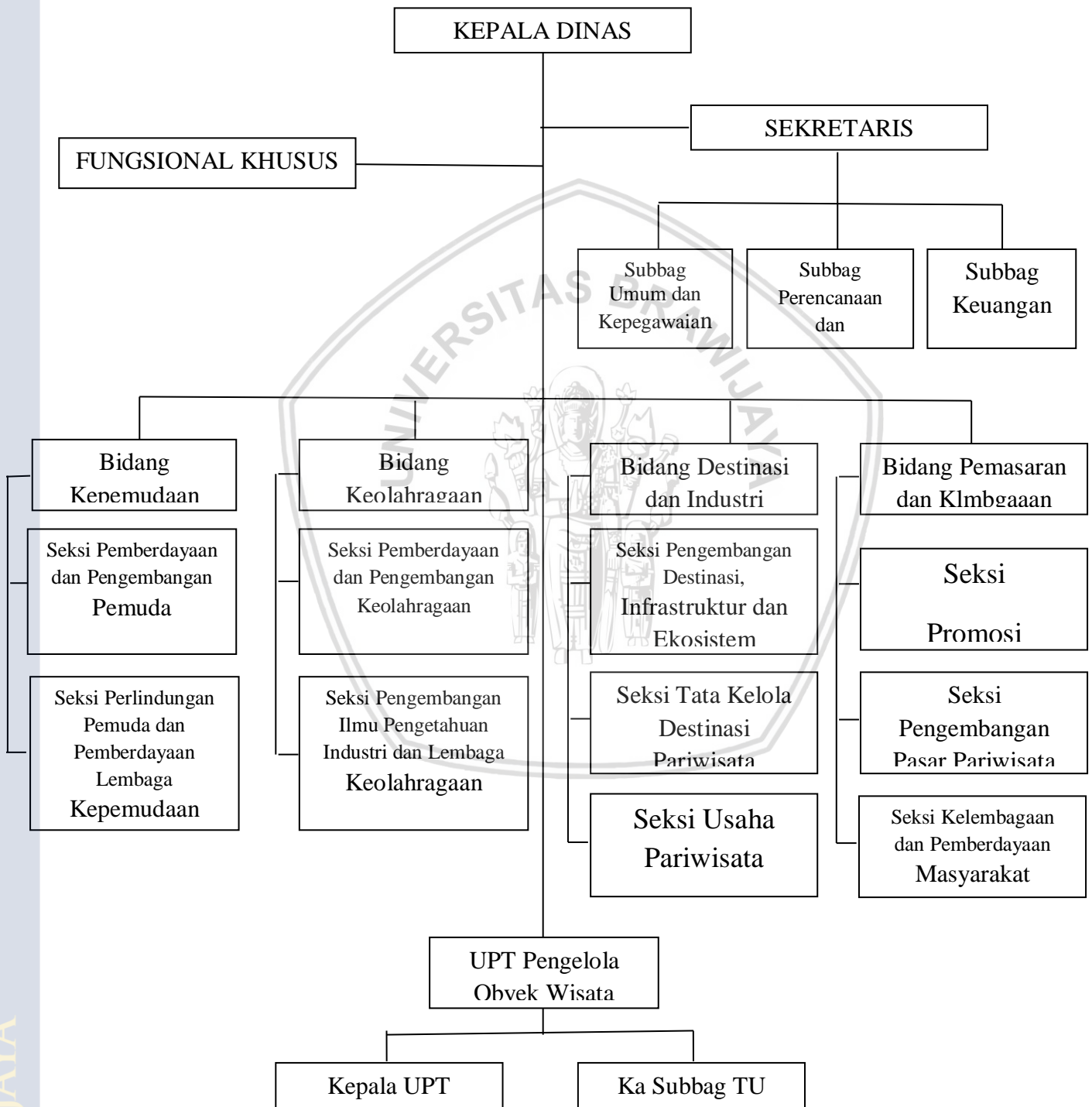
4. Pemerintahan

Dari 19 kecamatan, 261 desa dan 6 kelurahan serta dengan 963.690 penduduk, memiliki jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil pemilu 2015 sebanyak 45 orang yang terdiri dari 40 laki-laki dan 5 orang perempuan. Selain itu, pada tahun 2016 jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Boyolali sebanyak 9.528 orang. Susunan perangkat daerah Kabupaten Boyolali diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

5. Gambaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Boyolali

a. Struktur Organisasi



Gambar 4.2 Struktur organisasi DISPORAPAR

Sumber: Sekretariat DISPORAPAR, 2018

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali sebanyak 59 orang. Dengan demikian Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali memiliki pegawai dengan kuantitas terbatas, hal tersebut dapat dilihat melalui tabel 4.4:

Tabel 4.4 Tingkat pendidikan pada pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	S2	5
2	S1	17
3	D-III	3
4	SMA Sederajat	23
5	SMP	5
6	SD	6
Jumlah		59

Sumber: Sekretariat DISPORPAR Kab. Boyolali 2018

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali merupakan dinas dengan struktur baru. Semula Pariwisata berada di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan rencana kerja yang cenderung pada kesenian, budaya dan kepariwisataan. Peran strategis bidang pariwisata meliputi beberapa tugas berikut:

- a) Perumus kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan pariwisata,
- b) Pengkoordinasian hubungan antar lembaga daerah terkait pariwisata,
- c) Pelaksana dan pengatur investasi serta pemungutan retribusi pariwisata,

- d) Meningkatkan dan mengembangkan potensi serta kualitas obyek wisata,
- e) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata,
- f) Meningkatkan partisipasi masyarakat pelaku kelompok dan jasa usaha pariwisata,
- g) Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi dan promosi pariwisata

6. Kekayaan Ekologis sebagai Potensi Pariwisata

Kekayaan ekologis dalam penggunaan lahan di Kabupaten Boyolali dalam peruntukkan guna lahan. Kekayaan ekologis atau lebih pada kondisi lingkungan dengan memiliki keindahan panorama dan dengan keanekaragaman yang menjadi daya tarik wisata.

a. Solo-Selo-Borobudur

Kabupaten Boyolali merupakan jalur strategis yang diapit oleh beberapa kabupaten. Lokasi Boyolali yang berdekatan dengan kabupaten Magelang yang merupakan lokasi kawasan wisata Borobudur. Kawasan tersebut menjadi magnet tersendiri dan termasuk dalam 10 wisata nasional.

b. Gunung Merapi-Merbabu

Kabupaten Boyolali memiliki keindahan panorama alami, hal tersebut dipengaruhi dengan adanya pegunungan yang mengapitnya yaitu Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Selain memiliki panorama gunung juga memiliki beberapa bukit yang berada di kedua

gunung tersebut. Kabupaten Boyolali memiliki akses pendakian kedua gunung tersebut dan dapat dilalui melalui Kecamatan Selo. Kabupaten Boyolali sebagai kabupaten yang memiliki Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu yang tepatnya berada di Kecamatan Selo.

c. Waduk

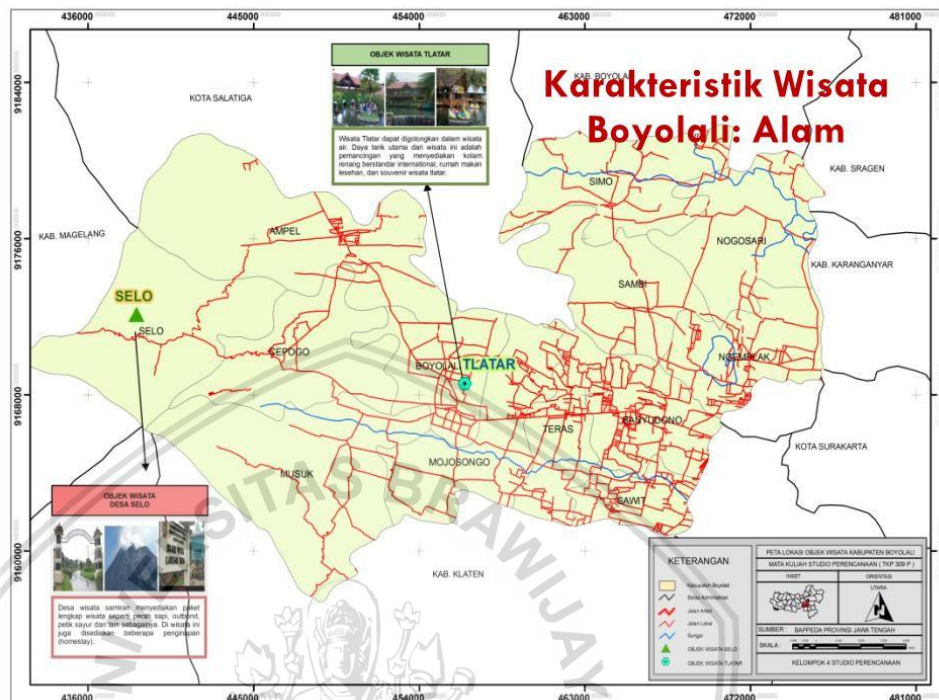
Kabupaten Boyolali memiliki tiga waduk besar yang selama ini dimanfaatkan sebagai lokasi wisata dan untuk pengairan padi (irigasi). Waduk tersebut meliputi Waduk Kedungombo di Kecamatan Kemusu, Waduk Bade di Kecamatan Klego dan Waduk Cengklik di Kecamatan Ngemplak.

d. Umbul

Umbul merupakan sumber mata air alami yang muncul ke permukaan tanah. Terdapat berbagai jenis umbul yang masih aktif dan memiliki potensi pengembangan wisata serta berfungsi sebagai mata air. Jumlah umbul yang berada di Kabupaten Boyolali sejumlah 13 umbul yang tersebar di Kecamatan Banyudono, Boyolali dan Sawit. Sehingga dapat diartikan bahwa Boyolali sebagai kota umbul. Keberadaan umbul membantu masyarakat Boyolali untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

7. Profil Kawasan Wisata Tlatar

a. Lokasi dan Kondisi



Gambar 4.3 Lokasi Kawasan Wisata Tlatar

Sumber: Studio Perencanaan 2017

Kawasan Wisata Tlatar terletak di Dukuh Tlatar, Desa Kebonbimo, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali tepatnya kurang lebih 4 kilo meter dari pusat kota Boyolali. Kawasan Wisata Tlatar bermula dari salah satu titik atau zona mata air alami yang disebut dengan umbul. Umbul Tlatar disebutnya karena berada di Dukuh Tlatar, obyek wisata ini memanfaatkan mata air alami yang keluar terus menerus selama 24 jam dari lapisan batu vulkanik yang menyemburkan air dengan debit 650 liter/detik. Kawasan Wisata Tlatar berada di kaki Gunung Merbabu pada ketinggian sekitar 350 meter dari permukaan

laut. Sehingga memiliki suasana yang asri, alami dan berudara sejuk. Kawasan Wisata Tlatar menempati lahan sekitar kurang lebih 7 hektar.

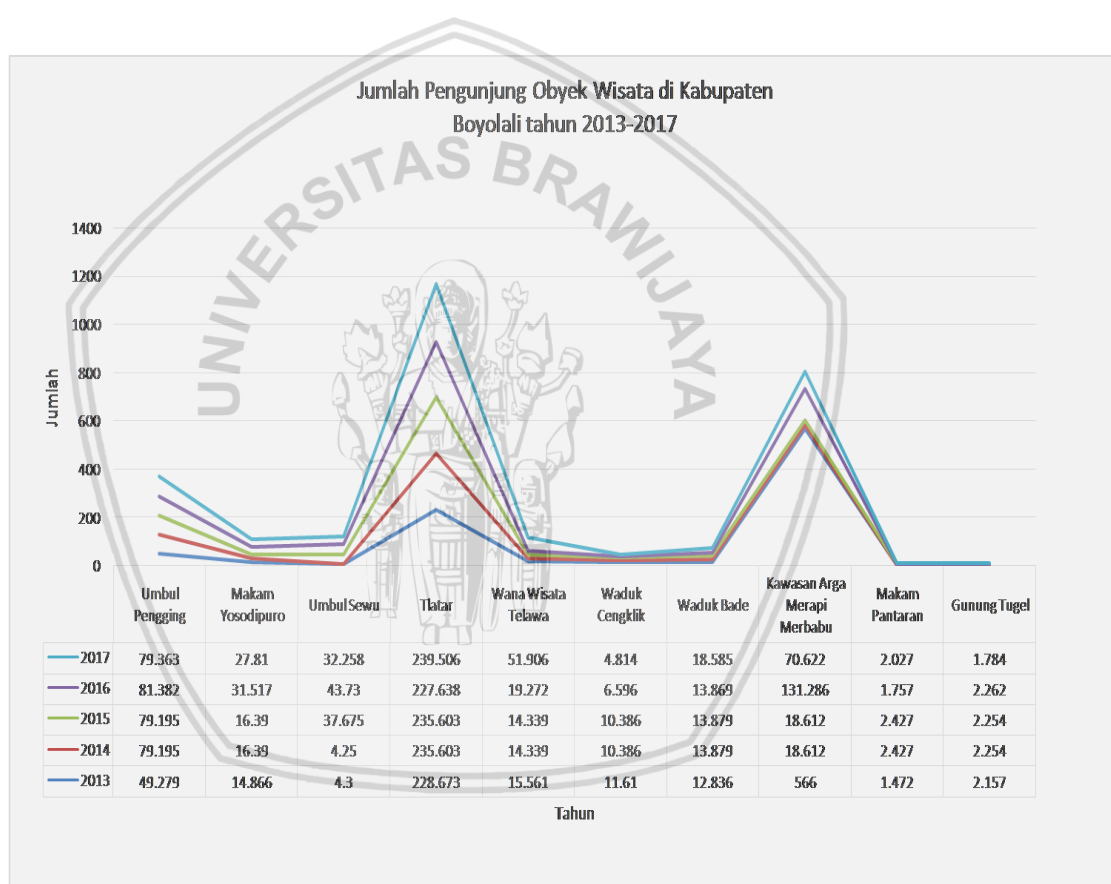
Wisata Umbul Tlatar sudah ada sejak tahun 1998, kemudian diresmikan pada tahun 2000. Kawasan Wisata Tlatar dikembangkan oleh Dinas Pariwisata sebagai salah satu wisata unggulan yang ada di Kabupaten Boyolali. Sehingga perbaikan dan perawatan terlihat di area ini, didukung dengan mulai berkembangnya aktivitas pariwisata. Sehingga keberadaan wisata ini kemudian diharapkan dapat memberikan dampak (*multiplier effect*) di lingkungan sekitar kawasan wisata baik secara sosial dan perekonomian masyarakat.

b. Aksesibilitas Obyek Wisata

Aksesabilitas mendukung kegiatan pergerakan destinasi pariwisata yang dapat menjangkau obyek wisata. Kabupaten Boyolali memiliki persebaran pariwisata yang luas, dari daerah yang sulit untuk dijangkau dan mudah untuk dijangkau. Kawasan Wisata Tlatar merupakan salah satu wisata yang berada di zona yang dekat dengan jalan provinsi Solo-Semarang. Akan tetapi hal tersebut belum didukung dengan kemudahan transportasi, umumnya transportasi yang ada berupa angkutan desa yang jumlahnya minim. Namun, transportasi berupa ojek *online* sudah ada di Kabupaten Boyolali. Selain itu kondisi jalan menuju kawasan wisata belum begitu bagus. Hal tersebut menjadi penghambat untuk wisatawan yang berkunjung.

c. Perkembangan Pasar Wisata

Kabupaten Boyolali memiliki destinasi tujuan wisata berupa wisata alam, buatan dan religi, hal tersebut dapat dilihat melalui tabel 1.1. Adapun beberapa obyek wisata yang menjadi andalan dilihat dari jumlah pengunjungnya pada gambar grafik 4.4,



Gambar 4.4 Grafik jumlah pengunjung obyek wisata Boyolali pada 2013-2017

Sumber: Kabupaten Boyolali dalam Angka 2017

Melalui grafik tersebut dapat dilihat bahwa dari setiap tahun 2013 sampai tahun 2017 yang mengalami peningkatan pengunjung adalah

Wisata Tlatar yang selanjutnya diikuti oleh Kawasan Wisata Arga Merapi Merbabu.

d. Layanan Fasilitas Penunjang Wisata

Layanan fasilitas penunjang wisata yang dapat ditemukan dapat berupa informasi pariwisata, informasi pariwisata terkait dengan Kawasan Wisata Tlatar dapat diperoleh melalui UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) dinas pariwisata yang kantornya berada di Kawasan Wisata Tlatar. Selain itu dapat ditemukan sarana perdagangan berupa kios-kios di lingkungan kawasan yang dapat membantu wisatawan untuk memenuhi kebutuhannya. Kios-kios tersebut tersebar ke beberapa area wisata. Selain itu juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

e. Deskripsi Kawasan Wisata Tlatar



Gambar 4.5 Beberapa Area di Kawasan Wisata Tlatar
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2018

Kawasan Wisata Tlatar merupakan tempat wisata yang memiliki karakteristik alam. Dimana air menjadi karakteristik dari keberadaan pariwisata ini. Melimpahnya air yang berada di kawasan ini dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk membangun obyek wisata yang hampir serupa dan tergabung dalam satu kawasan ini. Sehingga banyak dari area kawasan ini menjadi area kawasan wisata berupa pancingan. Berikut ini beberapa obyek wisata yang ada di kawasan tersebut:

1) Pancingan 7 Pondok Asri



Gambar 4.6 Pancingan 7 Pondok asri
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2018

Pancingan 7 Pondok Asri menyajikan rumah makan dan pemancingan ikan. Rumah makan bernuansa alami yang berada diantara kolam ikan, sawah dan dikelilingi dengan tanaman-tanaman hijau yang menyejukkan.

2) Pancingan 5 Taman Air



Gambar 4.7 dan gambar 4.8 Taman Air dan area olahraga woodball

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2018

Adapun pemancingan tersebut terdiri dari Pancingan 5 Taman Air, menyajikan rumah makan, kolam renang dewasa dan anak-anak, ekowisata taman air Indonesia, area olahraga woodball, outbond area, pemancingan ikan, pakecehan, terapi ikan dan yang lainnya. Pemancingan ini merupakan area yang dapat dikatakan menjadi *icon* dari wisata Tlatar karena taman air tersebut termasuk dalam Ekowisata Taman Air Indonesia, Tlatar, Boyolali Jawa Tengah. Area ini diklaim sebagai tempat bersejarah yang pertama di Indonesia keberadaan dan berkembangnya:

- a) Budidaya dan pemuliaan bibit tanaman alfaafa dari daerah subtropika ke daerah tropika pada tahun 2002
- b) Pintu masuknya olahraga Woodball dan kejuaraan terbuka internasional tahun 2007 dan 2008

- c) Penemu bakteri terkuat MA-11, sebagai bahan pengembangan pangan, pakan tenak, pupuk, energy dan pelestarian lingkungan pada tahun 2011.

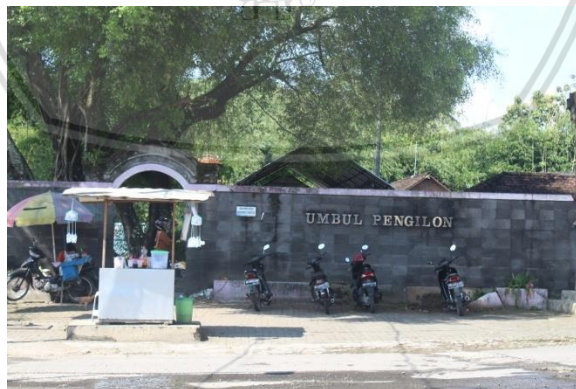
3) Pancingan 10 Sumber Rejeki



Gambar 4.9 Pancingan Sumber Rejeki
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2018

Pancingan 10 Sumber Rejeki, di tempat ini menyajikan rumah makan terapung dan pemancingan ikan dengan suasana dan pemandangan yang menarik.

4) Pancingan 17 Umbul Pengilon



Gambar 4.10 Pancingan 17 Umbul Pengilon
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2018

Pancingan 17 Umbul Pengilon, di tempat ini memiliki umbul pemandian sumber air alami, selain itu disamping dari tempat

ini ada pula pancingan dan rumah makan. Akan tetapi kondisi dari area ini masih sepi, karena kurangnya pengelola pada saat peneliti observasi.

5) Mina Tlatar Indah



Gambar 4.11 Pemancingan mina tlatar indah

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2018

Mina Tlatar Indah, di taman ini disediakan berupa gubug rumah makan yang berupa gazebo-gazebo, kolam renang anak dan pakecehan. Selain itu, ketika memasuki area ini tidak berbayar hanya membayar parkir kendaraan di kiri dari pintu masuk.

6) Pancingan 4 Tirto Wening



Gambar 4.12 Pancingan 4 tirto wening

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2018

Pancingan 4 Tirto Wening terdpat rumah makan apung dan tempat memancing.

7) Kolam Renang Standar Nasional



Gambar 4.13 kolam renang standar nasional di tlatar
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2018

Kolam Renang Berstandar Nasional, di tempat ini terdapat kolam renang berstandar nasional, *waterboom*, gazebo untuk bersantai bersama keluarga seperti taman piknik dan sepanjang jalan menuju kolam renang di penuh pedagang yang berjualan makanan dan minuman.

8) Karunia Outbond Center



Gambar 4.14 Kegiatan *outbond* di karunia center

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2018

Karunia *Outbond Center*, di tempat ini terdapat rumah makan, area *outbond*, kolam renang dan *waterboom*. Pada area ini merupakan area yang paling banyak dikunjungi untuk kegiatan *outbond* karena memiliki lapangan yang luas dan berbagai paket fasilitas tersedia.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali, meliputi:

a. Pengembangan Obyek dan Daya tarik wisata

Daya tarik dari suatu destinasi dapat menjadi sebuah motivasi untuk para wisatawan berkunjung ke suatu obyek wisata. Sebagai komoditas pariwisata yang berdaya jual, jika dikelola dan dikembangkan dengan tepat dan optimal, produk wisata akan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. Ketika kunjungan wisatawan meningkat baik secara langsung ataupun tidak langsung akan memberikan dampak pada beberapa pihak, bisa swasta ataupun masyarakat.

Sebagai upaya mengembangkan pariwisata daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata melakukan beberapa langkah untuk mewujudkan pengelolaan kawasan wisata yang lebih baik dengan melibatkan berbagai pihak pada setiap daerah tujuan wisatanya, dimana yang

dahulu dikelola dinas, sekarang dikelola pada pihak kedua ataupun pihak ketiga. Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kabupaten Boyolali meliputi keseluruhan potensi atraksi atau sumberdaya wisata, baik berupa sumberdaya wisata alam, maupun budaya dikembangkan untuk menarik kunjungan wisatawan baik lokal, nusantara maupun mancanegara. Berdasarkan karakteristiknya, maka ODTW di Kabupaten Boyolali ini terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Objek dan daya tarik wisata alam (*natural attractions*) yaitu objek dan daya tarik yang berhubungan dengan lingkungan alam termasuk didalamnya iklim, pemandangan alam, pantai dan laut, flora dan fauna. Fenomena alamiah lain seperti pegunungan, geologis, gua, gletser, aktivitas vulkanologis, sumber air panas dan lainnya.
- b. Objek dan daya tarik wisata budaya (*cultural attractions*) yaitu obyek dan daya tarik yang berkaitan dengan manusia. Atraksi-atraksi yang termasuk didalamnya adalah situs arkeologi, sejarah dan budaya (monument, bangunan/kota/daerah bersejarah, bangunan ibadah), budaya, tradisi, gaya hidup yang unik, kesenian, kerajinan, aktivitas ekonomi, kawasan perkotaan, museum dan fasilitas budaya lainnya, festival budaya, keramahan penduduk dan lainnya.

- c. Objek dan daya tarik wisata yang bersifat khusus (*special types of attractions*) yaitu objek dan daya tarik wisata yang tidak termasuk dalam kategori objek dan daya tarik wisata alam dan budaya. Akan tetapi diciptakannya secara buatan, mencakup di dalamnya taman bertemna, gedung konvensi, fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas belanja, fasilitas olahraga dan lain lain.

Kegiatan pengembangan tiga karakteristik ODTW ini sangat diperlukan di Kabupaten Boyolali, sebagai upaya pengembangan pariwisata daerah. Termasuk dalam pengembangan Kawasan Wisata Tlatar sendiri. Kawasan Wisata Tlatar mencakup 3 karakteristik dari ODTW, ada yang sebagian alamiah yakni berupa umbul air dan taman-taman yang memiliki nuansa alamiah, kemudian budaya seperti kegiatannya yang biasanya menjadi tradisi yakni ketika menjelang bulan puasa dan ketika 1 Muharam. Selanjutnya buatan, hal ini terkait dengan keberadaan pendopo-pendopo yang berada di Kawasan Wisata Tlatar, Kolam renang nasional, area *outbond*, dan beberapa bangunan yang lainnya.

Daya tarik yang dimiliki oleh Kawasan Wisata Tlatar dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Sumber-sumber alam: setiap daerah memiliki derajat keistimewaan tertentu yang dapat berbentuk fisik alam, iklim dan keindahan tempat tersebut. Kondisi dari Kawasan Tlatar memiliki keindahan panorama yang alamiah, terdiri dari area

outbond dan umbul. Area outbond yang biasanya dipakai merupakan salah satu taman yang luas. Selain itu, yang menjadi ciri khas adalah keberadaan umbul, umbul merupakan sumber air secara alamiah muncul ke permukaan tanah.

- 2) Budaya: erat kaitannya dengan bagaimana masyarakat hidup di sekitarnya, tradisi yang sampai saat ini bertahan di Kawasan Wisata Tlatar adalah ketika menjelang bulan puasa. Umbul yang ada di Boyolali dipenuhi masyarakat Boyolali dan sekitarnya untuk melaksanakan kegiatan *padusan* (mandi) termasuk umbul Tlatar. Bagi yang mempercayai, tradisi tersebut sebagai salah satu upaya untuk membersihkan diri sebelum menjalani puasa di bulan Ramadhan.
- 3) Etnitas: tujuan dari orang berwisata adalah untuk mengunjungi keluarga atau bertemu dengan teman-teman mereka, dalam hal ini Tlatar merupakan wisata keluarga yang didukung dengan berbagai fasilitasnya.
- 4) Hiburan: wisatawan tertarik pada sebuah tempat karena hiburan yang disediakan tempat itu. Misalnya di Tlatar, dengan melihat pemandangan yang hijau dan suara air sudah dapat menjadi hiburan bagi wisatawan, ditambah dengan beberapa arena permainan. Seperti Ekowisata taman air, yang biasanya digunakan untuk bermain air atau “keceh” dan menangkap ikan-ikan. Selain itu juga disediakan kuda yang dapat disewa oleh

wisatawan dengan membayar 100.000 untuk satu kali putaran yang kira kira sejauh 1km.

Kawasan Wisata Tlatar merupakan kawasan yang termasuk dalam Kawasan strategis pariwisata Umbul Tlatar-Umbul Pengging-Umbul Sewu. Adapun strategi pengembangan yang akan dilakukan tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Tata kelola wisata air untuk kegiatan atraksi dan permainan olahraga air
- 2) Lokasi pengembangan wisata kuliner dan cinderamata
- 3) Pengembangan dan *event* olahraga tradisional dengan menggunakan woodballs
- 4) Pengembangan dan pembangunan untuk kolam renang bertaraf internasional sebagai wisata dan olahraga renang
- 5) Pembangunan untuk kegiatan wisata pertunjukan music dan kesenian berskala internasional dalam paket MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*)
- 6) Pembangunan ruang terbuka hijau dan fasilitas stadion untuk berbagai macam kegiatan olahraga.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Staf Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, beliau mengatakan bahwa:

“Saat ini di Boyolali sedang gencarnya pembangunan, untuk pariwisata juga. Sekarang sudah proses pembangunan Taman Indrokilo di daerah kemiri, itu pembangunannya belum selesai pun sudah banyak pengunjung yang datang. Untuk Kawasan Wisata Tlatar ini, merupakan wisata yang paling banyak pengunjungnya, upaya untuk terus meningkatkan kunjungan wisata yakni dengan pembangunan olahraganya. Dahulu tahun 2007 dan 2008 terselenggara *Woodball International Championship* di Tlatar. Pengembangan wisata melalui pengadaan event olahraga sangat diperlukan untuk mengingat kembali bahwa dahulu di Tlatar pernah membuat event besar, efeknya sangat besar, sektor yang lain nanti mengikuti”

Kemudian Beliau menambahkan juga bahwa,

“Sekarang ini kebanyakan tempat yang ada di Tlatar sudah dikelola oleh swasta pengusaha ataupun perorangan. Secara fisik, untuk peningkatan fasilitas atau daya tarik yang lainnya dikembalikan lagi kepada pelaku usaha wisata, semakin banyak modal semakin bagus juga pembangunannya”. (*Wawancara dengan Ibu Siti di Kantor DISPORAPAR pada 5 Maret 2018 pukul 10.15 WIB*)

Hal tersebut sejalan dengan pendapat pedagang sekitar yang mengatakan,

“....ya dulu rame mba karena ada event olahraga besar, ini sekarang udah mau dirapihin buat olahraga *woodball* lagi” (*Wawancara dengan Ibu Sri di Kawasan Wisata Tlatar pada 31 Maret 2018*)

Dari data tersebut disimpulkan bahwa pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Boyolali terus berupaya untuk meningkatkan obyek dan daya tarik wisata di Kawasan Tlatar dengan melibatkan peran swasta dalam memperbaiki fisik obyek dan daya tarik wisata. Disamping itu koordinasi dengan para pelaku usaha wisata Kawasan Tlatar terus berjalan agar pengembangan Kawasan Wisata Tlatar dapat bersinergis satu sama lain.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata

Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari salah satu daya dukung yang paling penting dalam pengelolaan obyek wisata. Daya dukung tersebut berupa sumber daya manusia (SDM) yang mana menjadi kunci dalam menentukan laju perkembangan pembangunan di suatu kawasan atau daerah. Maka dari itu, peningkatan SDM harus terus ditingkatkan agar pembangunan suatu kawasan wisata dapat

tercapai dengan baik. SDM pariwisata terdiri dari SDM Instansi, swasta dan masyarakat. SDM instansi yang terkait adalah dinas pariwisata. Dengan adanya latar belakang pendidikan yang berbeda, maka diperlukannya pelatihan tertentu untuk meningkatkan kompetensi SDM yang berkaitan dengan kepariwisataan. Seperti yang disampaikan oleh staf sie promosi pariwisata bahwa,

“...peningkatan untuk sdm yang ada disini juga ada, kemaren 3 bulan lalu kalo ndak salah kita ada pelatihan promosi pariwisata tentang penerapan teknologi informasi pariwisata. Jadi kita bisa tau penerapan promosi wisata melalui teknologi informasi yang ada, coba lihat di *Cultural Places* salah satu bentuk promosi kita lewat sana. Insya Allah kalo ndak bulan Mei ini atau Agustus ini kita adakan kunjungan ke Malang tempatnya di UIN Maliki untuk *ngangsu kawruh* dengan stakeholder yang ada di sana...” (Wawancara dengan Pak Nunung di Kantor DISPORAPAR pada 5 April 2018)



Gambar 4.15 *Cultural Places Application*
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2018

Hal tersebut senada dengan Sie Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata bahwa,

“... kalau untuk pelatihan aparatur disini tentu pasti ada, kita upayakan 3 sampai 4 kali dalam satu tahun, untuk kompetensinya disesuaikan dengan kebutuhan...” (Wawancara dengan Pak Fatih di Kantor DISPORAPAR pada 5 April 2018)

Sebagai sasaran strategis dalam RPJMD 2016-2021 di bidang pariwisata adalah meningkatnya popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali. Sebagai salah satu hambatan SDM yang dimiliki aparatur adalah dengan semakin berkembang dan majunya teknologi informasi dan promosi menuntut kemampuan SDM pariwisata untuk lebih berkembang agar dapat mengikutinya. Sehingga melalui pelatihan tersebut aparatur dapat semakin berkembang untuk meningkatkan kapasitas diri.

Pengembangan SDM yang selanjutnya adalah masyarakat sekitar Kawasan Wisata Tlatar yang tidak terlepas dari berbagai peran, baik dimulai dari kesadaran segelintir pedagang untuk membuat suatu paguyuban, komunitas pemuda yang ingin maju dan berinovasi serta dukungan dari pemerintah terkait dalam bentuk pembinaan-pembinaan. Adapun komunitas yang terbentuk secara mandiri dan ada pula komunitas berupa POKDARWIS di Kawasan Wisata Tlatar ini.

Sebagaimana dalam wawancara dengan Pedagang sekitar Kawasan Wisata Tlatar:

“Pedagang daerah sini ini tergabung di RUSTAB (Rukun Usaha Taman Air Boyolali), jadi kalo mau berdagang melalui RUSTAB untuk menjadi anggotanya, sebenarnya ini komunitas guyub kita. Setiap sebulan sekali ada pertemuan dan ada bahasan. Tujuannya ya untuk kemajuan kita sendiri. Kita ndak dibentuk dari pemerintah ini, komunitas kita sendiri. Seperti ini, kita ada *id card*” (Wawancara dengan Ibu Ngatini anggota RUSTAB pada 31 Maret 2018 pukul 15.51 di Kawasan Wisata Tlatar).

Hal tersebut dibenarkan dengan salah satu penggagas dari RUSTAB,

“... RUSTAB ini sejak 2015 tujuannya paguyuban untuk kekeluargaan mba, kalo ada yang sedang kesusahan dibantu bersama, kemudian biar diantara pedagang sekitar sini yang asongan tidak ada iklim bisnis yang tidak sehat kita buat peraturan bersama..” (*Wawancara dengan Pak Larso di Kawasan Wisata Tlatar pada tanggal 31 Maret 2018*)

Dengan demikian RUSTAB adalah komunitas kekeluargaan para pedagang asongan yang berada di Kawasan Wisata Tlatar.

Kemudian, pemerintah terkait yang berperan adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali. Sebagai pihak pemerintah telah berupaya untuk melakukan pengembangan SDM di lingkungan wisata. Seperti yang diungkapkan oleh Sie Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali menyatakan:

“..... Pembinaan kita kepada masyarakat lingkungan sekitar melalui Kelompok Sadar Pariwisata atau (POKDARWIS). Keberadaan dari POKDARWIS ini bertujuan untuk melestarikan dan menjaga lingkungan yang ada wisatanya. Mereka difasilitasi untuk memperoleh pengetahuan tentang kepariwisataan. Tidak semua kecamatan memiliki POKDARWIS tergantung dari beberapa daerah yang mereka mencoba mengembangkan potensi lingkungannya. Kegiatannya biasanya ada perkumpulan dan ada pembinaan, berapa kalinya ndak mesti, soalnya keinginan untuk terampil akan ilmu baru melibatkan teman-teman pokdarwis, missal mereka ingin mengetahui tentang standar pariwisata yang baik nanti baru mulai diadakan pelatihan

seperti itu.” (Wawancara dengan Ibu Waryanti Pada 5 April 2018 pukul 10.10 WIB di Kantor Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali).

Hal tersebut sejalan dengan pendapat anggota POKDARWIS Tlatar bahwa,

“...iya kita pernah dapat pembinaan, tapi ini ndak rutin mba. Waktu itu 2 bulan yang lalu kira-kira, kita diberikan sosialisasi tentang prasarana wisata, tentang pentingnya menjaga kebersihan dan prasarana apa saja yang harus ada di wisata, seperti kebersihan toilet dan tempat ibadah”. (Wawancara dengan Ibu Sri di Kawasan Wisata Tlatar pada 6 April 2018)

Keberadaan POKDARWIS menjadi salah satu sasaran strategis bidang pariwisata di Kabupaten Boyolali, janji kinerja DISPORAPAR untuk tahun 2018 terbentuk 11 POKDARWIS. Perolehan POKDARWIS pada tahun 2018 ini sudah mencapai 17 kelompok. Bertambahnya jumlah kelompok sadar wisata disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat di sekitar obyek wisata untuk menyampaikan aspirasi dan meningkatkan pariwisata di sekitarnya. Sebagai satu permasalahan yang dihadapi pada pengelolaannya adalah keberadaan dari POKDARWIS belum terbina secara maksimal.

Selanjutnya pengembangan SDM pariwisata untuk pelaku usaha menurut LKJIP DISPORAPAR 2017 belum berjalan karena belum terbentuknya kelembagaan antar pelaku usaha pariwisata sehingga komunikasi antar pengusaha belum bisa berjalan. Di satu sisi peningkatan jumlah pelaku usaha pariwisata menjadi satu

indikator sasaran strategis program kerja dinas. Sehingga sebagai salah satu alternatif agar program ini berjalan dengan penerapan serta pengawasan standarisasi dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi SKKNI dan verifikasi TDUP.

Berdasarkan data di atas maka berbagai bentuk pengembangan SDM yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah terkait yakni dari dinas pariwisata telah mengupayakan pelatihan pada sdm aparturnya, salah satu kegiatannya tentang penggunaan teknologi informasi untuk promosi pariwisata. Salah satu bentuk pengembangan promosi yang dilakukan adalah dengan pemanfaatan *Cultural Place Application* yang dapat di download di *Appstore* pada *google*
- 2) Melalui pembentukan RUSTAB (Rukun Usaha Taman Air Boyolali) sebagai sarana penampungan keluhan kesah beserta evaluasi pedagang setiap satu bulan sekali. Komunitas ini terbentuk sekitar tahun 2015 sebagai wujud kesadaran para pedagang terhadap lingkungan sekitar Kawasan Wisata Tlatar. Melalui RUSTAB, pedagang yang berjualan di sekitar kawasan wisata terkontrol karena diberlakukan pemakaian beragam berupa baju batik dan *id card*. Kemudian diberlakukan penjadwalan berdagang pada area titik tertentu agar tidak ada persaingan yang serius dalam berjualan.

- 3) Memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap Kelompok Sadar Pariwisata (POKDARWIS). Kelompok ini merupakan komunitas yang terbentuk dari masyarakat yang peka terhadap lingkungannya berupa kehadiran wisata di sekitarnya. POKDARWIS di Kabupaten Boyolali dinamakan POKDARWIS Mawar Biru yang mana pada tahun 2018 ini terdiri 17 kelompok di daerah-daerah wisata. Kegiatan yang dilakukan biasanya perkumpulan satu bulan sekali ketika ada suatu informasi yang perlu diterima oleh POKDARWIS. Selain itu juga diadakannya pelatihan-pelatihan tertentu guna meningkatkan kemampuan, ketrampilan maupun dalam penguasaan sumber-sumber daya yang ada. Pembinaan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali. Akan tetapi kondisi di lapangan pembinaan yang ada belum terencana secara menyeluruh.
- 4) Pengembangan SDM masyarakat sekitar dengan cara melibatkana masyarakat dalam setiap aktivitas promosi. Misal ketika ada pameran wisata yang digelar di beberapa kota besar.
- 5) Pengembangan SDM yang dilakukan selanjutnya adalah dengan memberikan edukasi pada masyarakat sekitar kawasan wisata agar dapat lebih memahami bagaimana melayani pengunjung, cara berpenampilan yang baik, mengkondisikan kerapihan

lingkungan rumah yang berdekatan dengan kawasan wisata, dan pelajaran-pelajaran positif yang lainnya.

- 6) Pengembangan SDM untuk pelaku usaha saat ini belum berjalan karena belum terbentuknya kelembagaan yang mewadahi.

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan dari sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang menentukan suatu tempat layak atau tidak untuk dijadikan destinasi wisata. Disamping itu, dengan banyaknya sarana prasarana yang disediakan akan menjadi salah satu pertimbangan wisatawan untuk berkunjung. Sebagaimana dengan Kawasan Wisata Tlatar yang bekerjasama dengan berbagai pihak atau *stakeholder* untuk menunjang pengembangan sarana dan prasarana di Kawasan Wisata Tlatar, yakni berupa:

- 1) Prasarana Perekonomian

- a) Transportasi

Transportasi merupakan sebagai salah satu prasarana yang menjadi faktor utama dalam pengembangan pariwisata. Karena menjadi akomodasi bagi wisatawan untuk mencapai destinasi wisata. Terlebih melalui adanya infrastruktur jalan dan angkutan transportasi yang baik akan memudahkan dan dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Kondisi jalan menuju Kawasan Wisata Tlatar dapat dilewati oleh kendaraan kecil seperti motor maupun kendaraan besar seperti bus dan

truk. Akan tetapi di beberapa titik banyak ditemukan jalan-jalan yang berlubang dan masih rusak. Salah satunya karena faktor pembangunan jalan tol Solo-Semarang yang mengakibatkan kendaraan bermuatan lebih melalui jalan tersebut. Selain itu disediakan angkutan umum yang melintasi kawasan wisata tersebut. Akan tetapi armada yang melintasi kawasan tersebut masih sedikit, sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk mendapatkan angkutan umum. Kebanyakan wisatawan yang datang ke kawasan ini menggunakan kendaraan pribadi baik roda 4 ataupun roda 2.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kabid. Destinasi Wisata dan Industri wisata Dispora:

“Sebenarnya obyek wisata Tlatar ini merupakan obyek wisata yang sudah terkenal dan kebanyakan pengunjung adalah wisatawan lokal yang berasal dari Boyolali dan daerah sekitaran Boyolali sebagai obyek wisata yang mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat...”
(Wawancara dengan Pak Fatih pada 5 Maret 2018 pukul 10.45 WIB di Kantor Dinas Pemuda, Olahraga dan Parwisata Kabupaten Boyolali)

Aksesabilitas di Kabupaten Boyolali sebenarnya cukup strategis karena Kabupaten Boyolali dilalui oleh jalan provinsi yang menghubungkan Solo-Semarang. Kawasan Wisata Tlatar merupakan Kawasan wisata yang terletak di Jalan Tentara Pelajar 2, dukuh Tlatar, Desa Kebonbimo, Kecamatan Boyolali yang jaraknya kurang lebih 4 km dari pusat kota Boyolali.

Obyek wisata ini sangat potensial mengingat lokasinya sebagai lintasan wisata dari Solo menuju Candi Borobudur.

Hal tersebut dibenarkan oleh Pengunjung Kawasan Wisata Tlatar yang mengatakan bahwa:

“...Letaknya Kawasan Wisata Tlatar sebenarnya cukup strategis, dekat sama rumah. saya rumahnya di kota. Sering kesini tempatnya enak nyaman, bersih dan suasanaya asri. Apalagi bawa anak-anak pada seneng main air, nangkep ikan. Tapi sayangnya jalannya kurang nyaman mba.. mungkin karena lagi ada proyek itu kali ya..” (*Wawancara dengan Ibu Okta, Pengunjung dari Boyolali kota, Sabtu 31 Maret 2018 pukul 09.13 WIB di Pakecehan Ekowisata Taman Air Tlatar*)

b) Prasarana Komunikasi

Salah satu prasarana komunikasi yang masyarakat sekitar sediakan adalah kantor pos di Kawasan Wisata Tlatar. Selain itu, di Kawasan Wisata Tlatar masih dapat dijangkau oleh Jaringan telekomunikasi baik GSM dan CDMA. Seperti jaringan operator Telkomsel, Indosat, XL, dan lainnya. Sehingga pengunjung tidak perlu khawatir akan putus hubungan dengan keluarga di rumah.

c) Prasarana “utilities”

Sebagai salah satu pendukung dalam pelayanan pariwisata adalah keberadaan dari prasarana dasar. Kawasan Wisata Tlatar merupakan kawasan wisata yang menyuguhkan pemandangan sekaligus pendekatan alam, sehingga prasarana air bersih sangat dibutuhkan. Air bersih diperoleh dari sumber air yang

alami. Karena memang di Tlatar ini menjadi sumber air bersih yang dikelola oleh PDAM untuk kemudian disalurkan ke beberapa kecamatan di Boyolali. Sehingga air bersih di tlatar terangani dengan baik.

Selain itu listrik juga dibutuhkan untuk pelayanan di restoran atau rumah makan dan beberapa tempat seperti balai pertemuan yang memerlukan listrik. Di Kawasan Wisata Tlatar sudah tersedia listrik. Hal ini dikarenakan pelayanan listrik di Kabupaten Boyolali sudah merata sampai ke pelosok desa. Kebutuhan listrik di kawasan ini telah dilayani oleh PLN (Perusaan Listrik Negara).

d) Sistem Perbankan

Keberadaan dari prasarana perbankan dapat mempermudah wisatawan untuk menarik sejumlah uang dari ATM, sesuai dengan peruntukannya. Sejauh ini di Kawasan Wisata Tlatar belum ada mesin ATM. Jarak terdekat untuk menarik uang di ATM kurang lebih satu kilometer.

2) Prasarana Sosial

a) Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan merupakan prasarana penunjang pada suatu destinasi wisata. Di dalam Kawasan Wisata Tlatar sendiri belum disediakan poliklinik untuk pelayanan kesehatan bagi pengunjung. Akan tetapi bagi setiap pengunjung yang

masuk ketika membayar retribusi masuk kawasan sudah mendapat asuransi kesehatan dari Jasa Raharja yang bekerjasama dengan puskesmas terdekat. Puskesmas terdekat di Puskesmas Boyolali 3 yang terletak di Jalan tentara Pelajar kurang lebih 700 meter dari objek wisata Tlatar.

b) Faktor Keamanan

Keamanan merupakan salah satu faktor utama dalam penyelenggaraan pariwisata. Karena dapat menimbulkan rasa aman untuk wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata. Di Kawasan Wisata Tlatar telah dibangun pos polisi Rumah Kantor Kawasan Obyek Wisata Tlatar (Mahkota). Tujuannya untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas dari keberadaan obyek wisata tersebut. Sehingga terciptalah tempat wisata yang nyaman dan aman.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pengunjung:

“..disini tempatnya enak, kalo untuk keamanan, aman-aman saja saya udah dua kali datang kesini belum melihat ada ribut-ribut ada pencuri atau copet..” (*Wawancara kepada Jesika pengunjung asal Semarang pada Sabtu 31 Maret 2018 pukul 12.10 WIB di Kawasan Wisata Tlatar*)

Sedangkan untuk sarana kepariwisataan dibagi menjadi dua yakni:

a) Sarana Pokok Kepariwisata

Sarana pokok kepariwisataan merupakan sarana yang paling penting dalam pembangunan pariwisata terutama terhadap pengembangan kawasan wisata. Sarana pokok merupakan sarana

yang penting untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama ada di obyek wisata. Berbagai sarana yang telah dibangun di Kabupaten Boyolali terdapat beberapa sarana pokok berupa rumah makan atau restoran dan tempat penginapan.

1) Rumah makan atau restoran.

Di Kabupaten Boyolali teridentifikasi memiliki jenis usaha jasa makanan dan minuman di Kabupaten Boyolali.

Tabel 4.5 Identifikasi jasa makanan dan minuman di Kabupaten Boyolali

Jenis Usaha	Sub Jenis Usaha	Jumlah
Restoran	Kelas A	59
	Kelas B	93
	Kelas C	52
RumahMakan	Rumah Makan	83
	Warung Makan	139
Jasa Boga	Katering	49

Sumber: Boyolali dalam angka 2017

Melalui tabel yang disajikan tersebut diketahui bahwa di kawasan ini terdapat 6 unit rumah makan dan beberapa warung kecil. Menurut pengamatan peneliti, rumah makan di kawasan ini menyajikan berbagai jenis makanan, akan tetapi yang menjadi ciri khas adalah berbagai olahan jenis ikan segar air tawar. Pengunjung dipersilakan untuk memancing ikan sendiri karena disediakan tempat pemancingan ikan. Hasil pancingan dapat diolah ditempat atau dibawa pulang.

2) Tempat Penginapan

Hotel merupakan sarana penginapan bagi para wisatawan untuk menunjang kegiatan pariwisata. Adapun jumlah sarana hotel yang ada di Kabupaten Boyolali yang teridentifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.6 Identifikasi jenis usaha tempat penginapan di Kabupaten Boyolali

Jenis Usaha	Sub Jenis Usaha	Jumlah
Hotel	Melati 1,2	13
	Bintang 1,2,3,4,5	2
Pondok Wisata	<i>Homestay</i>	100
Motel		3

Sumber: Boyolali dalam angka 2017

Hotel yang dekat dengan kawasan wisata ini adalah Hotel Mutiara Indah yang terletak di Jalan Raya Boyolali-Semarang, Gatak, Kebontimun, Ds Kiringan, Kecamatan Boyolali.

b) Sarana Pelengkap Kepariwisataaan

Sarana pelengkap kepariwisataan sebagai sarana untuk memperlama pengunjung pada saat berwisata. Adapun beberapa sarana yang telah dibangun di Kawasan Wisata Tlatar berupa toilet, musholla, tempat aliran air yang dapat digunakan untuk *pakecehan* dan panggung hiburan.

c) Sarana Penunjang Kepariwisataaan

Sarana penunjang merupakan sarana yang diperlukan sebagai sarana pokok dan sarana pelengkap, sarana penunjang pariwisata yang

sudah dibangun di kawasan wisata adalah toko souvenir permanen dan penempatan lokasi pedagang yang tidak permanen.

d. Peningkatan aktivitas promosi wisata

Aktivitas Promosi kepariwisataan sebagai kegiatan komunikasi, yang dilakukan oleh organisasi penyelenggara pariwisata (destinasi) yang berusaha mempengaruhi khalayak pasar atau wisatawan yang merupakan tumpuan atau sasaran dari penjualan produk wisatanya. Promosi dan Pemasaran tempat wisata sangat diperlukan oleh daerah-daerah yang memiliki potensi lokal. Promosi dan Pemasaran pariwisata yang baik akan meningkatkan perkembangan objek wisata di daerahnya, baik berupa meningkatkan jumlah wisatawan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun mendorong multiplier effect bagi perekonomian di sekitarnya. Berbagai cara yang dilakukan pemerintah untuk melakukan promosi, dapat melalui berbagai forum-forum pariwisata lintas daerah. Dimana Boyolali menjadi salah satu bagian dari Karisidenan Surakarta maka tergabung dalam Java Promo. Selain itu sebagai satu sarana hasil dari pelatihan yang dilakukan dinas, yakni pariwisata yang ada di Boyolali dapat diakses melalui *Cultural Places Application*. Hal ini menjadi salah satu indikator pemasaran dan promosi pariwisata untuk bergabung dalam jaringan pemasaran wisata sebagaimana yang telah menjadi alternatif solusi pada LKJIP DISPORAPAR tahun 2017.

Adapun beberapa hal yang dilakukan pemerintah daerah untuk memasarkan pariwisata sebagaimana yang diungkapkan oleh Staf Sie Promosi DISPORAPAR bahwa:

“...promosi yang dipakai melalui *event*: kalo di tatar ada padusan dan juga pertunjukan, mengikuti pameran wisata, lewat media social dan website, famtrip berupa kerjasama dengan biro, media juga diajak ikut ketika mengunjungi suatu tempat, ada juga yang namanya travel dialog. Jadi begini, misal kalo ada kegiatan di luar boyolali berkunjung ke pelaku usaha wisata, hal tersebut sebagai sarana untuk melakukan link promosi dengan membawa *guide tour* sendiri, tak lupa juga kita sebar leaflet, pernah juga melalui siaran tv yakni tvri dan ta tv...” (Wawancara pada Pak Nunung pada 27 Maret 2018 pukul 13.15 WIB)

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sie. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata bahwa,

“...Kalau untuk promosi kita udah ada lewat event, kan kita ngejual produk, produk wisata. 2 kali dalam satu tahun juga kita targetkan untuk berada dalam forum pariwisata daerah seperti java promo. Agar wisata di Boyolali ini terangkat melalui event-event pariwisata yang diselenggarakan daerah-daerah anggota forum”. (Wawancara dengan Pak Fatih di Kantor DISPORAPAR pada 5 Maret 2018)

Berdasarkan dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Peningkatan aktivitas promosi melalui:

- a) Promosi lewat media cetak dan elektronik, strategi dan pemasaran wisata di Kabupaten Boyolali pada umumnya menggunakan media cetak dan elektronik. Media cetak berupa leaflet dan surat kabar. Sedangkan media elektronik sesuai dengan perkembangan zaman dapat melalui media social berupa instagram, website, dan sesekali melalui televisi lokal (TA TV)

dan TVRI serta pariwisata yang ada di Boyolali dapat diakses melalui *Cultural Places Application*.

- b) Famtrip, merupakan sarana yang berbentuk kerjasama dengan beberapa biro ataupun media yang diajak untuk bergabung dalam satu rute perjalanan wisata.
- c) Promosi melalui *event*, adapun beberapa event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk mempromosikan pariwisata di Boyolali yakni dengan menyelenggarakan event tahunan baik berupa pertunjukan ataupun ritual. event yang terselenggara di Kawasan Wisata Tlatar yakni berupa ritual yang berbentuk padusan menjelang bulan suci ramadhan. Hal tersebut, dipercayai pengunjung bahwa dengan padusan sebelum ramadhan dapat mensucikan diri dan lebih afdhalnya di umbul tlatar, dengan air jernih yang langsung dari sumbernya. Selain itu, event yang biasa diselenggarakan adalah dengan travel dialog, kegiatan ini berupa kegiatan yang dilakukan di luar daerah Boyolali untuk bertemu dengan pelaku-pelaku wisata yang sudah terlebih dahulu terjun dalam bisnis pariwisata kemudian dari pihak pemerintah daerah atau dinas dari Boyolali membawa beberapa *guide tour* sendiri untuk kemudian mempromosikan kembali Boyolali, hal tersebut sebagai upaya untuk membuka jalan link promosi wisata antar daerah. Kemudian pameran wisata, dimana dinas pariwisata untuk

mempromosikan pariwisata daerah mengikuti penyelenggaraan pariwisata yang diadakan baik dari pemerintah daerah provinsi, nasional ataupun internasional.

e. Keterlibatan Masyarakat

Upaya mobilisasi dalam melibatkan masyarakat dalam pengelolaan suatu pariwisata dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar wisata. Karena pada dasarnya pariwisata itu berasal dari masyarakat, masyarakat yang menjadi basis dari kegiatan wisata. Melalui adanya kegiatan pengembangan kepariwisataan maka seluruh lapisan masyarakat khususnya yang berada di area sekitar obyek wisata akan memiliki peran, baik hal tersebut melalui usaha perdagangan, penawaran jasa, pembuatan souvenir dan yang lainnya. Peran pemerintah daerah melakukan pembinaan dan sosialisai kepada masyarakat untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan.

Menurut Staf Pengembangan Pasar Pariwisata DISPORAPAR Kab Boyolali,

“pada dasarnya basis dari pariwisata adalah masyarakat, makanya upaya yang dilakukan oleh dinas adalah membuat masyarakat itu kembali sadar, misal kalo di lingkungannya ada pariwisata ya masyarakat dapat bersikap sebagai tuan rumah yang baik, ditambah dengan sekarang sudah mulai terbentuk pokdarwis. pokdarwis ini sebagai sarana rembug, penyuluhan dan sosialisasi apa apa yang harus mereka ketahui” (*Wawancara pada Pak Agus di kantor DISPORAPAR pada 27 Maret 2018*)

Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat sekitar di kawasan Tlatar adalah membuka lapangan usaha, ada yang membuka warung, menjadi tukang parker, dan kebersihan. Ketika ada event yang berlangsung, biasanya dari event tersebut banyak meninggalkan sampah. Masyarakat sekitar yang saling membahu untuk bersih-bersih. Kemudian rumah warga disekitar juga bersedia untuk dijadikan sebagai tempat parkir, karena area kawasan tempat parkir ditiadakan untuk mengantisipasi pengunjung. Sebagaimana yang disampaikan oleh petugas parkir di salah satu area kawasan Tlatar yang menyatakan bahwa,

“...kalo dulu kurang perawatan kurang kebersihan, sekarang sudah mulai ada kebersihan, di setiap area ada karyawannya masing-masing, yang jadi petugas masyarakat sekitar sini. Saya juga daerah sini, masyarakatnya paling berperan pas ada padusan mba, soalnya rumah warga jadi tempat buat parkir dan untuk kebersihan”. *(Wawancara pada Mba Tina di tempat parkir Kawasan Wisata Tlatar pada 30 Maret 2018 pukul 09.00 WIB)*

Selain dari masyarakat sekitar adapula ketelibatan dari karang taruna yang mulai berperan untuk menata dan merapikan kembali lingkungan wisata. Sehingga mulai terus ada perbaikan di Kawasan Wisata Tlatar. Seperti yang disampaikan oleh salah satu Anggota karang taruna Kebonbimo,

“....kalo sekarang karang taruna disini sudah mulai berpartisipasi di lingkungan wisata Tlatar, merapihkan menata yang berjualan baiknya di titik mana, terus kita mulai berencana untuk mengadakan berbagai acara untuk mengangkat wisata Tlatar ini mba. Ini masih rencana saja, karena Tlatar yang jadi khasnya ikan nanti missal kita mau

buat acara bakar-bakar ikan besar-besaran, sejauh ini baru itu mba...”. (Wawancara dengan Mba Ina di Kawasan Wisata Tlatar pada 30 Maret 2018 pukul 10.00 WIB)

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali telah berupaya untuk meningkatkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam objek wisata ini dengan:

- 1) Memberdayakan kegiatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dengan menggunakan sumberdaya produksi yang ada di wilayah tersebut. Tujuannya agar masyarakat sadar akan dampak dari objek-objek wisata yang ada disekitarnya. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk menyewakan lahan atau kios bagi masyarakat dalam penumbuhan ekonomi sehingga ada kegiatan yang saling mendukung dan menguntungkan.
- 2) Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihan lokasi objek wisata dengan mengadakan kerja bakti
- 3) Mengajak masyarakat setempat untuk berperan dalam menciptakan Sapta pesona (K7) yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan dan kesenangan.

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengembangan wisata Tlatar adalah dengan ikut mewujudkan Sapta Pesona, dimana peran serta ini dapat berdampak pada peningkatan jumlah wisata yang datang karena dengan adanya keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kesenangan. Sehingga

wisatawan dapat datang kembali untuk menikmati obyek wisata yang ada di Boyolali.

2. Penyelenggaraan Pariwisata Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali berdasarkan prinsip-prinsip *Good Tourism Governance*

Prinsip dari penyelenggaraan tata kelola yang baik tidak terlepas dari prinsip *good governance* yang mana pada intinya adalah adanya sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat setempat yang terkait. Demikian pula dengan Kawasan Wisata Tlatar Kabupaten Boyolali, Kawasan wisata tersebut dikelola oleh sektor pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Tata kelola pariwisata yang baik dapat dikenali dengan beberapa prinsip dalam Perspektif *Good Tourism Governance*, implementasinya sebagai berikut:

a. Partisipasi masyarakat terkait

Masyarakat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan kemudian masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikan program-program yang sudah disusun sebelumnya. Setiap masyarakat memiliki hak prioritas pada destinasi pariwisata sebagaimana yang diatur dalam Perda Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Kabupaten Boyolali Pasal 31 menyatakan bahwa:

(2) Setiap orang dan/ atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:

- a. menjadi pekerja/ buruh;
- b. konsinyasi; dan/ atau
- c. pengelola

Selain itu pada Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Kabupaten Boyolali Pasal 36 menyatakan bahwa:

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
 - b. membantu terciptanya Sapta Pesona wisata (kondisi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
 - c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.
- b. Keterlibatan segenap pemangku terkait

Para pelaku dan pemangku kepentingan yang harus terlibat secara aktif dan produktif dalam mencapai pembangunan pariwisata. Keterlibatan segenap pemangku terkait berupa keterlibatan dari pemerintah, pengusaha/ swasta dan masyarakat sekitar serta segala aspek yang berkaitan dalam rangka pembangunan kepariwisataan. Sebagaimana dalam Perda Nomor 14 tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Pariwisata di Kabupaten Boyolali Pasal 9 menyatakan bahwa:

- (2) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.

Berdasarkan LKjIP Kabupaten Dinas Koperasi dan UMKM Boyolali 2015, usaha mikro yang ada di masyarakat ada 200 pengusaha. Usaha mikro yang ada di Boyolali merupakan target untuk pengembangan berdasar pada RPJMD 2015. Dalam mendukung kegiatan usaha mikro tersebut, pemerintah melakukan kegiatan keterlibatan langsung berupa pembinaan, sosialisasi, bintek, dan pelatihan, baik secara manajemen ataupun teknik pengelolaan berdasar jenis usaha mikro tersebut. Sektor pariwisata yang menjadi unggulan Boyolali diharapkan mampu membantu mengurangi angka pengangguran dan dapat menjadi daya dukung kesejahteraan masyarakat Boyolali. Bentuk usaha mikro yang ada sebagian bersifat perorangan dan dikembangkan oleh masyarakat lokal. Usaha mikro berupa usaha kuliner, kerajinan, *handycraft* dan usaha agro.

Selain itu pada Perda Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Kabupaten Boyolali Pasal 39 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang atau badan usaha dapat menyelenggarakan kegiatan usaha daya tarik wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah
- (2) Dalam Penyelenggaraan kegiatan usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah yang besarnya sesuai dengan perjanjian kerjasama

c. Kemitraan kepemilikan lokal

Pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan kesempatan lapangan usaha yang luas untuk masyarakat setempat. Pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Boyolali melibatkan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat lokal. Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Boyolali didominasi oleh pemerintah sebesar 63 %, pengelolaan pariwisata yang dilakukan masyarakat sebesar 29%, dan pihak swasta sebagai investor dalam mengembangkan objek wisata sebesar 8% (Menurut Survey 2017 pada Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Boyolali 2017). Adapun kemitraan kepemilikan lokal dalam bentuk sumber daya manusia pengelola usaha dan industri pariwisata dijabarkan dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Boyolali seperti:

- 1) Pengelola atas nama perorangan atau badan usaha wajib mendaftarkan usaha pariwisatanya pada dinas yang terkait. Sebagaimana Kawasan Wisata Tlatar yang memiliki beberapa area, yang telah mendaftarkan usahanya.

2) Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Pada Kawasan Wisata Tlatar beberapa area dikelola pemerintah dan perorangan kemudian melibatkan juga peran masyarakat dengan tujuan untuk peningkatan keikutsertaan dan meningkatkan rasa kepemilikan lokal.

3) SDM untuk usaha transportasi di Kabupaten Boyolali masih sangat sedikit, sehingga belum ada kemitraan lokal terkait dengan transportasi pariwisata. Sehingga, hal tersebut menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Boyolali.

d. Pemanfaatan sumber daya secara berlanjut

Pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan penggunaan sumber daya yang ada. Potensi wisata yang ada di Tlatar yang berupa umbul atau sumber air merupakan potensi yang sudah ada dan turun temurun. Pemanfaatan sumberdaya pariwisata berkelanjutan tentunya dibutuhkan, karena pengembangan pariwisata mempertimbangkan kebutuhan pada saat ini dengan tidak mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya dimasa yang akan datang. Sebagaimana dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Boyolali 2017 bahwa menurut Fagence (2001) ada dua pendekatan dalam keterkaitannya dengan pariwisata terhadap

pembangunan pariwisata berkelanjutan yakni pendekatan keterkaitan horizontal dan keterkaitan vertical.

Keterkaitan horizontal kepariwisataan merupakan fasilitator terhadap berbagai program dan kebijakan yang akan dilaksanakan. Kepariwisataan merupakan komponen dari proses yang berjalan sejajar dengan bidang lain sehingga diperlukan kolektivitas. Keterkaitan vertika bertujuan untuk mencari keseimbangan penggabungan komponen-komponen penting dari aktivitas kepariwisataan dan pembangunan. Karakteristik dari hubungan vertical sebagai berikut:

- a. Kepariwisataan merupakan bagian dari pembangunan yang berfungsi sebagai bagian dari strategi dalam penyusunan kebijakan, sehingga berada di atas dan berpengaruh pada sektor lain.
- b. Elemen strategis dari perencanaan kebijakan harus mencakup penyediaan sarana dan prasarana kepariwisataan
- c. Pengembangan kepariwisataan khusus, mencakup akomodasi, dalam berbagai tipe, hotel, motel, dsb
- d. Prakiraan dampak pembangunan kepariwisataan ditinjau dari sisi ekonomi, lingkungan, social ekonmi, masyarakat lokal, budaya dan warisan
- e. Pembiayaan, pemasaran, promosi dan sistem informasi
- f. Kampanye sadar wisata bagi masyarakat

e. Mengakomodasikan aspirasi masyarakat

Aspirasi dan tujuan masyarakat harus diperhatikan guna mewujudkan hubungan yang harmonis antara pengunjung/ wisatawan dengan masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan wisata di Kawasan Wisata Tlatar dilakukan dengan menampung aspirasi masyarakat setempat. Ketika akan diadakan monitoring dan evaluasi masyarakat sekitar lingkungan wisata dikumpulkan untuk kemudian diberikan pengarahan dan diminta pendapat.

f. Daya dukung lingkungan

Keberadaan Pariwisata di Boyolali terutama wisata unggulan seperti Kawasan Wisata Tlatar diharapkan mampu membantu mengurangi angka pengangguran dan dapat menjadi daya dukung kesejahteraan masyarakat Boyolali. Karena dengan adanya kegiatan wisata di suatu lingkungan masyarakat akan berdampak pada perekonomian dan sosial masyarakat. Di kawasan Tlatar kebanyakan yang menjadi pekerja adalah masyarakat sekitar sendiri.

g. Monitor dan evaluasi program

Konsep pembangunan pariwisata yang ada di Boyolali termasuk Kawasan Wisata Tlatar berdasarkan pada *sustainable tourism* yang mana memperhatikan monitoring dan evaluasi program yang berjalan. Hal tersebut dengan adanya keteraturan perencanaan melalui

program-program Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Boyolali sebagai acuan dasar pelaksanaan pariwisata. Sehingga perencanaan akan sesuai dengan arahan pembangunan. Selain itu melalui Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2015 terkait penyelenggaraan pariwisata diharapkan menjadi dasar pengaturan pariwisata.

h. Akuntabilitas lingkungan

Perencanaan pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan komponen-komponen lingkungan yang saling berkaitan. Dimana adanya perhatian yang besar untuk memperhatikan masyarakat sekitar dalam mendapat pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan serta penerapan sapta pesona.

Selain itu memperhatikan pula pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Sebagaimana dalam Perda Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Kabupaten Boyolali Pasal 8 menyatakan bahwa:

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf a meliputi:

e. tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya

i. Pelatihan pada masyarakat terkait

Pelatihan pada masyarakat diperlukan guna mengimplementasikan program-program yang sudah dibuat. Adapaun beberapa arahan program untuk pemberdayaan masyarakat dalam kepariwisataan

sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Boyolali 2017 sebagai berikut:

- 1) Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat
 - 2) Optimalisasi pemberdayaan masyarakat
 - 3) Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal
 - 4) Penguatan kemitraan rantai usaha
 - 5) Perluasan akses pasar berbasis produk UMKM oleh masyarakat lokal
 - 6) Peningkatan akses dan dukungan permodalan UMKM bagi masyarakat lokal
 - 7) Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dalam perwujudan sapta pesona
 - 8) Peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat melalui perjalanan wisata
- j. Promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut juga membutuhkan program-program promosi dan advokasi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap dan identitas budaya masyarakat setempat secara baik. Program-program promosi yang dilakukan adalah bergabungnya dinas pariwisata pada forum Java Promo, salah satu forum untuk daerah yang sedang mengembangkan potensi daerahnya. Forum tersebut terdiri dari daerah yang ada di Solo Raya. Advokasi nilai kelolakalan menjadi suatu hal yang penting,

karena identitas dari pariwisata dapat dipertahankan dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Perda nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Kabupaten Boyolali Pasal 38 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata berkewajiban:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab
 - c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;

- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggungjawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali

Melalui fenomena dan kondisi yang ada di lapangan dalam pengembangan pariwisata tidak jauh dari adanya kendala ataupun hambatan. Dari hasil temuan penulis beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan di Kawasan Wisata Tlatar meliputi beberapa faktor pendukung dan penghambat.

a. Faktor Pendukung

1) Potensi pariwisata yang sudah ada

Potensi memiliki arti sebagai kemampuan yang ada. Potensi pariwisata berarti kemampuan pariwisata yang sudah ada dan

sudah mulai beraktivitas sebagaimana mestinya obyek wisata. Tercatat dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Boyolali tahun 2017 ada sekitar 125 destinasi yang tersebar dalam 19 kecamatan. Baik berupa jenis obyek wisata alami, buatan dan yang bersifat khusus. Kawasan Wisata Tlatar merupakan perpaduan antara Wisata Alami dan Buatan. Wisata Alami dapat dilihat melalui keberadaan umbul atau sumber air yang ada di Tlatar. Buatan dapat dilihat dari gedung-gedung, bangunan, kolam renang, *waterboom*, area *outbond* dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Destinasi Wisata dan Industri Wisata DISPORAPAR bahwa,

“...Kawasan Wisata Tlatar ini dapat disebut sebagai obyek wisata alami dan buatan. coba dilihat dari umbul atau sumber air yang memang sudah ada sejak dulu, terus sumber air dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat melihat bahwa ternyata umbul air tersebut memiliki daya tarik terhadap masyarakat, lalu banyak orang yang datang, dulu dipakainya sebagai sarana mandi, mencuci dan bermain anak-anak. Kemudian menjadi tempat wisata....”

Beliau melanjutkan bahwa,

“Sumber air yang melimpah mendorong pemerintah kemudian untuk membangun. Disamping memang ada masyarakat yang ikut serta untuk membuat rumah makan, arena bermain yang lebih lengkap lagi, jadilah seperti yang sekarang ini..” (*Wawancara kepada Pak Fateh di kantor DISPAPORA Pada 5 Maret 2018 Pukul 11.30 WIB*)

Hal tersebut sejalan dengan pendapat staf sie pemasaran wisata bahwa,

“....untuk faktor pendukungnya, Boyolali sudah memiliki tempat wisata sejak dulu, ada waduk, ada umbul. tinggal bagaimana sekarang mengelolanya saja...” (*Pada 5 Maret 2018 di kantor DISPORAPAR*)

Disamping yang menjadi potensi wisata di Boyolali adalah Wisata Air. Banyaknya potensi wisata air yang ada di Boyolali termasuk wisata Tlatar mendorong kepaduan dan satu visi untuk mengembangkan wisata yang ada. Hal tersebut menjadi faktor pendukung bagi penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Boyolali. Dengan demikian, ada keselarasan antara Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali bersama pengusaha dan masyarakat sekitar wisata untuk mengembangkan obyek wisata agar dapat memunculkan *multiplier effect* pada sosial ekonomi masyarakat setempat.

2) Adanya peran swasta

Adanya peran dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali yang bekerjasama dengan swasta merupakan salah satu faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata. Hal tersebut sebagai salah satu pilar terselenggaranya tata kelola pariwisata yang baik. Sehingga pemerintah tidak kesulitan dalam pengelola pariwisata karena terkendala sumber daya manusia ataupun modal. Keberadaan swasta akan sangat berpengaruh pada pengembangan kawasan wisata baik secara fisik ataupun non fisik. Seperti halnya di Kawasan Wisata Tlatar ini, peran swasta cukup banyak, yakni

dalam pengelolaan, perbaikan sarana dan prasarana dan penambahan fasilitas.

Sebagaimana lahan di Kawasan Tlatar ini dimiliki oleh desa, perseorangan, dan pemerintah daerah. Sehingga ada pengaturan peran yang terjadi. Baik dalam bentuk kerjasama ataupun pengelolaan individu. Kawasan Wisata Tlatar terdiri dari berbagai objek wisata, berupa Pemandian dari sumber air alami yang diberi nama Umbul Pengilon dan Umbul Asem, selain itu terdiri dari berbagai atraksi seperti Etasia (Ekowisata Taman Air Indonesia), tempat pemancingan, rumah makan, kolam renang standar nasional, *waterboom*, *outbond center*, *pakecehan*. Dimana dari persebaran atraksi tersebut dikelompokkan menjadi beberapa titik tempat yang disebut dengan Pancingan yang dikelola oleh beberapa pengelola yang berbeda.

Adapun pemancingan tersebut terdiri dari Pancingan 7 Pondok Asri menyajikan rumah makan dan pemancingan ikan. Pancingan ini dikelola secara pribadi oleh Pak Yamto, masyarakat setempat. Pancingan 5 Taman Air, menyajikan rumah makan, kolam renang dewasa dan anak-anak, ekowisata taman air Indonesia, area olahraga *woodball*, *outbond area*, pemancingan ikan, *pakecehan*, terapi ikan dan yang lainnya. Di area tersebut dikelola oleh perorangan yakni Pak Moch. Sahid

pengusaha sekaligus pemilik lahan. Pancingan 10 Sumber Rejeki, di tempat ini menyajikan rumah makan terapung dan pemancingan ikan. Di pancingan tersebut dikelola oleh Pak Wagiman, beliau menyewa tanah tersebut dari desa. Pancingan 17 Umbul Pengilon, di tempat ini memiliki umbul pemandian sumber air alami, selain itu disediakan juga rumah makan. Di tempat tersebut dikelola oleh perorangan karena lahannya milik pribadi yakni oleh Pak Norembo. Mina Tlatar Indah, di taman ini disediakan berupa gubug rumah makan, kolam renang anak dan pakecehan. Mina Tlatar Indah ini lahannya milik desa, akan tetapi disewa oleh Pak Mul untuk dikelola. Pancingan 4 Tirta Wening terdapat rumah makan apung dan tempat memancing. Pancingan tersebut merupakan lahan yang dimiliki oleh desa, akan tetapi disewakan kepada Pak Larso sebagai pengelola. Kolam Renang Berstandar Nasional, di tempat ini terdapat kolam renang berstandar nasional, area *outbond*, *spot* foto berupa gembok cinta. Di area ini lahan dimiliki oleh pemda kemudian dikelola oleh perorangan yakni Pak Dwi. Karunia *Outbond Center*, di tempat ini terdapat rumah makan, area *outbond*, kolam renang dan *waterboom*. Di area ini merupakan milik dinas dan kemudian disewakan kepada perorangan yakni pada Pak Sucipto.

Kawasan Wisata Tlatar merupakan obyek wisata yang terdiri dari beberapa pancingan, ketika masuk ke kawasan wisatawan harus membayar retribusi masuk kendaraan Rp 1000, retribusi masuk obyek wisata untuk: hari biasa Rp 2000, hari padusan dan syawalan Rp 3000, natal dan tahun baru Rp 3.000, kebersihan Rp 200, kemudian untuk asuransi keselamatan Rp 200. Jadi pengunjung untuk hari biasa dikenakan sekitar Rp 3400. Untuk memasuki Kawasan Wisata Tlatar ada 3 pintu masuk utama, yang ketiganya dikelola oleh PT Aneka Karya, yang telah bekerjasama dengan dinas untuk mengelola retribusi masuk.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ka. Bidang Destinasi Wisata dan Industri Pariwisata bahwa,

“...sekarang ini udah ga ada lagi namanya pns, pegawainya dinas narikin karcis di loket pintu masuk. Alhamdulillah kabupaten Boyolali sekarang banyak obyek wisata yang dikelola oleh perorangan. Termasuk wisata tlatar ini, untuk pengelolaan retribusi masuknya itu udah kerjasama dengan aneka karya. Ada *mou* nya yang udah ada kesepahamannya” (*Wawancara pada Pak Fateh di kantor DISPORAPAR pada 27 Maret 2018 pukul 11.15 WIB*)

Hal tersebut didukung dengan salah satu pendapat dari pengelola di salah satu area kawasan wisata,

“...saya memakai lahan untuk kegunaan usaha outbond, yang karunia *outbond center* itu mba. Lahan itu kan asetnya pemda, jadi ada semacam kontrak perjanjian kerja sama per tahunan, saya kerja sama dalam bentuk pengelolaan/ pemanfaatan lahan outbond di obyek wisata. Saya sewa per tahunnya, trus untuk tahun selanjutnya dinaikkan 10%. Kewajiban saya menanggung beban biaya operasional

seperti pemeliharaan, kebersihan, pakjak listrik, air dll".
(Wawancara kepada pak Sucipto pada 5 April 2018)

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan pengusaha dapat menjadi faktor pendukung dalam pengembangan kawasan wisata karena, berbagai fasilitas dan keaneragaman pilihan wisata bertambah dan tidak pemerintah tidak perlu mengeluarkan modal yang banyak.

3) Antusias dari masyarakat mulai muncul

Antusias masyarakat lokal akan potensi pariwisata di daerah merupakan faktor pendukung dalam pengembangan sebuah wisata. Karena pariwisata berawal dari masyarakat dan akan kembali pada masyarakat. Pada awalnya hanya sebagian masyarakat yang peduli dengan keberadaan obyek wisata ini. Namun, seiring berjalannya waktu dengan sosialisasi di berbagai tingkatan dari Karang taruna, RW dan Desa akhirnya masyarakat mulai menyadari akan pentingnya dalam berpartisipasi atas pengembangan wisata ini. Bentuk antusias masyarakat terhadap wisata ini tidak lain ditunjukkan melalui masyarakat sekitar yang memiliki rumah beririsan dengan kawasan wisata ini mulai menyadari bagaimana menciptakan peluang dengan berbagai usaha seperti berdagang, membuka warung makan atau minuman ringan, kemudian masyarakat mulai mengerti bagaimana cara bersikap ketika ada pengunjung

datang, kerapian tempat tinggal, menyediakan sarana seperti toilet. Selain itu antusiasme dari masyarakat lokal dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam mempromosikan Kawasan Wisata Tlatar baik melalui social media, website, artikel ataupun dari mulut ke mulut.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh wisatawan yang berkunjung,

“...Tlatar ini bagus mba nuansa di taman airnya seperti alami. Saya tau Tlatar dari temen saya yang merekomendasikan, kalau ke Boyolali mampir ke wisata Tlatar.” (*Wawancara kepada Josep Martina, Pengunjung asal Semarang pada 31 Maret 2018 pukul 10.13 WIB*)

Hal tersebut sejalan dengan pengunjung yang lain,

“...lihat teman-teman saya yang di facebook, yang suka ngepost foto bersama keluarga lagi jalan jalan di tlatar, jadi penasaran dengan tempatnya” (*Wawancara dengan Ibu Okta pada 31 Maret 2018*)

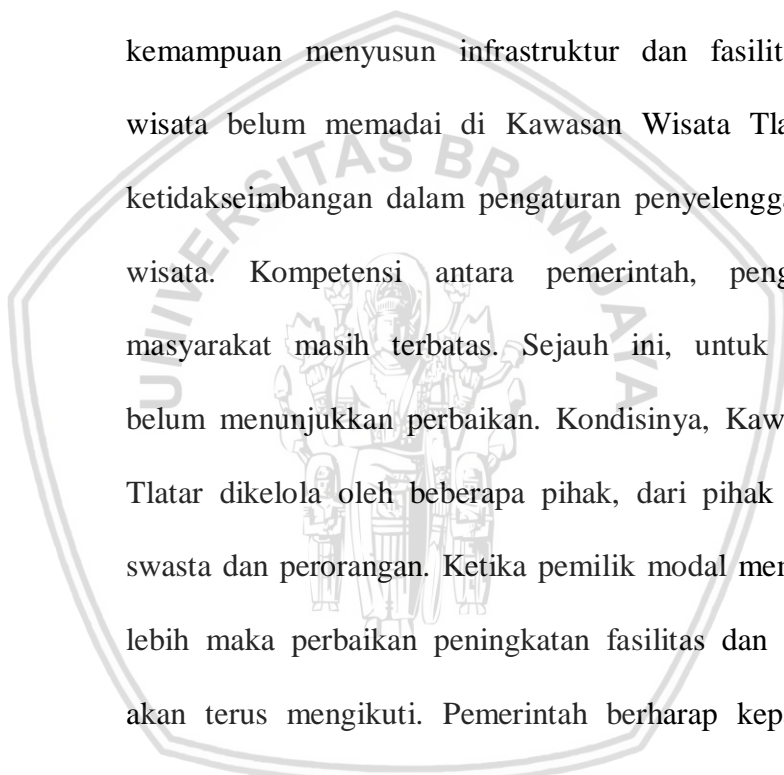
Melalui beberapa penemuan tersebut, antusias masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan promosi pariwisata menjadi salah satu pendukung dari pengembangan wisata Tlatar karena dapat meningkatkan pengunjung.

b. Faktor Penghambat

- 1) Ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan dalam menyusun infrastruktur dan fasilitas destinasi belum memadai

Keberhasilan dari pengembangan obyek wisata tidak terlepas dari sumber daya yang ada. Baik dari sumber daya

manusia yang berupa aparatur pemerintah, aparatur pengelola ataupun masyarakat setempat. Keberadaan sumber daya manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam manajemen pariwisata. Kualitas sumber daya manusia akan berpengaruh dalam peningkatan pembangunan pariwisata, dimana pariwisata sebagai potensi daerah dapat berdaya saing. Dalam hal ini, ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan menyusun infrastruktur dan fasilitas destinasi wisata belum memadai di Kawasan Wisata Tlatar. Terjadi ketidakseimbangan dalam pengaturan penyelenggaraan obyek wisata. Kompetensi antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat masih terbatas. Sejauh ini, untuk pengelolaan belum menunjukkan perbaikan. Kondisinya, Kawasan Wisata Tlatar dikelola oleh beberapa pihak, dari pihak Pemerintah, swasta dan perorangan. Ketika pemilik modal memiliki modal lebih maka perbaikan peningkatan fasilitas dan infrastruktur akan terus mengikuti. Pemerintah berharap kepada pemilik modal untuk mengembangkan usahanya. Disamping kemampuan dan tenaga kerja masih terbatas, baik dari aparatur, masyarakat ataupun pengelola wisata. Hal ini dapat dilihat dari jenjang pendidikan sumber daya aparatur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali.



Tabel 4. 4 Jenjang pendidikan sumberdaya aparatur dinas

Jenjang Pendidikan Terakhir	Jumlah
S2	5
S1	17
D-III	3
SMA Sederajat	23
SMP	5
SD	6

Sumber: Sekretariat DISPORAPAR, 2018

Hal tersebut didukung dengan pendapat Staf seksi

Pengembangan pasar pariwisata bahwa,

“...yang menjadi penghambat dalam pengembangan pariwisata di Tlatar itu salah satunya terbatasnya sumber daya dan kemampuan dalam menyusun infrastruktur dan fasilitas destinasi, kita masih belum ada orang-orang yang mampu untuk melakukan hal tersebut. Sekarang obyek wisata yang ada di Boyolali banyak berjalan atas pengelolaan pihak ketiga. Ketika mereka memiliki modal, berkembanglah pula usaha wisatanya. Akan tetapi belum seperti yang diharapkan....”

Beliau menambahkan,

“...ya hal ini lah yang menjadi kelemahan sekaligus penghambat agar wisata Boyolali semakin maju. Maka dari itu, kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM kita, melalui kunjungan pada daerah yang telah memiliki kemajuan dalam mengembangkan potensi pariwisata daerahnya.” (*Wawancara dengan Pak Agus di Kantor DISPORAPAR pada 27 Maret 2018 pukul 13.30 WIB*)

Sejalan dengan pendapat tersebut, Staf Bidang Pemasaran

dan kelembagaan pariwisata menambahkan,

“untuk pengembangan pariwisata ini memang yang pasti menjadi kendala dari sumber daya manusianya. Hal yang simpelnya begini, yang ada di dinas pariwisata tidak semuanya memiliki disiplin ilmu keterkaitan, sehingga untuk meningkatkan kemampuan jadi dibuatlah kegiatan berupa pelatihan tentang kepariwisataan yang tujuannya

meningkatkan kapasitas aparatur. Begitupun dengan masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda yang belum mengerti betul terkait dengan program pembangunan oleh pemerintah, sehingga hal tersebut menjadi penghambat”. (*Wawancara dengan Pak Nunung di Kantor DISPORAPAR pada tanggal 27 Maret 2018 pukul 13.40 WIB*)

Pendapat lain yang masih berkaitan dari Ka. Bidang Destinasi Wisata dan Industri Pariwisata bahwa,

“....berkaitan dengan pelaku usaha, mereka akan membangun fasilitas manakala mereka mampu. Karena dinas perannya untuk manajemen saja”. (*Wawancara dengan Pak Fatih di Kantor DISPORAPAR pada 5 Maret 2018 pukul 10.00 WIB*)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia masih menjadi penghambat dalam pengelolaan pariwisata, sehingga perlu ada upaya dalam manajemen SDM agar memiliki kompetensi dan cepat beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan jaman. Sehingga memiliki kompetensi dalam mengelola pariwisata.

2) Manajemen pariwisata dan pengelolaannya belum terintegrasi

Manajemen pariwisata di Kawasan Tlatar dan pengelolaannya belum terintegrasi. Hal ini dilihat dari fasilitas wisata yang ada di Kawasan Wisata Tlatar untuk objek wisata belum menjadi rangkaian objek wisata. Ketika memasuki Kawasan Wisata Tlatar dipungut biaya, kemudian ketika nanti memasuki salah satu area pancingan dipungut biaya lagi baik untuk biaya parkir ataupun biaya tiket masuk. Sehingga

keterpaduan *stakeholder* masih terbatas. Karena pengelolaannya masih bersifat individual. Perawatan di area wisata diserahkan pada pengelola masing-masing, Belum sampai pada rasa kepemilikan bersama.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ka. Bidang Destinasi dan Industri Wisata bahwa,

“...salah satu penghambatnya ini yak arena pengelolanya tiap tempat di Tlatar berbeda-beda jadi cenderung individual, kalo ada pekerjaan perbaikan infrastruktur yang harusnya dikerjakan bersama-sama, beberapa masih pilih-pilih, selain itu masih tunggu-tungguan belum ada inisiatif untuk memperbaiki lebih awal...”. *(Wawancara dengan Pak Fatih di Kantor DISPORAPAR pada 27 Maret 2018 Pukul 11.00 WIB)*

Selain hal itu, adapun pendapat dari pengunjung bahwa,

“...sebenarnya wisata di Tlatar ini bagus lho mba tapi ya menurut saya mahal, masuk udah bayar, parkir bayar lagi, nanti ke kolam renang masuk bayar lagi, kalo mau makan ke pancingan masuk bayar lagi, tak kira sekali masuk untuk keseluruhannya...”. *(Wawancara dengan Mbak Fiani pengunjung dari Boyolali pada 31 Maret 2018 pukul 09.13 WIB)*

Selain itu, seringkali terjadi kesalahpahaman diantara masyarakat karena minimnya transparansi. Seperti yang diungkapkan oleh Staf Pengembangan Pasar Pariwisata bahwa,

“...yang jadi penghambat ini juga karena kurangnya transparansi di masyarakatnya, struktural yang ada di bawah. Misalnya saja, terkait dengan jalan. Masih ada kecenderungan masyarakat yang menyalahkan keberadaan wisata karena jalan depan rumahnya rusak tapi tidak kunjung diperbaiki...”. *(Wawancara dengan Pak Agus di Kantor DISPORAPAR pada 27 Maret 2018 pukul 14.00 WIB)*

Melalui data diatas disimpulkan bahwa manajemen pariwisata dan pengelolaanya yang belum terintegrasi menjadi faktor penghambat dalam pengembangan wisata Tlatar karena belum ada keterpaduan antara pengelola usaha sehingga berdampak pada pengunjung yang memiliki keluhan.

3) Promosi yang belum maksimal

Promosi yang belum maksimal menjadi salah satu penghambat dari pengembangan wisata di Tlatar, karena di Boyolali baru ada semacam badan promosi tetapi belum gencar dalam mempromosikan produk wisata, selain itu pula belum banyak komunitas perjalanan wisata. Kemudian pembinaan kelompok tersebut masih rendah.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Staf Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata bahwa,

“metode kita promosi sebenarnya juga sudah banyak lewat leaflet, kalender event, karang taruna. Akan tetapi masih menjadi kendala. Tentunya dalam mempromosikan wisata tidak hanya menjadi tugas dari dinas saja. Lewat badan promosi, pokdarwis, asosiasi wisata yang saat ini belum optimal”.
(Wawancara dengan Pak Nunung di Kantor DISPORAPAR pada 27 Maret 2018 pukul 13.50 WIB)

Hal tersebut sejalan dengan masyarakat yang menjadi petugas parkir,

“.. harapan untuk wisata di Tlatar itu tentang promosinya mba, agar mengangkat kembali wisata di kawasan Tlatar ini. Soalnya Tlatar diketahuinya kebanyakan orang-orang lokal saja. Petunjuk jalan juga kurang jelas” (Wawancara dengan petugas parkir mba Tina pada 31 Maret 2018)

Melalui data yang disajikan dapat disimpulkan bahwa promosi masih menjadi faktor penghambat dalam pengembangan wisata Tlatar sehingga perlu ditingkatkan perencanaan dan penyelenggaraannya kembali agar sesuai dengan pasarnya. Meskipun di satu sisi pengunjung Kawasan Wisata Tlatar paling banyak pengunjungnya dibanding tempat wisata yang lain, diperlukan kematangan konsep promosi tersendiri untuk mendorong peningkatan pengunjung kemudian berdampak pada inovasi obyek wisata dan sosial masyarakat setempat.

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali, meliputi:

a. Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata Kawasan Wisata Tlatar

Kondisi dari suatu obyek wisata akan menentukan minat para wisatawan untuk mengunjunginya. Semakin baik kondisi obyek wisata, maka akan menarik minat wisatawan. Jika kondisinya terkesan tidak cukup baik maka akan menyebabkan wisatawan enggan berkunjung. Maka pengembangan atraksi dan daya tarik wisata diperlukan karena atraksi merupakan daya tarik yang akan melahirkan motivasi dan keinginan bagi wisatawan untuk mengunjungi destinasi tadi. Oleh karena itu, suatu obyek wisata

harus memperhatikan berbagai unsur keindahan, kebersihan, kenyamanan yang dapat menimbulkan rasa senang.

Melalui data-data yang disajikan, dapat diketahui bahwa ODTW di Kabupaten Boyolali terbagi kedalam tiga jenis yakni; Alam (*natural attractions*), budaya (*cultural attractions*), dan yang bersifat khusus (*special types of attractions*). Kawasan Wisata Tlatar mencakup 3 karakteristik dari ODTW, ada yang sebagian alamiah yakni berupa umbul air dan taman-taman yang memiliki nuansa alamiah, kemudian budaya seperti kegiatannya yang biasanya menjadi tradisi yakni ketika menjelang bulan puasa dan ketika 1 Muharam. Selanjutnya buatan, hal ini terkait dengan keberadaan pendopo-pendopo yang berada di Kawasan Wisata Tlatar, Kolam renang nasional, area *outbond*, dan beberapa bangunan yang lainnya. Hal itulah yang menciptakan daya tarik sendiri di Kawasan Wisata Tlatar baik dari segi Sumber-sumber alam, hiburan, etnitas dan budaya. Kawasan Wisata Tlatar merupakan wisata potensial untuk dikembangkan, mengingat lokasinya yang sangat strategis, dimana merupakan lintasan wisata dari wisata kota budaya Surakarta menuju Candi Borobudur. Dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali sebagai yang berwenang dalam manajemen dan fasilitator pengelolaan pariwisata yang ada di Boyolali. Maka dari itu, dinas tersebut terus berupaya dalam

mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Boyolali termasuk Kawasan Wisata Tlatar.

Dari data-data yang telah disajikan terlihat bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan objek dan daya tarik wisata menurut Rencana Induk Pengembangan Pariwisata daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Tata kelola wisata air untuk kegiatan atraksi dan permainan olahraga air
- 2) Lokasi pengembangan wisata kuliner dan cinderamata
- 3) Pengembangan dan *event* olahraga tradisional dengan menggunakan woodballs
- 4) Pengembangan dan pembangunan untuk kolam renang bertaraf internasional sebagai wisata dan olahraga renang
- 5) Pembangunan untuk kegiatan wisata pertunjukan music dan kesenian berskala internasional dalam paket MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*)
- 6) Pembangunan ruang terbuka hijau dan fasilitas stadion untuk berbagai macam kegiatan olahraga.

Kawasan Wisata Tlatar merupakan suatu objek wisata yang menggabungkan antara air dan indahnya panorama alam yang terkesan alami. Kawasan Wisata Tlatar merupakan kawasan wisata yang terdiri atas beberapa area wisata yang disebut dengan pancingan. Wisata utama di kawasan ini adalah wisata air, karena

memiliki sumber air atau umbul yang alami. Hal inilah yang menjadi daya tarik masyarakat untuk berwisata. Selain itu, Kawasan Wisata Tlatar memiliki air yang melimpah dimanfaatkan oleh pengelola untuk budidaya ikan dan dapat dijadikan sebagai tempat untuk memancing. Bagi masyarakat yang memiliki hoby memancing banyak yang berkunjung kesini. Karena hasil tangkapannya bisa dibawa pulang atau dimasak di tempat. Maka dari itu, dari beberapa pancingan yang ada di Kawasan Wisata Tlatar, sebagai kulinernya aneka jenis olahan ikan menjadi menu andalan utama rumah makan tersebut. Kuliner, air dan panorama merupakan daya tarik wisata bagi wisatawan, dimana respon wisatawan sangat baik sehingga banyak pengunjung, baik dari masyarakat Boyolali ataupun daerah sekitarnya.

Berbagai rencana untuk mengembangkan Kawasan Wisata Tlatar telah siap dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Boyolali. Pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Boyolali terus berupaya untuk meningkatkan obyek dan daya tarik wisata di Kawasan Tlatar dengan melibatkan peran swasta dalam memperbaiki fisik obyek dan daya tarik wisata. Disamping itu koordinasi dengan para pelaku usaha wisata Kawasan Tlatar terus berjalan agar pengembangan Kawasan Wisata Tlatar dapat bersinergis satu sama lain.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Karena pada setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia untuk yang mengerakkannya. Pengembangan SDM berkaitan dengan pengembangan potensi yang ada dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk social yang adaptif dan tranformativ yang manakala mampu mengelola dirinya beserta seluruh potensi yang dimiliki menuju kesejahteraan di bidang Kepariwisata (Sunaryo, 2013: 200).

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dan strategis bagi tercapainya keberhasilan pembangunan sektor kepariwisataan suatu bangsa. salah satu komponen SDM adalah pemerintah dan masyarakat, masyarakat yang kuat dan berkompeten akan mendukung peningkatan pembangunan khususnya di bidang kepariwisataan. Melalui data yang disajikan adapapun beberapa bentuk pengembangan SDM yang tengah dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah terkait yakni dari dinas pariwisata telah mengupayakan pelatihan pada SDM aparatur, salah satu kegiatannya tentang penggunaan teknologi informasi untuk promosi pariwisata. Salah satu bentuk pengembangan promosi yang dilakukan adalah dengan pemanfaatan *Cultural Place Application* yang dapat di download di *Appstore* pada *google*

- 2) Melalui pembentukan RUSTAB (Rukun Usaha Taman Air Boyolali) sebagai sarana penampungan keluhan kesah beserta evaluasi pedagang setiap satu bulan sekali. Komunitas ini terbentuk sekitar tahun 2015 sebagai wujud kesadaran para pedagang terhadap lingkungan sekitar Kawasan Wisata Tlatar. Melalui RUSTAB, pedagang yang berjualan di sekitar kawasan wisata terkontrol karena diberlakukan pemakaian seragam berupa baju batik dan *id card*. Kemudian diberlakukan penjadwalan berdagang pada area titik tertentu agar tidak ada persaingan yang serius dalam berjualan.
- 3) Memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap Kelompok Sadar Pariwisata (POKDARWIS). Kelompok ini merupakan komunitas yang terbentuk dari masyarakat yang peka terhadap lingkungannya berupa kehadiran wisata di sekitarnya. POKDARWIS di Kabupaten Boyolali dinamakan POKDARWIS Mawar Biru yang mana pada tahun 2018 ini terdiri 17 kelompok di daerah-daerah wisata. Kegiatan yang dilakukan biasanya perkumpulan satu bulan sekali ketika ada suatu informasi yang perlu diterima oleh POKDARWIS. Selain itu juga diadakannya pelatihan-pelatihan tertentu guna meningkatkan kemampuan, ketrampilan maupun dalam penguasaan sumber-sumber daya yang ada. Pembinaan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali. Akan

tetapi temuan kondisi di lapangan pembinaan yang ada belum terencana secara menyeluruh.

- 4) Pengembangan SDM masyarakat sekitar dengan cara melibatkan masyarakat dalam setiap aktivitas promosi. Misal ketika ada pameran wisata yang digelar di beberapa kota besar.
- 5) Pengembangan SDM yang dilakukan selanjutnya adalah dengan memberikan edukasi pada masyarakat sekitar kawasan wisata agar dapat lebih memahami bagaimana melayani pengunjung, cara berpenampilan yang baik, mengkondisikan kerapihan lingkungan rumah yang berdekatan dengan kawasan wisata, dan pelajaran-pelajaran positif yang lainnya.
- 6) Pengembangan SDM untuk pelaku usaha saat ini belum berjalan karena belum terbentuknya kelembagaan yang mewadahi.

Menurut pengamatan peneliti pengembangan SDM pariwisata di Kabupaten Boyolali cukup baik. Terlihat dari upaya pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada SDM aparaturnya. Pembinaan kepada POKDARWIS perlu ditingkatkan lagi frekuensinya, jika perlu direncanakan secara matang, tidak sekedar berorientasi untuk meningkatkan jumlah kelompok yang terbentuk saja. Selain itu perlu juga sesekali untuk turun ke lapangan dalam agenda kontroling terhadap komunitas-komunitas sadar wisata yang lain. Masyarakat sekitar yang pedagang sudah memiliki inisiatif untuk membentuk RUSTAB, selanjutnya peran pemerintah

untuk melibatkan komunitas-komunitas terkait dalam program-program pembinaan. Sehingga dampak dari pengembangan SDM dapat dirasakan oleh beberapa kalangan yang lain. Di sisi lain, pengembangan SDM untuk para pelaku wisata masih belum berjalan karena belum terbentuknya kelembagaan yang mewadahi.

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas yang dapat meningkatkan proses perekonomian manusia sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Pariwisata harus didukung oleh berbagai komponen yakni berupa sarana dan prasarana. Keberadaannya harus ditunjang dari *something to see* yaitu segala sesuatu yang dapat dilihat pada objek wisata, *something to do* yaitu segala sesuatu dapat dilakukan di objek wisata, dan *something to buy* yaitu segala sesuatu yang dapat dibeli seperti souvenir, makanan dan minuman pada lokasi tersebut. Disamping itu, dengan banyaknya sarana prasarana yang disediakan akan menjadi salah satu pertimbangan wisatawan untuk berkunjung. Sebagaimana dengan Kawasan Wisata Tlatar yang bekerjasama dengan berbagai pihak atau *stakeholder* untuk menunjang pengembangan sarana dan prasarana di Kawasan Wisata Tlatar, yakni berupa:

1) Sarana Kepariwisataaan

a) Sarana Pokok Kepariwisataaan

Keberadaan sarana pokok sangat penting untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Keberadaan sarana pokok menentukan keberhasilan dari daerah tujuan wisata. Adapun yang menjadi sarana pokok pariwisata adalah tempat penginapan dan rumah makan. Penginapan di Boyolali menurut data teridentifikasi Hotel Melati 1,2 sejumlah 13 dan Bintang 1,2,3,4,5 sejumlah 2 unit. Pondok wisata berupa homestay berjumlah 100 dan motel ada 3 unit. Hotel yang paling dekat dengan Kawasan Wisata Tlatar adalah Hotel Mutiara Indah yang terletak di Jalan Raya Boyolali-Semarang.

Restoran di Boyolali terdiri dari kelas A sejumlah 59, kelas B sejumlah 93 dan kelas C sejumlah 52. Rumah makan sejumlah 83 dan warung makan sebanyak 139. Serta catering sejumlah 49. di Kawasan Wisata Tlatar terdapat 6 Rumah makan dan beberpaa warung makan. Rumah makan di Kawasan Wisata Tlatar menggunakan olahan ikan sebagai menu andalan. Rumah makan tersebut dikelola oleh pengusaha perorangan milik warga Boyolali.

Rumah makan di Kawasan Wisata Tlatar ini sangat memperhatikan harga, kebersihan dan penampilan. Keberadaan dari RUSTAB menjadi salah satu perkumpulan untuk menciptakan kerukunan dan mengarahkan untuk

bersikap ramah dan informative terhadap pengunjung. Sehingga hal tersebut dapat mendorong pengunjung untuk membeli makanan di Kawasan Wisata Tlatar.

b) Sarana Pelengkap Kepariwisataa

Keberadaan sarana pelengkap sebagai sarana untuk memperlama wisatawan berada di tempat wisata. Dari data yang disajikan dapat diketahui bahwa pelaku usaha dan masyarakat setempat di Kawasan Wisata Tlatar menyediakan berbagai fasilitas pelengkap wisata seperti halnya toilet, musholla, aliran air *pakecehan* dan panggung hiburan. Sarana pelengkap wisata yang terdapat dalam objek sudah baik, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi perawatan dan keindahannya. Terutama kebersihan mushalla dan toilet.

c) Sarana Penunjang Kepariwisataa

Sarana penunjang merupakan sarana setelah sarana pokok dan sarana pelengkap. Keberadaan sarana dan prasarana diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Kunjungan dari wisatawan yang semakin meningkat akan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat, untuk membuka lapangan usaha di sekitar Kawasan Wisata Tlatar.

2) Prasarana Kepariwisataaan

Prasarana kepariwisataan sangat diperlukan agar kebutuhan wisatawan saat berkunjung ke destinasi wisata terpenuhi. Prasarana merupakan segala fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan yang ada dan dapat berkembang serta dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan dalam memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam.

a) Prasarana Perekonomian

Prasarana perekonomian terdiri dari transportasi, komunikasi, *utilities* (air dan listrik) dan sistem perbankan. Transportasi merupakan moda utama untuk menuju destinasi wisata. Sesuai dengan data yang disajikan, transportasi untuk menuju Kawasan Wisata Tlatar dapat dinilai cukup. Karena untuk menuju ke tempat tujuan disediakan angkutan umum pedesaan, akan tetapi armadanya masih sedikit. Kebanyakan pengunjung menggunakan kendaraan pribadi. Letak dari Kawasan Wisata Tlatar cukup strategis. Kawasan Wisata Tlatar terletak di Jalan Tentara Pelajar 2, dukuh Tlatar, Desa Kebonbimo, Kecamatan Boyolali yang jaraknya kurang lebih 4 km dari pusat kota Boyolali. Obyek wisata ini sangat potensial mengingat lokasinya sebagai lintasan wisata dari Solo menuju Candi Borobudur. Akan tetapi belum semua jalan sudah diaspal dengan baik. Dengan kondisi jalan yang

demikian akan memberikan kesan yang kurang positif bagi perkembangan wisata daerah.

Terkait dengan jaringan komunikasi, air dan listrik dinilai sudah baik, karena sudah membantu wisatawan dalam beraktivitas di tempat wisata. Sedangkan untuk keperluan perbankan, masih belum memenuhi karena letak ATM masih jauh dari tempat wisata.

b) Prasarana Sosial

Prasarana social terdiri dari pelayanan kesehatan dan keamanan. Pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan terdekat dari Objek Wisata Tlatar yakni Puskesmas Boyolali 3 yang letaknya kurang lebih 700 meter dari tempat wisata. Selain itu ketika wisatawan memasuki kawasan Tlatar, pengunjung telah membayar premi asuransi kesehatan. Keamanan di Kawasan Wisata Tlatar didukung dengan dibangunnya pos polisi Rumah Kantor Kawasan Obyek Wisata Tlatar (Mahkota) untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas wisata. Selain itu masyarakat juga ikut berperan dalam menjaga keamanan, ketertiban di tempat wisata.

d. Peningkatan aktivitas promosi wisata

Aktivitas promosi merupakan kegiatan komunikasi yang penting dalam memperkenalkan penyelenggara pariwisata terhadap khalayak. Promosi yang baik akan berakibat pada kesan dan

ketertarikan masyarakat untuk mengunjungi tempat wisata. Dari data yang disajikan, pemerintah daerah telah berupaya untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Boyolali. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah daerah untuk memasarkan pariwisata di Kabupaten Boyolali meliputi:

- a) Promosi lewat media cetak dan elektronik, strategi dan pemasaran wisata di Kabupaten Boyolali pada umumnya menggunakan media cetak dan elektronik. Media cetak berupa leaflet dan surat kabar. Sedangkan media elektronik sesuai dengan perkembangan zaman dapat melalui media social berupa instagram, website, dan sesekali melalui televisi lokal (TA TV) dan TVRI serta pariwisata yang ada di Boyolali dapat diakses melalui *Cultural Places Application*.
- b) Famtrip, merupakan sarana yang berbentuk kerjasama dengan beberapa biro ataupun media yang diajak untuk bergabung dalam satu rute perjalanan wisata.
- c) Promosi melalui *event*, adapun beberapa event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk mempromosikan pariwisata di Boyolali yakni dengan menyelenggarakan event tahunan baik berupa pertunjukan ataupun ritual. event yang terselenggara di Kawasan Wisata Tlatar yakni berupa ritual yang berbentuk padusan menjelang bulan suci ramadhan. Hal tersebut, dipercayai pengunjung bahwa dengan padusan sebelum

ramadhan dapat mensucikan diri dan lebih afdhalnya di umbul tlatar, dengan air jernih yang langsung dari sumbernya. Selain itu, event yang biasa diselenggarakan adalah dengan travel dialog, kegiatan ini berupa kegiatan yang dilakukan di luar daerah Boyolali untuk bertemu dengan pelaku-pelaku wisata yang sudah terlebih dahulu terjun dalam bisnis pariwisata kemudian dari pihak pemerintah daerah atau dinas dari Boyolali membawa beberapa *guide tour* sendiri untuk kemudian mempromosikan kembali Boyolali, hal tersebut sebagai upaya untuk membuka jalan link promosi wisata antar daerah. Kemudian pameran wisata, dimana dinas pariwisata untuk mempromosikan pariwisata daerah mengikuti penyelenggaraan pariwisata yang diadakan baik dari pemerintah daerah provinsi, nasional ataupun internasional.

Berdasarkan data tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tingkat promosi di pariwisata yang dilakukan sudah cukup baik, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi frekuensinya dan intensitasnya. Bergabung dalam satu forum sudah baik, akan tetapi perlu dipertimbangkan kembali bagaimana tingkat kebutuhan setiap daerah dalam memasarkan wisatanya. Selain itu, pemerintah mulai mengajak komunitas yang ada di masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pariwisata yang diadakan baik di dalam daerah ataupun luar daerah.

e. Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu pilar dalam penyelenggaraan tata kelola pariwisata yang baik. Keterlibatan masyarakat menjadi fokus yang penting untuk mengembangkan obyek wisata. Karena pariwisata berasal dari masyarakat dan kemudian kembali pada masyarakat. Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar ini, pemerintah melibatkan masyarakat dan pengusaha. Hal ini guna mempercepat perbaikan yang ada di Kawasan Wisata Tlatar.

Pengembangan wisata akan berhasil apabila ada kerjasama yang baik antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat setempat. Terutama pada masyarakat sekitar kawasan wisata, hal tersebut karena mereka menjadi salah satu pemain kunci dalam pengembangan wisata. Maka dari itu, sangat diperlukan partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat karena pada akhirnya dampak yang akan diperoleh akan kembali pada masyarakat sendiri. Sebagaimana sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 4 bahwa salah satu tujuan keparwisataan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Melalui data yang telah disajikan bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan bidang pariwisata. Pihak DISPORAPAR menekankan pada aspek partisipasi masyarakat sekitar objek wisata ini untuk mendorong mencapai tujuan dan bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Sehingga melalui partisipasi masyarakat ini harus

ditekankan kepada masyarakat agar benar-benar menikmati hasil pembangunan obyek wisata yang ada. Upaya untuk meningkatkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam objek wisata ini dengan:

- 1) Memberdayakan kegiatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dengan menggunakan sumberdaya produksi yang ada di wilayah tersebut. Tujuannya agar masyarakat sadar akan dampak dari objek-objek wisata yang ada disekitarnya. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk menyewakan lahan atau kios bagi masyarakat dalam penumbuhan ekonomi sehingga ada kegiatan yang saling mendukung dan menguntungkan.
- 2) Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihan lokasi objek wisata dengan mengadakan kerja bakti
- 3) Mengajak masyarakat setempat untuk berperan dalam menciptakan Sapta pesona (K7) yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan dan kesenangan.

Melalui data yang disajikan, keterlibatan masyarakat cukup baik. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai bentuk baik dalam turut serta menjaga kebersihan, keamanan, dan kerapihan. Karang taruna sekitar kawasan wisata juga sudah mulai mencoba untuk menata dan merapikan kembali kawasan wisata serta mulai

mengambil peran dalam pengembangan Kawasan Wisata Tlatar dengan berbagai cara dan bentuk.

2. Penyelenggaraan Pariwisata Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali berdasarkan prinsip-prinsip *Good Tourism Governance*

Berdasarkan data yang disajikan penulis ingin menganalisis dan medeskripsikan prinsi-prinsip *Good Tourism Governance* dalam tubuh kepariwisataan yang ada di Kabupaten Boyolali khususnya pada Kawasan Wisata Tlatar.

a. Partisipasi masyarakat terkait

Berdasarkan data yang disajikan prinsip partisipasi masyarakat telah diterapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Kabupaten Boyolali. Dimana masyarakat diberikan hak prioritas ketika berada di sekitar destinasi pariwisata berupa; menjadi pekerja atau buruh, konsiyasi ataupun pengelola. Selain itu masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan daya tarik wisata, membantu terciptanya sapta pesona wisata serta untuk berperilaku santun sesuai dengan norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

b. Keterlibatan segenap pemangku kepentingan

Berdasarkan data yang disajikan prinsip keterlibatan segenap pemangku kepentingan sudah diterapkan. Dimana dalam pengelolaan wisata Tlatar contohnya dikelola oleh Pemerintah, kemudian bekerjasama dengan pengusaha perorangan dan masyarakat lokal. Seperti halnya usaha mikro berupa kuliner, kerajinan dan *handycraft*, pemerintah berperan dalam kegiatan berupa pembinaan sosialisasi, bintek dan pengolahan kemudian, pengusaha perorangan sebagai pemilik modal dan masyarakat lokal ikut serta dalam pengelolaan teknisnya. Adapaun terkait dengan keterlibatan pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Kabupaten Boyolali.

c. Kemitraan kepemilikan lokal

Kemitraan kepemilikan lokal sebagai salah satu prinsip dari *Good Tourism Governance* sangat erat kaitannya dengan hubungan yang diciptakan dalam bentuk sumber daya manusia pengelola usaha dan industri pariwisata. Prinsip tersebut telah dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan yang tertera dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Boyolali 2017 dengan bentuk pengusaha perorangan ataupun badan wajib mendaftarkan usaha pariwisatanya pada dinas yang terkait, melibatkan peran masyarakat lokal untuk peningkatan

keikutsertaan dan meningkatkan rasa kepemilikan, selanjutnya dapat diidentifikasi bahwa terkait dengan transportasi di Kabupaten Boyolali masih sedikit dan menjadi kendala tersendiri bagi pengembangan kawasan wisata.

d. Pemanfaatan sumber daya secara berlanjut

Prinsip pemanfaatan sumber daya berlanjut sebagai salah satu bentuk perhatian terhadap kondisi lingkungan. Pemanfaatan sumber daya mempertimbangkan kebutuhan pada saat sekarang dan tidak mengabaikan kemampuan untuk generasi yang akan datang. Prinsip ini telah tersampaikan melalui Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Boyolali tahun 2017 dengan beberapa karakteristik.

e. Mengakomodasikan aspirasi masyarakat

Prinsip mengakomodasikan aspirasi masyarakat menunjukan bahwa aspirasi masyarakat dibutuhkan dalam pengelolaan. Implementasi dari prinsip ini ditemukan dalam bentuk teknis, dimana masyarakat dimintai pendapat ketika ada monitoring dari berbagai pihak pada pengelola wisata Tlatar.

f. Daya dukung lingkungan

Berdasarkan data yang disajikan keberadaan wisata Tlatar sangat diharapkan dalam membantu mengurangi pengangguran dan menjadi daya dukung kesejahteraan masyarakat. Sehingga kemudian berdampak pada perekonomian dan social masyarakat.

Prinsip ini diimplementasikan dengan keterlibatan masyarakat dalam ikut serta mengelola pariwisata dengan menjadi pekerja atau buruh.

g. Monitor dan evaluasi program

Berdasarkan data yang disajikan yang menjadi dasar dari prinsip ini adalah melalui Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2015 terkait Penyelenggaraan Pariwisata dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Boyolali 2017. Sehingga dalam implementasinya, sudah ada program dan target dalam proses pembangunan yang sedang dilakukan.

h. Akuntabilitas program

Penerapan prinsip Akuntabilitas program memperhatikan dan bertanggung jawab atas komponen-komponen lingkungan yang aling berkaitan seperti sumber daya. Hal tersebut telah tercantum dalam Perda Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Kabupaten Boyolali.

i. Pelatihan pada masyarakat terkait

Berdasarkan data yang disajikan, prinsip pelatihan pada masyarakat terkait telah tercantum pada Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Boyolali 2017 dalam berbagai arahan program.

j. Promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan

Prinsip promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan diperlukan dalam pengelolaan pariwisata. Hal tersebut ditemukan dalam Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Kabupaten Boyolali Pasal 38 menyatakan bahwa:

(1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;

- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggungjawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali melalui fenomena dan kondisi yang ada di lapangan meliputi:

a. Faktor Pendukung

1) Potensi pariwisata yang sudah ada

Berdasarkan data yang disajikan salah satu faktor pendukung dalam pengembangan wisata adalah dengan keberadaan potensi wisata yang sudah ada. Potensi yang ada menjadi proyek bersama antara pemerintah daerah, masyarakat dan pegusaha untuk berpadu

dalam mengembangkan obyek wisata yang ada, dimana keberadaan obyek wisata yang seterusnya akan menjadi *multiplier effect* pada social ekonomi masyarakat. Pada dasarnya tidak ada yang sulit jika sudah terjalin koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Tujuan yang sama akan menyebabkan pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk terus mengembangkan potensi wisata Tlatar sehingga kesejahteraan bersama dapat terwujud.

2) Adanya peran swasta

Berdasarkan data yang disajikan, peran swasta sangat membantu pemerintah dalam mengembangkan Kawasan Wisata Tlatar, karena swasta disini merupakan pengusaha yang memiliki modal untuk kemudian mau menambahkan fasilitas dan atraksi tambahan di area yang dikelola. Ketika pemodal memiliki modal yang lebih maka akan banyak pembaharuan yang terjadi, akan tetapi apabila belum berdampak pada ke stagnanan pengelolaan wisata. Peran dinas dalam mengikutsertakan pengusaha dalam mengelola pariwisata juga melibatkan pengusaha untuk memperhatikan keindahan, kebersihan yang ada di lingkungan wisata. Kawasan Wisata Tlatar sebagai kawasan yang memiliki area wisata yang relatif sama, dengan demikian mereka dituntut untuk menciptakan iklim usaha yang positif guna tujuan bersama.

3) Antusias dari masyarakat mulai muncul

Antusias dari masyarakat merupakan pendukung dari pengembangan wisata Tlatar. Masyarakat mulai menyadari keberadaan dari obyek wisata di lingkungan mereka dan berupaya untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk. Baik dalam kecakapan pelayanan, promosi dan penyelenggaraan event. Pelayanan dilihat dari bagaimana masyarakat bersikap ketika bertemu dengan wisatawan, melayani ketika sedang berjualan dan sebagainya. Promosi berkaitan dengan kesukarelaan dari masyarakat untuk mereview tempat wisata, dan postingan terkait tempat wisata di social media, dan menceritakan ke teman, tetangga ataupun saudara.

b. Faktor Penghambat

- 1) Ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan dalam menyusun infrastruktur dan fasilitas destinasi belum memadai

Salah satu faktor penghambat dalam pengembangan wisata Tlatar adalah rendahnya ketersediaan SDM, baik aparatur ataupun masyarakat sekitar. Berdasarkan data yang disajikan, SDM yang mampu untuk menyusun infrastruktur dan fasilitas destinasi sejauh ini belum banyak. Adapun juga sedikit, sehingga kondisinya masih mengalami stagnasi. Pariwisata merupakan salah satu industri yang terus berkembang dan bersaing. Jadi diperlukan pembaharuan dan kreativitas untuk mengembangkannya. Tidak hanya sekedar menyandarkan pada salah satu pihak. Tetapi dibutuhkan sinergisasi antar berbagai aktor.

SDM berupa SDM masyarakat, aparatur dan pengelola. Ketiga nya mengalami ketidakseimbangan yang dilatarbelakangi oleh perbedaan kemampuan, pendidikan dan pengetahuan. Hal tersebut yang menjadi penghambat dalam pengembangan kawasan wisata. Dengan kondisi yang demikian akan menyulitkan transfer informasi, pengetahuan, ketrampilan, pembelajaran dan ide pada beberapa aktor. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan frekuensi pembinaan supaya dimasa mendatang pengusaha dan masyarakat dapat lebih partisipatif dalam program pembangunan pemerintah.

2) Manajemen pariwisata dan pengelolaannya belum terintegrasi

Manajemen sebagai satu hal yang penting untuk kehidupan pariwisata pada potensi wisata yang sudah ada. Karena pengaturan dan pengelolaan yang baik akan berhasil apabila ada keterpaduan dan keintegrasian suatu kawasan wisata. Berdasarkan data yang disajikan, manajemen pariwisata dan pengelolaan belum terintegrasi menjadi penghambat dari pengembangan kawasan wisata. Kawasan Wisata Tlatar terdiri dari beberapa area wisata yang dikelola oleh pengusaha yang berbeda-beda, pengelolaannyapun bersifat individual dimana setiap pengusaha mengurus usahanya masing masing. Hal tersebut berdampak pada wisatawan yang mengeluhkan tiket masuk dan biaya parkir dengan harga yang berbeda-beda dan membayar berkali-kali. Belum ada satu sistem keteraturan pembayaran satu kali di depan.

Disamping itu melalui data yang disajikan kurangnya transparansi antara pengelola dengan masyarakat, masyarakat membutuhkan kejelasan atas pengelolaan wisata di Tlatar.

3) Promosi yang belum maksimal

Promosi merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan produk kepada khalayak. Berdasarkan data yang disajikan, promosi pariwisata belum gencar dilakukan karena beberapa faktor seperti badan promosi yang kurang aktif dan belum banyaknya komunitas perjalanan wisata serta belum adanya pelatihan atau pembinaan terkait dengan hal tersebut. Kegiatan promosi masih bersifat tradisional dan belum menyentuh khalayak luas berupa penyebaran brosur, video dalam bentuk kaset dan sebagainya. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan berupa event perlu ditingkatkan lagi frekuensinya. Kondisinya, event yang diselenggarakan sudah menjadi daya tarik akan tetapi belum sepadan dengan pengembangan wisata yang ditawarkan. Karena hakikatnya menurut Syamsu, 2001 bahwa Promosi adalah penyesuaian antara produk pariwisata dengan permintaan wisata. Maka hal tersebut yang menyebabkan promosi untuk Kawasan Wisata Tlatar masih minim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali dalam perspektif *Good Tourism Governance* menghasilkan suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar terlihat dari upaya pemerintah terkait yakni berupa Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali yang melibatkan pengusaha dan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam pengembangan ojek dan daya tarik wisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan aktivitas promosi dan keterlibatan masyarakat. Kesenjangan sangat diperlukan dalam pengelolaan pariwisata yang berarti dapat memahami aspek keterkaitan antar sektor, disini yang berperan pemerintah, swasta dan masyarakat, di satu sisi dapat ditemukan kesinambungan akan tetapi di sisi lain terdapat tumpang tindih peran serta mis komunikasi.
2. Penerapan prinsip-prinsip *Good Tourism Governance* dalam pengelolaan Kawasan Wisata Tlatar pada umumnya sudah diterapkan dengan baik melalui regulasi dan dasar program. Akan tetapi setelah disesuaikan

dengan kondisi di lapangan belum terimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan harapan.

3. Adapun faktor yang harus diperhatikan dan mempengaruhi pengembangan wisata yang meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya potensi pariwisata yang sudah ada, keberadaan peran dari swasta, dan mulai munculnya antusias dari masyarakat. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat berupa ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan dalam menyusun infrastruktur dan fasilitas destinasi belum memadai, manajemen pariwisata dan pengelolaannya belum terintegrasi, dan promosi yang belum maksimal.

B. Saran

Melalui penjelasan yang disampaikan, saran yang dapat diberikan peneliti sehubungan dengan Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali dalam perspektif *Good Tourism Governance* antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar perlu ditunjang dengan kemampuan para aparat pengelolanya. Baik dari aparat pemerintah, pengusaha dan masyarakat agar memiliki kompetensi kepariwisataan yang memadai. Sehingga ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan dalam menyusun infrastruktur dan fasilitas destinasi dapat teratasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperbanyak frekuensi pelatihan di luar

yang berkesinambungan. Dengan mengirimkan beberapa perwakilan aparat untuk melakukan tugas belajar terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan. Selain itu dalam meningkatkan kompetensi aparatur pengusaha dan masyarakat harus dimulai dengan membuka pendidikan non-formal yang terkait dengan kepariwisataan dalam bentuk bimbingan teknis pelaku pariwisata dan penataran-penataran mengenai kepariwisataan. Saran yang diberikan penulis dalam memulai kegiatan non-formal tersebut sebaiknya dengan melibatkan para akademisi sebagai program pembangunan daerah.

2. Kawasan Wisata Tlatar merupakan kawasan wisata yang di dalamnya terdapat beberapa area wisata, yang mana di setiap area wisata dikelola secara individual. Namun yang menjadi permasalahan adalah adanya manajemen pariwisata dan pengelolaannya belum terintegrasi. Penemuan di lapangan keluhan para wisatawan yang harus membayar tiket masuk pada area wisata yang berbeda. Disamping itu terjadi kesalahpahaman antar satu pihak, masyarakat mengandalkan pemerintah, pemerintah mengandalkan swasta. Sehingga akhirnya terjadi tidak keselarasan karena tidak ada kejelasan dan transparansi. Karena sejatinya pembangunan tidak hanya dilakukan oleh salah atau dua sektor saja, dalam mewujudkan *Good Tourism Governance* ada kesinergisan antar berbagai aktor yang kemudian saling melengkapi. Dengan melihat kondisi tersebut peneliti menyarankan agar tercapainya keselarasan dalam pengembangan Kawasan Wisata Tlatar adalah dengan meningkatkan frekuensi dialog, rembug dan pembinaan

antara pihak pemerintah, masyarakat terkait dan pengusaha agar ada kejelasan dan menyamakan kesepahaman untuk mencapai tujuan yang sama dalam kepariwisataan. Sehingga tidak ada yang dirugikan.

3. Meningkatkan peran kelompok di tingkat lokal sangat perlu karena akan memupuk rasa kepemilikan akan lingkungan wisata. Terutama pada komunitas pemuda dan kelompok sadar wisata yang sudah terbentuk. Peningkatan peran dapat dilakukan dengan membuat proyek atau kegiatan bersama.
4. Pengaktifan kembali badan promosi pariwisata sebagai salah satu upaya untuk mempromosikan pariwisata, karena pariwisata adalah sebagai industri ada produk yang dijual di dalamnya sehingga promosi ini sangat perlu. Promosi yang kontinyu dapat dilakukan melalui mernagkul komunitas pemuda untuk membuat konsep promosi pariwisata, secara tidak langsung masyarakat diminta untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Sebagaimana di jaman ini teknologi telah membawa masyarakat menjadi masyarakat yang modern. Keberadaan sosial media (*facebook, instagram, twitter, whatsapp, youtube* dll) telah menjadi trend di kalangan masyarakat.
5. Penelitian ini belum komprehensif, karena keterbatasan khasanah peneliti dalam melaksanakan penelitian, maka untuk kebutuhan penelitian berikutnya bagi yang berminat meneliti tentang *good tourism governance* dapat memperbanyak kajian dan literasi terkait *good governance* pada sektor pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Faried. 2015. *Teori dan Konsep Administrasi Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hakim, Lukman Em. 2016. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Ar ruzz Media
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep Teori dan Isu Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Gava Media
- Kristiantina, Dyah Elyta. 2013. *Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Blitar dalam Mengembangkan Potensi Daerah sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah*. Skripsi. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*. Yogyakarta: Erlangga
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mill, Robert Christie. 2000. *Tourism The International Business Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pendit, Nyoman S. 2006. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pitana, I Gde & I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Prasiasa, Dewa Putu Oka. 2011. *Wacana Kontemporer Pariwisata*. Jakarta: Salemba Humanika

- Rosyidah, Wirda Ainur. 2017. *Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bondowoso*. Skripsi. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhamdani. 4 Mei 2016. *Potensi PAD Boyolali Belum Optimal*, (online). Diakses melalui joglosemar.co/2016/05/potensi-pad-boyolali-belum-optimal.html pada 12 Desember 2017 Pukul 14.00 WIB
- Sumihardjo, Tumar. 2008. *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*. Bandung: Fokus Media
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Tjiptoherijanto, Prijono & Mandala Manurung. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Pembangunannya*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Utomo, Warsito. 2012. *Administrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. Yogyakarta: Magister Administrasi Publik UGM & Pustaka Pelajar.
- Yoeti, Oka A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Penerbit Angkasa

Jurnal

- Kurniawan, Teguh. 2007. Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik dan NPM Ke Good Governance. Jurnal. JIANA Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume 7, I Januari 2007. Halaman 52-70
- Nurhayati. 2014. Analisis Investasi Sektor Pariwisata Oleh Daerah Pemerintah Kota Batam Tahun 2014. Jurnal. Dosen tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Kepulauan Riau. Diakses pada 16 Januari 2018 pada pukul 17.00 WIB melalui <http://download.portalgaruda.org/>

- Nurhayati, dkk. 2017. *The Policies and Practices of Good Governance in Indonesia Tourism: A Case Study in Malang, East Java. International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG). Vol. 3, No 1, April 2017, pages 26-32.* Diakses melalui ijleg.ub.ac.id
- Syamsu dkk. 2001. Penerapan Etika Perencanaan Pada Kawasan Wisata, Studi Kasus di Kawasan Agrowisata Salak Pondoh Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Vol 5. No 3 Maret 2001.* Jakarta: LP3M STP Tri Sakti,
- Utoyo S, Bambang. 2017. Analisis Kebijakan Prinsip Governance dan Aktor Melalui Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Perencanaan Kota. *Jurnal. Spirit Publik Volume 12, Nomor 1. Halaman 45-56*

Dokumen

- Boyolali dalam Angka 2017. Boyolali: BPS Kabupaten Boyolali
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali tahun 2017
- Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Kabupaten Boyolali
- Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali 2016-2021
- Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Boyolali 2017
- Sekretariat Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali 2018